



JOURNAL OF
POLITICAL ISSUES

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES

VOLUME	NOMOR	TAHUN	HALAMAN	ISSN
3	1	Juli 2021	1-61	2785-7766

**Partisipasi Politik Masyarakat di Era Politik Siber
pp. 1-13**

(Jerry Indrawan, Astin Julia Rosa, Anwar Ilmar, Garcia Krisnando Nathanael)

**Penggunaan Media Sosial Instagram dalam Membangun Citra
Positif Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019
pp. 14-28**

(Dina Fadiyah & Jimmy Simorangkir)

**Mongolia's assertive and pragmatic role in India Connect Central
Asia Policy Current trajectory and Future Ahead
pp. 28-35**

(Subhash Kumar & Souvik Chatterjee)

**US – Iran Proxy War in Middle East Under Trump Administration
pp. 36-48**

(Hino Samuel & Laode Muhamad Fathun)

**Strategi Advokasi Masyarakat Sipil dalam Mendesak Pembatalan
Revisi Regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi
pp. 49-61**

(M. Ezha Fachriza Roshady & Sri Budi Eko Wardhani)

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

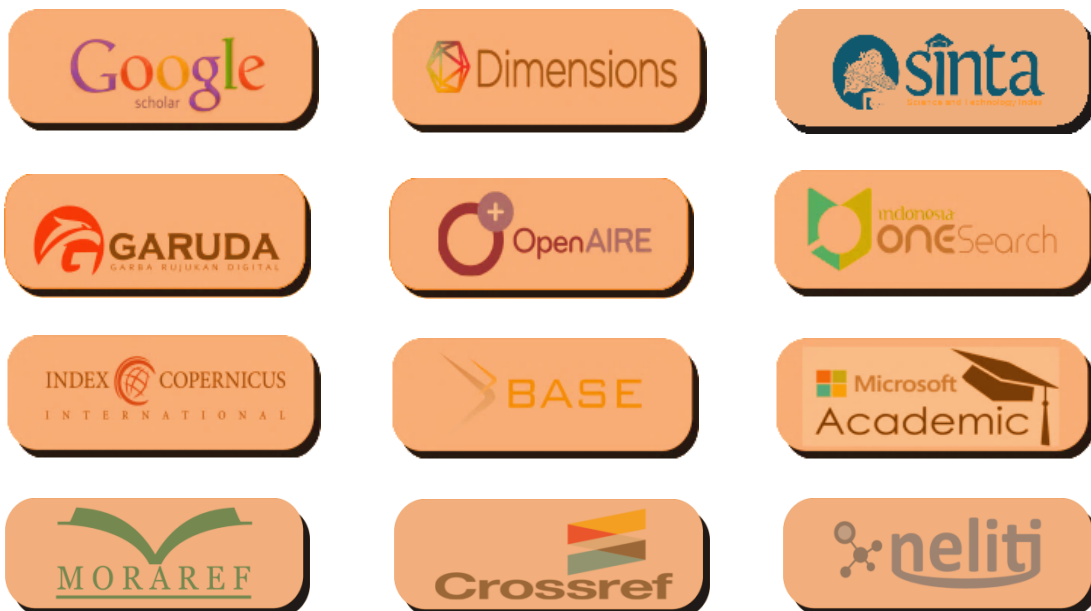
CALL FOR PAPER:

Journal of Political Issues (JPI) menerima naskah hasil penelitian, kajian mauun pemikiran kritis mengenai isu-isu daam lingkup bidang politik yang orisinil dan belum pernah dimuat/dipublikasi di jurnal maupun majalah lain. Naskah diketik dengan menggunakan Ms Word menggunakan Bahasa Indonesia dengan ketentuan spasi tnggal huruf *Times New Romans*, ukuran kertas A-4, dan banyak kata berjumlah 4.500-6.000 kata atau 8-15 halaman. Naskah di *submit online* melalui laman <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>, serta dilengkapi dengan keaslian Naskah dan daftar riwayat hidup penulis. Redaksi JPI berhak melakukan penilaian dan penyuntingan terhadap naskah yang masuk. Naskah yang lolos seleksi oleh redaksi, akan di *review* oleh Mitra Bestari (*Reviewer*). Petunjuk penulisan selengkapnya dapat dilihat di <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>

Sub tema naskah meliputi:

- Demokrasi
- Desentralisasi
- Partai Politik
- Kebijakan Publik
- Pemilu
- Keamanan dan Politik Internasional
- Gerakan Sosial
- Gender dan Politik Identitas
- Kesejahteraan Sosial
- Masyarakat dan Manajemen Publik

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES SUDAH TERINDEKS DI:



Volume 3 Nomor 1, Juli 2021

Journal of Political Issues diterbitkan pertama kali pada bulan Juli 2019 dan saat ini secara konsisten diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun setiap Juli dan Desember oleh Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

Pengarah:

Kepala Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab (*Editor in Chief*):

Ranto, M.A.

Redaktur (*Managing Editor*):

Komang Jaka Ferdian, M.Si.

Penyunting (*Section Editor*):

Bahjatul Murtasidin, M.Si.

Sandy Pratama, M.Si.

Rendy, M.A.

La Ode Muhamad Muliawan, M.A.

Amir Syamsuadi, M.Si.

Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si

Dewan Editor (*Editorial Board*)

Dr. H. S. Tisnanta, M.H.

Dr. Yusa Djuyandi, M.Si.

Dr. Oki Hajiansyah Wahab, M.H.

Copy Editor & Lay Out Editor:

Agun Sutrisno, A.md.

Mitra Bestari (*Reviewer*):

Prof. Syarif Hidayat (Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta)

Leo Agustino, M.Si., Ph.D. (Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten)

Luthfi Makhasin, M.Si., Ph.D. (Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)

Agung Wibowo, M.Si. Ph.D. (Jurusan Kehutanan, Universitas Palangkaraya, Palangkaraya)

Dr. Ibrahim, M.Si. (Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung)

Dr. Ratnia Solihah, M.Si. (Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung)

Dr. Sulistya Ekwati, M.Si. (Puslitbang Sosial Ekonomi KLHK, Jakarta)

Dr. Yusnarida Eka Nizmi, M.Si. (Hubungan Internasional, Universitas Riau, Riau)

Dr. Pahrudin HM, M.A. (Ilmu Pemerintahan, STISIP Nurdin Hamzah, Jambi)

Dr. Ardli Johan Kusuma, M.H.I. (Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

Dodi Faedlulloh, M.Si. (Administrasi Publik, Universitas Lampung, Lampung)

Restu Rahmawati, M.A. (Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

Alamat:

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
Jl. Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Kode Pos: 33172, Indonesia

Email: editor@jpi.ubb.ac.id

Url: <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>

e-ISSN: 2685-7766

Daftar Isi

Partisipasi Politik Masyarakat di Era Politik Siber (Jerry Indrawan, Astin Julia Rosa, Anwar Ilmar, Garcia Krinanso Nathanael)	01-13
Penggunaan Media Sosial Instagram dalam Membangun Citra Positif Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 (Dina Fadiyah, Jimmy Simorangkir)	14-28
Mongolia's Assertive and Pragmatic Role in India Connect Central Asia Policy Current Trajectory and Future Ahead (Subhash Kumar, Sauvik Chatterjee)	29-35
US-Iran Proxy War in Middle East Under Trump Administration (Hino Samuel, Laode Muhamad Fathun)	36-48
Strategi Advokasi Masyarakat Sipil dalam Mendesak Pembatalan Revisi Regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi (M. Eha Fachriza Roshady, Sri Budi Eko Wardhani)	49-61

Salam Redaksi

Salam Hangat. . .

Tiada kata yang dapat mewakili kegembiraan kami saat menyampaikan edisi pertama *Journal of Political Issues*. *Journal of Political Issues* kini hadir kembali dengan terbitan terbaru Volume 3 Nomor 1 Juli 2021 yang terbit sesuai dengan jadwal yang ditargetkan. Melalui proses *Open Journal System*, secara tidak langsung dapat kita sadari bahwa peran dari teknologi dapat membantu kita dalam berbagai macam hal, terutama dalam mengelola jurnal secara elektronik.

Terbitan Januari, Volume 3 Nomor 1 kali ini memuat enam artikel berbobot dan menarik yang dikontribusikan oleh para penulis dari berbagai instansi baik di Indonesia. Berbagai macam tema dalam bidang politik dalam edisi ini akan membawa pembaca untuk lebih dekat dengan dunia sains dalam bidang Politik. Artikel pertama ditulis oleh Jerry Indrawan, Astin Julia Rosa, Anwar Ilmar, dan Garcia Krisnando Nathanael menggambarkan tentang Perkembangan teknologi internet dan politik siber telah memungkinkan aktivitas politik dilakukan secara online, termasuk diseminasi pesan politik melalui platform digital. Partisipasi politik masyarakat di era politik siber meningkat melalui kampanye daring, terutama melalui media sosial.

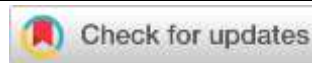
Artikel kedua ditulis oleh Dina Fadiyah dan Jimmy Simorangkir yang menggambarkan terkait penggunaan Instagram oleh Presiden Joko Widodo dalam membangun citra positifnya selama kampanye Pilpres 2019, dengan fokus pada unggahan dan postingan yang menggambarkan keberhasilannya sebagai presiden. Penggunaan Instagram secara konsisten dan ofensif oleh Jokowi membantu mencapai tujuan kemenangan dalam pemilihan presiden tersebut. Artikel ketiga ditulis oleh Subhash Kumar dan Souvik Chatterjee menjelaskan bahwa Mongolia memiliki keunikan dan kepentingan dalam politik dunia saat ini berkat situasi geografisnya yang terkurung daratan, kepadatan penduduk yang rendah, dan lingkungan yang keras. Meskipun terbatas dalam hal ekonomi, posisi geostrategis Mongolia, aset energi yang belum dieksplorasi, dan pemerintahan demokratisnya memberikan kontribusi pada kepentingannya dalam politik global, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan India dalam melawan ekspansionisme China di Asia Timur Laut.

Artikel keempat ditulis oleh Hino Samuel Jose dan Laode Muhamad Fathun yang menjelaskan bahwa Hubungan bilateral yang tegang antara Iran dan Amerika Serikat telah membawa Timur Tengah ke tingkat masalah yang lebih tinggi. Perbedaan kepentingan geopolitik dan regional kedua negara telah menyebabkan berbagai masalah multidimensional, mulai dari politik, keamanan, hingga masalah ekonomi. Artikel kelima ditulis oleh Mohammad Ezha Fachriza Roshady dan Sri Budi Eko Wardhani yang menjelaskan bahwa strategi gerakan masyarakat sipil dalam koalisi antikorupsi dengan menggunakan teori advokasi. Melalui strategi advokasi, koalisi tersebut berupaya mengontrol kekuasaan negara, mendukung KPK, dan meningkatkan kesadaran publik, namun upaya mereka gagal ketika UU KPK direvisi oleh DPR pada tahun 2019.

Akhirnya, *Journal of Political Issues* mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim pengelola edisi *Journal of Political Issues* Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 serta kepada mitra bestari (*Reviewer*) yang berperan aktif membantu penerbitan jurnal ini. *Journal of Political Issues* tidak akan pernah berhenti untuk mengedepankan kualitas artikel yang diterbitkan dan terus berusaha secara konsisten untuk mempersiapkan dan mempersembahkan pengetahuan baru dalam lingkup Politik. Kami berharap artikel-artikel tersebut akan memberikan manfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan. Kami juga mengajak para pembaca berkontribusi untuk berbagi ilmu dan bidang keahliannya

untuk menuliskan karya ilmiah dalam bentuk jurnal di edisi Journal of Political Issues Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 yang akan terbit sesuai dengan target terbitan. Terima Kasih.

Selamat membaca,
Salam Publikasi!



Partisipasi Politik Masyarakat di Era Politik Siber

Jerry Indrawan^{1*}, Astin Julia Rosa¹, Anwar Ilmar¹, Garcia Krisnando Nathanael²

¹Jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12450, Jakarta-Indonesia

²Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12450, Jakarta-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Mar 03, 2021

Diterima: Jun 06, 2021

Dipublikasi: Jul 31, 2021

Kata Kunci:

Masyarakat;Partisipasi;
Politik;Siber;Teknologi;

Koresponden:

Jerry Indrawan

Jurusan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta

Email:

jerry.indrawan@upnvj.ac.id

Sitasi Cantuman:

Indrawan, J., Rosa, A. J., Ilmar, A., & Nathanael, G., K. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat di Era Politik Siber. *Journal of Political Issues*. 3(1); 1-12. <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i1.44>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v3i1.44>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract In today's world, many technologies have emerged that can facilitate human life, one of which is the internet, which is in the realm of cyber. The development of technology in the internet today allows political activities to be carried out through this realm. Developments in the form of facilities for accessing information relating to political activities are currently mostly carried out through this cyber medium, so it is called cyber politics. Cyber politics relies heavily on digital platforms to disseminate political messages. Thus, in the midst of the current fast pace of information technology, it is hoped that the era of cyber politics can have a positive effect on people's political participation. Community political participation is indispensable in determining political leaders because their role is very high in the era of cyber politics. The results of the research show that public political participation in the cyber era has increased, especially through online means. These tools are an increase in online campaigns that are mostly carried out through social media. For this reason, this paper will explain the relationship between political activity in the cyber politics era and the political participation of the people. The research method is qualitative and the data gathering technic is conducted through literature studies.

Abstrak Dalam perkembangan dunia masa kini banyak bermunculan teknologi-teknologi yang dapat mempermudah hidup manusia, salah satunya adalah internet yang berada dalam ranah siber. Perkembangan teknologi dalam internet saat ini memungkinkan aktivitas-aktivitas politik dijalankan melalui ranah tersebut. Perkembangan dalam bentuk kemudahan-kemudahan untuk mengakses informasi-informasi yang berkaitan aktivitas-aktivitas politik saat ini banyak dilakukan melalui medium siber tersebut, sehingga disebut dengan politik siber. Politik siber sangat mengandalkan platform digital untuk mendiseminasikan pesan-pesan politik. Dengan demikian, di tengah kecanggihannya arus teknologi informasi saat ini, diharapkan era politik siber dapat berpengaruh positif terhadap partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat sangat diperlukan dalam menentukan pemimpin-pemimpin politik karena peran mereka sangat tinggi di dalam era politik siber. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di era siber mengalami peningkatan, khususnya melalui sarana-sarana daring. Sarana-sarana tersebut, adalah peningkatan kampanye daring yang banyak dilakukan melalui media sosial. Untuk itu, tulisan ini akan menjelaskan keterkaitan antara aktivitas politik di era politik siber dengan partisipasi politik masyarakat. Metode penelitian bersifat kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur.

Tentang:

Jerry Indrawan, menyelesaikan studi S2 di Universitas Pertahanan pada tahun 2014. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Jurusan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Astin Julia Rosa, merupakan mahasiswa di Jurusan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Anwar Ilmar, menyelesaikan studi S2 Jurusan Ilmu Politik di Universitas Indonesia pada tahun 2016. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Jurusan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Garcia Krisnando Nathanael, menyelesaikan studi S2 Jurusan Ilmu Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi London School of Public Relations pada tahun 2015. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

PENDAHULUAN

Kajian ilmu politik memiliki artian sebagai sebuah bentuk ilmu yang mempelajari politik dan kepolitikan yang mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat kehidupan masyarakat pada masa sebelumnya (Budiardjo, 2008). Ilmu politik pada dasarnya mempelajari keterkaitan antara yang akan dipilih dan juga yang memilih atau dikenal dengan sebutan pemilihan umum yang mana hak pilih warga negara digunakan dengan semestinya.

Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk yang banyak jika dibandingkan dengan mayoritas negara-negara lain di dunia. Sebelum memasuki kalimat yang lebih mendalam, bentuk Negara Indonesia yaitu Republik sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Dikatakan oleh Ni’matul Huda “Negara kesatuan dideklarasikan oleh para pendirinya saat kemerdekaan dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari suatu negara, negara tidak dibentuk berdasarkan kesepakatan, setelah itu baru dibentuk wilayah atau daerah di bawahnya (Huda, 2004).

Kesatuan berarti setiap warga yang ada di dalamnya merasakan bentuk kenyamanan dan kedamaian, akan tetapi hingga saat ini Indonesia memiliki banyak permasalahan, seperti misalnya Indonesia memiliki 34 Provinsi di negara ini yang secara tidak langsung memiliki beragam permasalahan mulai dari masalah keuangan, kebudayaan, bahkan hingga mencapai permasalahan terkait pada saat adanya pesta demokrasi baik dalam bentuk pemilihan presiden dan wakilnya hingga pemilihan terkait kepala daerah, seperti gubernur dan bupati.

Menurut penjelasan yang disampaikan Flew dalam Situmorang, “*the idea of new media captures both the development of unique forms of digital media and the remaking of more traditional media forms to adopt and adapt to the new media technologies*”. Yang mana penjelasannya berarti istilah media baru telah disepakati sebagai sebuah perbedaan antara media lama dengan media saat ini yaitu media terbaru (Situmorang, 2012).

Semakin pesatnya sebuah perkembangan zaman juga tidak terlepas dari keadaan perpolitikan yang sering kali membutuhkan adanya saran dan juga kritik yang disampaikan dari rakyat sebagai bentuk evaluasi kepada partai politik dan politisi yang akan mencalonkan dirinya. Para pelaku politik harus bisa menyampaikan pesan atau visi dan misi serta program kerja mereka kepada para pendukungnya melalui sarana media sosial yang dapat membangun berbagai opini dari masyarakat pemilih, yang kemudian opini ini yang dimanfaatkan partai politik dan politisi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (Wahyudi, 2018).

Pemilu merupakan sebuah instrumen yang mentransformasikan kedaulatan menjadi kewenangan. Melalui pemilu, prinsip kedaulatan di tangan rakyat akan diuji melalui sebuah kontestasi politik. Warga negara yang memiliki kedaulatan, melalui pemilu akan memilih wakil atau orang yang akan duduk di badan eksekutif atau legislatif. Wakil-wakil ini akan memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan publik yang terkait dengan kepentingan seluruh warga negara.

Dalam setiap pemilu yang dilaksanakan di era reformasi, mulai dari tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan terakhir 2019, partisipasi politik tidak selalu maksimal, alias masih ada yang tidak menggunakan hak suaranya. Kondisi ini terjadi di dalam pemilu legislatif (pileg), maupun pemilu presiden (pilpres) Oleh karena itu, dari setiap pemilihan yang diadakan di Indonesia memiliki permasalahan dalam hal jumlah pemilih yang mulai berpartisipasi secara aktif untuk mengikuti pemilihan suara. Partisipasi sendiri digunakan oleh orang-orang sebagai bentuk kegiatan yang ikut aktif dan serta dalam pemilihan yang dilangsungkan oleh negaranya baik memilih secara langsung dan juga tidak langsung (Budiardjo, 2008).

Selanjutnya, perkembangan dunia siber sudah sangat marak dewasa ini. Hal ini diawali dengan adanya internet yang merupakan suatu inovasi teknologi yang menyebabkan manusia lebih mudah untuk berinteraksi dalam arus komunikasi dan informasi dengan akses

yang lebih cepat, daya jangkauan luas, dan menggunakan biaya terjangkau. Penggunaan internet dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dibendung selaras dengan perkembangan zaman. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi oleh masyarakat menyebabkan terciptanya ruang baru untuk saling berinteraksi yang disebut dengan *cyberspace* (ruang siber). Interaksi yang terjadi di ruang siber oleh suatu kelompok masyarakat, baik di lingkungan terkecil hingga antar-negara dan antar-benua dapat terjadi dalam berbagai hal dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun harus tetap memperhatikan faktor keamanannya.

Dengan demikian, politik siber merupakan suatu perspektif baru untuk melihat, memahami, dan menganalisis aktivitas-aktivitas politik, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di dalam ruang siber. Itu sebabnya tulisan ini akan membahas kaitan antara penggunaan ruang siber untuk kepentingan aktivitas-aktivitas politik, khususnya partisipasi politik masyarakat.

Pentingnya membahas tema ini adalah karena kehidupan politik dunia, khususnya pasca pandemi Covid-19 sudah tidak sama lagi. Aktivitas-aktivitas politik yang dulu dilakukan secara fisik sekarang mulai beralih ke dunia maya. Kondisi ini menjadi sebuah masalah penting yang harus diteliti karena memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap eksistensi dari politik itu sendiri. Itu sebabnya penelitian ini bertujuan untuk meneliti partisipasi politik masyarakat di era siber. Dengan demikian, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Apakah partisipasi masyarakat di era politik siber mengalami peningkatan atau tidak?”.

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian dibahas metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi setiap peneliti mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang diinginkan. Untuk menerapkan teori terhadap permasalahan, diperlukan metode khusus yang dianggap relevan dan dapat membantu memecahkan permasalahan. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Metode deskriptif dipilih untuk menjelaskan masalah pada penelitian ini karena metode ini adalah sebuah metode penelitian yang membuat gambaran mengenai kejadian untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Moelong, 2001).

Desain penelitian yang bersifat deskriptif juga dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (individu, komunitas, lembaga masyarakat dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1997). Fakta-fakta yang didapatkan di lapangan diharapkan dapat memberi gambaran tentang bagaimana korupsi dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Penulis melakukan proses studi pustaka dengan mengunjungi berbagai perpustakaan (*library research*) dan mengumpulkan data-data primer melalui bahan-bahan tulisan dalam berbagai bentuk, yang diharapkan dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini.

LANDASAN TEORITIK

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Politik Siber atau lebih dikenal dengan teori *Cyberpolitics*. Teori *Cyberpolitics* menurut Nazli Choucri adalah sebuah terminologi yang diciptakan, berkaitan dengan interaksi manusia (politik) yang meliputi kegiatan-kegiatan, seperti siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, yang dimungkinkan untuk terjadi melalui ranah ruang siber sebagai sebuah arena baru pertarungan dengan pengandaian dan realitanya sendiri. Meskipun ada perbedaan dalam perspektif di

seluruh dunia, namun tetap terdapat pemahaman ilmiah umum tentang arti “politik”. Kompleksitas yang muncul terkait awalan “cyber” itulah yang membedakan semantik yang baru dibangun ini (Choucri, 2021).

Atas dasar itulah, seperti yang dikatakan Choucri, ada semantik baru yang dibangun dalam terminologi politik. Semantik tersebut adalah *Cyberpolitics*, di mana kegiatan-kegiatan politik yang memiliki signifikansi besar terhadap jalannya sebuah negara, pemerintahan, termasuk roda kehidupan masyarakat, dilakukan melalui ruang siber. *Cyberpolitics* berkembang menjadi sebuah istilah yang bisa dipakai untuk menjelaskan aktivitas-aktivitas politik modern, yang tidak perlu lagi menggunakan ruang nyata, melainkan cukup ruang siber yang memiliki pengandai-andaian dan realitanya sendiri (Choucri, 2012). Ini sebabnya untuk melihat peningkatan partisipasi masyarakat di era politik siber ini, penulis menggunakan teori *Cyberpolitics*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengenal Politik Siber

Politik siber berkaitan secara langsung dengan ruang siber. Dalam ruang siber terdapat sebuah bentuk-bentuk yang dapat menjelaskan seperti apa ruang siber itu. Timbulnya sebuah isu-isu menjadikannya dalam bentuk terminologi yang menunjukkan latar belakang proses pengambilan keputusan oleh pemerintahan negara. Politik siber berhubungan erat dengan bentuk kegiatan-kegiatan politik, seperti partisipasi politik, pendidikan politik, kampanye politik, implementasi demokrasi, komunikasi politik, kampanye politik, keamanan dan pertahanan sebuah negara. Selain itu, politik siber berkaitan juga dengan sosial, budaya, dan juga masyarakat (Aji & Indrawan, 2019).

Politik siber dengan demikian sangat terkait dengan media digital. Menurut Hasfi dijelaskan bahwa media digital membuka ruang komunikasi dan partisipasi politik dengan meningkatkan kemungkinan interaksi antara elemen penting didalamnya yakni partai dan institusi negara yang disebut sebagai elite dan warga negara atau non-elite. Ruang siber merupakan sebuah bentuk sinyal atas terjadinya kemajuan modernitas dalam konteks post-modernis (Hasfi, 2019).

Ada banyak sekali bentuk media, khususnya media sosial, di dalam perkembangan teknologi dan informasi. Beberapa contoh yang paling terkenal, seperti, Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Media sosial memberi kemudahan untuk membagikan data sebagai bentuk diseminasi informasi kepada khalayak luas. Kehadiran media sosial juga membuat para penggunaanya lebih mengerti keadaan di negaranya, maupun di luar negaranya. Dengan adanya media sosial ini, masyarakat mudah untuk mencari informasi di ranah daring tentang politik. Begitu pula para politisi untuk melakukan kegiatan dan aktivitas politiknya secara daring. Kemajuan teknologi, khususnya penggunaan media sosial akhirnya mempermudah umat manusia untuk mengakses informasi apa pun yang tersedia secara daring, dalam hal ini khususnya informasi-informasi tentang politik.

Jadi, menurut penulis kajian politik siber sangat diperlukan dalam perkembangannya di mana aktivitas politik masyarakat sudah mulai beralih dari yang sifatnya konvensional bergeser dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam ruang siber. Kondisi demikian merupakan bagian dari transformasi masyarakat untuk menjadi lebih kreatif dan kritis, namun tetap bertanggung jawab atas konten-konten yang disampaikan dalam ruang siber, yang sejalan dengan perkembangan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat yang diharapkan semakin meningkat.

Perkembangan Teknologi Informasi

Dalam media digital yang mana terdapat sebuah bentuk hasil dari teknologi tersebut yang bernama internet, yaitu sebuah gudang informasi tanpa batas, sebagai kumpula data (*database*) atau perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap dalam bentuk maya (Efriza & Indrawan, 2018). Dengan internet juga setiap kegiatan dapat dipermudah dan memiliki pengaruh yang penting dalam kemajuan bidang teknologi dan informasi yang dimiliki di negara tersebut.

Bentuk media komunikasi dan teknologi pada era ini memunculkan jenis-jenis yang berbeda beda. Salah satu contohnya adalah *e-commerce*, yang berarti adanya kemudahan teknologi dalam bidang perdagangan atau dikenal juga dengan *online shop*. Tujuannya untuk memudahkan penggunaanya untuk memilih jenis barang tanpa langsung bertatap muka dengan penjualnya (Mardatila, 2020).

Selain dalam bentuk perdagangan daring, bentuk kemajuan teknologi dan informasi juga mempengaruhi adanya kemudahan dalam pemerintahan seperti terciptanya *e-government* yang berguna untuk memudahkan pemerintah daerah maupun pusat untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakatnya sehingga lebih efisien dan juga efektif sebab dapat membuat pelayanan kepada masyarakat lebih demokratis dan *e-government* ini dapat diaplikasikan kepada lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif (Aji & Indrawan, 2019).

Perkembangan teknologi informasi yang terkait bidang politik masih terkesan asing sebab jarang sekali masyarakat yang mengetahui bentuk teknologi terkait politik yang dikenal dengan istilah politik siber yang memiliki fakta bahwa peran ruang siber dalam dunia politik juga memiliki arti yang sama penting dengan kemajuab teknologi di bidang yang lainnya. Fakta adanya kemajuan teknologi dengan perkembangan yang dialami oleh dunia perpolitikan tak terlepas dari adanya komunikasi politik yang membutuhkan aktor-aktor politik dalam menjalankan perannya masing-masing (Indrawan, 2019).

Menurut Efriza dan Indrawan, dalam hal ini yang termasuk dalam aktor politik seperti, politisi, figur politik, birokrat, aktivis kelompok kepentingan, kelompok penekan dan juga jurnalis dari media massa sebagai sebuah hal yang penting. Begitu juga dengan internet, di mana berbagai macam hal, pengetahuan, bentuk, seni dan yang lainnya dapat mudah diakses dan dipelajari oleh bangsa yang lainnya. Akan tetapi internet ini juga memiliki hal yang negatif dibalik segala sesuatu kemudahan yang diberikan, di dalam internet ada banyak sekali bentuk sifat dan pribadi setiap orang, mulai dari adanya sosialisasi gagasan, sebuah tuntutan, ajakan, hingga protes yang dilaksanakan secara orasi (Efriza & Indrawan, 2018).

Partisipasi Politik Era Politik Siber

Belakangan ini istilah siber semakin sering terdengar oleh telinga kita sebagai sebuah bentuk pengamanan, pengawasan dan juga pelayanan dalam era digital saat ini. Mulai dari *e-government* hingga bentuk politik siber yang digunakan sebagai bentuk atas pelayanan dan informasi terkait perpolitikan di daerah tersebut. Menurut tulisan yang disampaikan oleh Nazli Choucri, yang dikutip dari Indrawan, menurutnya politik siber adalah sebuah terminologi yang diciptakan, berkaitan dengan interaksi manusia (politik) yang meliputi kegiatan-kegiatan, seperti siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, yang dimungkinkan untuk terjadi melalui ranah ruang siber sebagai sebuah arena baru pertarungan dengan pengandai-andaian dan realitanya sendiri (Indrawan, 2019).

Setelah mengetahui dengan adanya internet bisa membuka wawasan masyarakat untuk lebih bisa berpikir secara rasional terkait isu-isu pemberitaan pada pemerintahan dan politik. Banyaknya sudut pandang yang dihasilkan oleh internet kepada pembacanya bisa menimbulkan adanya suatu permasalahan. Permasalahan ini sering kali dikaitkan dengan rasa tidak setuju dengan opini yang disampaikan oleh sudut pandang yang lainnya di sebuah

wilayah dalam bernegara, dari setiap opini yang dibuat dapat menghasilkan sebuah pemikiran terbaru terkait makna dari permasalahan tersebut.

Perkembangan teknologi dan informasi di era saat ini tidak lagi hanya lah menggunakan media seperti, media cetak dan lainnya, namun saat ini sudah beragam bentuk dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dikenal juga dengan media digital. Kemajuan yang dihasilkan oleh teknologi itu sendiri berimbas juga kepada faktor pemerintahan dan juga politik di suatu negara. Sebelum mengalami perkembangan yang begitu drastis, pada dasarnya konsep dari teknologi sendiri sudah muncul sejak era 1960-an, yang semakin lama terjadilah sebuah eksperimen internet pada saat itu, yang menghasilkan perkembangan yang pesat saat ini ([Herdyanto, 2019](#)).

Penggunaan internet menjadi salah satu poin penting dalam teknologi, dengan tingkat pemakaian internet di setiap daerah dalam negara Indonesia mengalami peningkatan yang dratis tingginya. Menurut data yang disampaikan oleh sekretaris Jenderal APJII Henri Kasyfi Soemartono, yang dikutip dari situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan bahwa penggunaan internet naik dari 64,8% tahun 2018 menjadi 73,7% tahun 2019 ([Kominfo, 2020](#)).



Gambar 1 Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2021

Dijelaskan pada bentuk infografik diatas bahwa dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia hampir dalam hitungan sekitar 272,1 Juta penduduk yang mendiami daerah Indonesia, dari jumlah penduduk yang berada di Indonesia memungkinkan adanya tingkat peningkatan grafik terkait penggunaan internet yang tinggi juga yaitu berkisar 175,3 Juta penduduk yang terdapat di Indonesia pada saat itu. Dengan jumlah penetrasinya sekitar 64% ini juga memungkinkan adanya tingkat penggunaan sosial media yang berkisar hingga 160

Juta dengan jumlah telepon pintar yang telah terdaftar dan mendapatkan koneksi oleh internet sekitar 338,2 Juta (Saputra, 2020).

Internet di Indonesia jelas telah meningkat yang dapat juga berpengaruh baik secara positif dan juga negatif kepada pemerintahan politik di Indonesia. Dalam kegiatan perpolitikan tidak lah terlepas dari sebuah kegiatan yang dinantikan oleh warga negara sebagai ajang bentuk dipilih dan memilih setiap lima tahunnya, kegiatan tersebut dikenal juga dengan pesta demokrasi atau Pemilihan Umum (Pemilu).

Menurut Rahmatunnisa (2017) terdapat fenomena yang dimiliki oleh pemilihan umum yang mana semakin menjadi sebuah fenomena global, yaitu pemilu masih menjadi bahan topik pembicaraan di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini membuat isu-isu ke pemilu selalu menjadi *trending topic* dunia, dimana pun pemilu diadakan, apalagi di negara dengan ratusan juta penduduk seperti kita. Baik di dalam negara maju maupun berkembang, pemilu menjadi sarana terbaik untuk memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai. Dalam pemilu yang akan dilaksanakan sudah pasti memerlukan sebuah partisipasi dan peran aktif dari masyarakat.

Berikutnya, peran masyarakat dalam politik siber menjadi penting karena penulis berpendapat, pendidikan politik siber adalah kunci menjaga demokrasi bersih dari segala hal-hal yang negatif dan hoaks. Ranah yang berwarna abu-abu ini harus dipenuhi oleh netizen yang cerdas sehingga jika muncul konten negatif atau hoaks, kontra-isunya langsung muncul untuk menanggapi konten-konten tersebut. Pemerintah di negara-negara demokratis harus bekerja berdasarkan parameter kebebasan berbicara untuk membangun daya tahan dan penangkalan (Aji & Indrawan, 2019).

Membangun sebuah komunitas masyarakat yang sehat digital, yang dapat dengan cepat merespons ancaman terhadap demokrasi siber yang muncul, adalah hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Tidak seperti negara-negara otoriter yang mengandalkan pada solusi *top-down*, demokrasi memiliki keunggulan untuk melahirkan solusi langsung dari akar rumput untuk menangani masalah yang ada dalam politik siber. Solusi tidak harus datang dari pusat atau diarahkan dari sebuah regulasi yang kuat atau memaksa. Masyarakat, atau katakanlah *civil society*, dapat memanfaatkan pendidikan politik siber untuk membangun sebuah kontranarasi yang positif, termasuk memberikan penyadaran-penyadaran digital kepada masyarakat agar memahami politik siber, dengan demikian juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ranah tersebut (Aji & Indrawan, 2019).

Politik digital dalam kaitannya dengan peningkatan jumlah partisipasi juga disebabkan makin maraknya bentuk media sosial. Dalam partai politik juga telah memiliki beberapa bentuk media sosial seperti akun *facebook*, *Twitter* dan *YouTube*. Sekalipun penggunaannya memang belum merata seluruh partai politik, tetapi paling tidak semua partai politik di Indonesia saat ini sudah memiliki akun media sosial (Anshari, 2013).

Hal ini sesuai dengan teori *Cyberpolitics*, karena berkaitan dengan interaksi manusia (politik) yang meliputi kegiatan-kegiatan, seperti siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, yang dimungkinkan untuk terjadi melalui ranah ruang siber sebagai sebuah arena baru pertarungan dengan pengandaian dan realitanya sendiri. Meskipun ada perbedaan dalam perspektif di seluruh dunia, namun tetap terdapat pemahaman ilmiah umum tentang arti “politik”. Kompleksitas yang muncul terkait awalan “*cyber*” itulah yang membedakan semantik yang baru dibangun ini. Artinya, penggunaan media sosial untuk kepentingan politik sesuai dengan realita baru kegiatan-kegiatan politik yang terjadi di ranah siber.

Kemudian, masyarakat dapat memainkan empat peranan penting dalam politik siber. Pertama, mereka dapat memainkan peran sebagai anjing penjaga (*watchdog*), yang mengawasi media sosial, termasuk hoaks atau kampanye hitam yang muncul. Kedua, masyarakat dapat membantu memberikan informasi kepada warganet melalui program-program literasi media. Ketiga, masyarakat dapat menekan perusahaan, bisnis, atau platform media sosial, yang sadar atau tidak, bertanggung jawab menampilkan atau menyebarkan

konten yang menyesatkan. Keempat, masyarakat dapat bekerja sama dengan semua *stakeholder* di bidang politik siber untuk menciptakan kondisi yang kondusif, serta memperbaiki ranah siber dari kondisi-kondisi ketidakpercayaan, polarisasi, sampai penyebaran hoaks dan kampanye hitam. Mencari satu suara yang sama terkait iklim demokrasi siber yang sehat juga dilakukan agar ancaman otoritarianisme tidak lagi muncul di era demokrasi siber yang berkembang sangat masif ini (Schafer, 2018).

Peran masyarakat dalam politik siber pun saat ini makin gencar dilakukan. Dalam hal ini, penulis ingin khusus mengamati kalangan masyarakat dari generasi milenial (usia di bawah 29 tahun). Sekalipun harus diakui generasi milenial saat ini masih sedikit sekali yang tertarik isu-isu politik. Sebuah fakta yang dipotret dari penelitian CSIS, bahwa hanya 2.3% generasi milenial yang tertarik untuk membahas isu-isu politik. Olahraga dan musik menjadi dua hal yang paling menarik perhatian generasi milenial. Namun, di penelitian yang sama, lebih dari 80% generasi milenial percaya bahwa pemerintah akan mampu membawa kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan. Bahkan, tingkat optimisme mereka terhadap masa depan mencapai 94.8% (Aji & Indrawan, 2019).

Sebuah fakta yang miris sebenarnya, akan tetapi dari sisi penulis, justru membangkitkan tantangan tersendiri bagi aktivitas politik dalam ruang siber, mengapa? Karena di penelitian yang sama, CSIS juga menanyakan penetrasi generasi milenial terhadap sumber informasi, di mana 54.3% milenial mendapat informasi dari media daring. Kemudian, tingkat pemilikan akun media sosial pun tinggi, mencapai di atas 80% (Facebook yang tertinggi).

Apa artinya, penulis melihat bahwa ini adalah kesempatan besar untuk mengenalkan politik kepada generasi milenial. Mereka sangat rutin untuk mengakses dunia maya setiap harinya. Hanya saja mereka belum tertarik untuk “meng-klik” berita-berita politik. Kesadaran mereka berpolitik harus ditingkatkan dengan memperbanyak ekspose mereka terhadap konten-konten politik di ruang siber, karena sebenarnya, banyak generasi milenial yang tertarik dunia politik, hanya mereka “*kudate*”, alias kurang *update*, terkait hal tersebut.

Selanjutnya, dalam sebuah pemilihan umum ada sebuah bentuk perayaan yang mana sebagai ajang kontestasi dan juga dapat digunakan sebagai ajang penyampaian visi dan misi dari setiap calon yang akan dipilih. Aktivitas tersebut sering kali terdengar dengan sebutan kampanye politik, yang digunakan sebagai sebuah bentuk promosi kandidat pada saat ada acara pemilihan umum. Kampanye ini menurut penulis saat ini sudah banyak menggunakan media digital.

Kampanye merupakan sebuah bentuk atas persiapan untuk melakukan sebuah pertandingan politik dimana para kandidat berlomba-lomba untuk menarik perhatian masyarakat untuk memilih dirinya atau partai politiknya. Hal seperti ini terjadi karena semakin banyak suara yang didapatkan maka pemenang akan mendapatkan sebuah kewenangan dan juga kewajiban untuk menduduki kursi kekuasaan dalam bentuk sebuah pemerintahan (Fatimah, 2018).

Kemudian, kampanye menurut Sayuti (2014), adalah sebuah bentuk usaha terorganisasi yang berusaha untuk mempengaruhi sebuah proses-proses pembuatan keputusan di dalam kelompok spesifik. Kampanye juga merupakan salah satu bentuk yang digunakan untuk berkomunikasi politik yang disampaikan oleh aktor kepada pendengar.

Bentuk-bentuk kampanye saat ini memiliki dua bentuk, yaitu secara dalam jaringan dan luar jaringan seperti kegiatan tatap muka antara calon kandidat dengan masyarakat sebagai pemilih dalam kegiatan demokrasi. Kampanye Politik biasanya dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dan rapat-rapat umum yang berisi berbagai pidato, pembicaraan, penyampaian slogan-slogan atau dalam bentuk penyebaran barang-barang cetakan, rekaman

yang berisi sebuah bentuk ajakan, bujukan, gambar dan juga bisa berupa simbol-simbol khusus dalam kelompok politik tersebut (Efriza & Indrawan, 2018).

Selain dilaksanakan secara tatap muka, kampanye juga bisa dijalankan dalam bentuk daring (dalam jaringan). Menurut tulisan yang dikemukakan oleh Efriza dan Indrawan (2018), menjelaskan terkait bentuk kampanye yang dilaksanakan secara daring, sebab semakin tingginya perkembangan teknologi dan informasi membuat semuanya dapat terasa lebih mudah dan lebih efisien. Bentuk kampanye di era politik digital dapat dilaksanakan menggunakan media internet. Bentuk kampanyenya dapat berupa sebuah ajakan yang disampaikan di dalam blog atau tulisan elektronik, lalu bisa juga menggunakan situs seperti situs resmi dari partai politik dan lainnya, selain itu juga kampanye secara daring juga dapat memanfaatkan kecanggihan dari media sosial, seperti media *facebook*, *twitter*, *Instagram*. Bentuk pengemasan informasi secara daring juga dapat tertata dengan rapih sebab kemajuan teknologi dan kecepatan akses sebuah informasi seperti hal nya bentuk informasi ajakan untuk mendukung organisasi atau individu tertentu sesuai dengan pilhan yang didapatkan dengan hati nurani tiap individu.

Keuntungan yang diperoleh dari adanya kampanye daring yaitu, melakukan kampanye daring dapat menghemat pengeluaran dana yang biasanya dibutuhkan untuk kampanye tatap muka yang membutuhkan dana lebih besar, namun dengan melaksanakan kampanye daring para kandidat dapat menghemat pendanaan yang digunakan pada saat pelaksanaan kampanye tatap muka (Farisa, 2020). Dengan kampanye daring juga tidak adanya keterbatasan dalam hal jumlah yang akan ikut dalam pelaksanaan kampanye partai politik dan individu perorangan, sebab internet dapat membuat ruangan komunikasi politik menjadi lebih luas. Jika menggunakan metode kampanye daring, masyarakat bisa mengikuti kegiatan kampanye tersebut tanpa harus kepanasan dan menimbulkan kerumunan yang begitu besar, apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini. Tentunya hal ini dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat di era politik siber dewasa ini.

Kekurangan kampanye daring terjadi apabila masih ada daerah pemilihan yang masih sulit terkoneksi dalam jaringan internet. Kondisi demikian merupakan poin penting sebab internet adalah hal yang penting dalam kegiatan kampanye yang dilaksanakan secara daring. Penyelenggaraan suatu pemilihan umum dapat terlaksana dengan baik dan sukses jika layanan internet berfungsi memadai dan dapat diakses di seluruh tempat pemilihan.

Peningkatan partisipasi politik diartikan bahwa negara harus memiliki bentuk pemerintahan yang bersifat demokratis yang mana harus bekerja berdasarkan parameter kebebasan berbicara (Aji & Indrawan, 2019). Peran masyarakat dalam demokrasi yang saat ini bersifat siber juga penting, sebab kalangan masyarakat saat ini ada sebuah generasi yang dikenal dengan generasi milenial yang mana ketertarikannya pada isu-isu politik masih terbilang rendah dan yang berminat hanya sekitar 2.3%. Akan tetapi bentuk partisipasi politik terhadap pemerintah yang dianggap dapat membawa kesejahteraan percaya hingga kisaran 80% dengan optimisme 94.8% terhadap masa depan (Aji & Indrawan, 2019).

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di era siber mengalami peningkatan, khususnya melalui sarana-sarana daring. Sarana-sarana tersebut, adalah peningkatan kampanye daring yang banyak dilakukan melalui media sosial. Akses media sosial yang luas dan mudah membuat kampanye jenis ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya partisipasi politik masyarakat di era politik siber. Temuan penulis ini berhubungan erat dengan teori *Cyberpolitics* yang mensyaratkan adanya aktivitas-aktivitas politik yang dilakukan melalui ranah siber.

Terakhir, sebagai penutup, politik siber memang bukan wacana baru dalam diskusi publik. Kebaruan (*novelty*) dalam diskusi tersebut adalah pembahasan tentang peluang dan risikonya bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam arti luas, kontribusi politik siber berupa peningkatan kesadaran politik warga negara, penguatan otonomi diri dalam pengambilan keputusan politik, dan pematangan etika sosial untuk kehidupan

multikultural, sehingga meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dalam arti khusus, politik siber meningkatkan interaksi antara masyarakat dan negara, antara warga negara dan perwakilan politiknya, atau antara kelompok kepentingan dan komunitas pembuat kebijakan di tingkat pemerintahan.

SIMPULAN

Perkembangan dunia siber sudah sangat marak dewasa ini. Hal ini diawali dengan adanya internet yang merupakan suatu inovasi teknologi yang menyebabkan manusia lebih mudah untuk berinteraksi dalam arus komunikasi dan informasi dengan akses yang lebih cepat dan memiliki daya jangkauan luas. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi oleh masyarakat menyebabkan terciptanya ruang baru untuk saling berinteraksi yang disebut dengan *cyberspace* (ruang siber).

Politik siber berhubungan erat dengan bentuk kegiatan-kegiatan politik, seperti partisipasi politik, pendidikan politik, kampanye politik, implementasi demokrasi, komunikasi politik, kampanye politik, keamanan dan pertahanan sebuah negara. Selain itu, politik siber berkaitan juga dengan sosial, budaya, dan juga masyarakat. Kajian politik siber sangat diperlukan dalam perkembangannya di mana aktivitas politik masyarakat sudah mulai beralih dari yang sifatnya konvensional bergeser dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam ruang siber. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat yang diharapkan semakin meningkat.

Masyarakat dapat memainkan empat peranan penting dalam politik siber. Pertama, mereka dapat memainkan peran sebagai anjing penjaga (*watchdog*), yang mengawasi media sosial, termasuk hoaks atau kampanye hitam yang muncul. Kedua, masyarakat dapat membantu memberikan informasi kepada warganet melalui program-program literasi media. Ketiga, masyarakat dapat menekan perusahaan, bisnis, atau platform media sosial, yang sadar atau tidak, bertanggung jawab menampilkan atau menyebarluaskan konten yang menyesatkan. Keempat, masyarakat dapat bekerja sama dengan semua *stakeholder* di bidang politik siber untuk menciptakan kondisi yang kondusif, serta memperbaiki ranah siber dari kondisi-kondisi ketidakpercayaan, polarisasi, sampai penyebaran hoaks dan kampanye hitam.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di era siber mengalami peningkatan, khususnya melalui sarana-sarana daring. Sarana-sarana tersebut, adalah peningkatan kampanye daring yang banyak dilakukan melalui media sosial. Akses media sosial yang luas dan mudah membuat kampanye jenis ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya partisipasi politik masyarakat di era politik siber. Temuan penulis ini berhubungan erat dengan teori *Cyberpolitics* yang mensyaratkan adanya aktivitas-aktivitas politik yang dilakukan melalui ranah siber.

Politik siber memang bukan wacana baru dalam diskusi publik. Kontribusi politik siber berupa peningkatan kesadaran politik warga negara, penguatan otonomi diri dalam pengambilan keputusan politik, dan pematangan etika sosial untuk kehidupan multikultural, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam arti khusus, politik siber meningkatkan interaksi antara masyarakat dan negara, sehingga berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat secara umum.

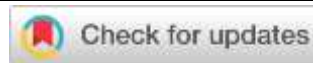
UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada UPN Veteran Jakarta atas insentif publikasi karya ilmiah melalui Surat Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 518/UN61.0/HK.2/2021 tentang Ketentuan dan Mekanisme untuk Mendapatkan Insentif bagi Dosen di Lingkungan UPN Veteran Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, P. M., & Indrawan, J. (2019). *Cyberpolitics: Perspektif Baru Memahami Politik Era Siber*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Anshari, A. (2013). Komunikasi Politik di Era Media Sosial. *Jurnal Komunikasi* 8(1), 91-101.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.
- Choucri, N. (2012). *Cyberpolitics in International Relations*. Cambridge: MIT Press.
- Efriza., & Indrawan, J. (2018). *Komunikasi Politik Pemahaman secara Teoretis dan Empiris*. Malang: Intrans Publishing.
- Farisa, F. C. (2020, Juni 19). Menurut Bawaslu Ini Kelebihan Dan Kekurangan Kampanye Daring. *kompas.com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/19/17352881/menurut-bawaslu-ini-kelebihan-dan-kekurangan-kampanye-daring?page=all> (23 Januari 2021).
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5-16. <https://doi.org/10.2489/resolusi.v1i1.154>
- Hasfi, N. (2019). Komunikasi Politik di Era Digital. *Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), 93-111. <https://doi.org/10.14710/politika.10.1.2019.93-111>
- Herdyanto, A. (2019, Juli 31). Ini 6 Fakta Sejarah Awal Mula Internet di Dunia, Nyawanya Era Digital. *idntimes.com*. <https://www.idntimes.com/tech/trend/abraham-herdyanto/sejarah-awal-mula-internet/1> (21 Januari 2021).
- Huda, N. 2004. *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Pilihan atas Federalisme atau Negara Kesatuan*. Yogyakarta: UII Press.
- Indrawan, J. (2019). Cyberpolitics sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber. *Jurnal Politica*, 10(1), 1-15. [10.22212/jp.v10i1.1315](https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1315)
- Kominfo. (2020). *Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital*. Online. https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker 23 Januari 2021.
- Mardatila, A. (2020, September 18). E-Commerce adalah Pembelian dan Penjualan secara Elektronik, Berikut Selengkapnya. *merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/sumut/e-commerce-adalah-pembelian-dan-penjualan-secara-elektronik-berikut-selengkapnya-kln.html> (21 Januari 2021).
- Moelong, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nawawi, H. (1997). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1-11. <http://skpp.jatim.bawaslu.go.id/images/cart/RI/JURNAL/JURNAL%20MENGAPA%20INTEGRITAS%20ITU%20PENTING.pdf>
- Saputra, B. (2020, September). *Infografis Pengguna Internet Indonesia 2020*. validnews.com. <https://www.validnews.id/Infografis-Pengguna-Internet-Indonesia-2020-4k> (21 Januari 2021).
- Sayuti, S. D. 2014. *Komunikasi Pemasaran Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Schafer, B. (2018). *A Democratic Response to Digital Disinformation: The Role of Civil Society*, dalam AICGS Policy Report: Moving Beyond Cyber Wars: A Transatlantic Dialogue. Washington: American Institute for Contemporary German Studies John Hopkins University & Hanns Seidel Stiftung.
- Situmorang, R, J. (2012). Pemanfaatan Internet Sebagai New Media dalam Bidang Politik, Bisnis, Pendidikan Dan Sosial Budaya. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1), 73-87. <https://doi.org/10.26593/jab.v8i1.418.%25p>
- Wahyudi, V. (2018). Politik Digital Di Era Revolusi Industri 4.0 Marketing & Komunikasi Politik. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(2), 149-168. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i2.819>



Penggunaan Media Sosial Instagram dalam Membangun Citra Positif Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019

Dina Fadiyah^{1*}, Jimmy Simorangkir²

¹Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1045 Jakarta, 14350, Jakarta-Indonesia

²Jurusan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1045 Jakarta, 14350, Jakarta-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Mei 20, 2021

Diterima: Jul 17, 2021

Dipublikasi: Jul 31, 2021

Kata Kunci:

Instagram; Kampanye;
Media Sosial; Pilpres;
Presiden;

Koresponden:

Dina Fadiyah

Jurusan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945
Jakarta, 14350, Jakarta-
Indonesia

Email:

dinafadiyah14@hotmail.com

Sitasi Cantuman:

Dina, F., & Simorangkir, J. (2021). Penggunaan Media Sosial Instagram dalam Membangun Citra Positif Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. *Journal of Political Issues*, 3(1); 13-27. <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i1.48>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v3i1.48>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract Social media can be used as a means to gain and maintain fame, namely by presenting a positive image easily and quickly. One of them is Instagram. This study discusses this and specifically aims to research and describe the existence of using Instagram to build a positive image of President Joko Widodo in the 2019 Presidential Election. This research uses a qualitative approach and the results are described descriptively. The focus of this research is to analyze uploads and observe post Widodo's viewpoint during the campaign period 2018 17 April 2019. Data were collected by interviewing resource persons and also by using documentation techniques. The results of this study indicate that the use of Instagram social media can build a positive image of Joko Widodo as evidenced through his Instagram account by building an impression in front of the audience which includes uploading portraits of his success as a head in the country, among other things, building an idiosyncratic infrastructure as a variety of Indonesian idioms, ideals have as many like on every posting. In addition, there appears to be consistency in building Jokowi's image during the campaign period. This is also supported by Joko Widodo's attitude who is very open-minded and appears offensive in using his personal Instagram for political campaigns. Joko Widodo's use of Instagram in the 2019 presidential election campaign ran easily and effectively in achieving the goal of winning the 2019 presidential election.

Abstrak Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk meraih dan menjaga ketenaran, yaitu dengan menampilkan citra positif secara mudah dan cepat. Salah satunya adalah Instagram. Penelitian ini membahas hal tersebut dan secara lebih spesifik bertujuan untuk meneliti dan menjabarkan eksistensi penggunaan Instagram guna membangun citra positif Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan hasilnya diuraikan secara deskriptif. Fokus penelitian ini adalah menganalisa unggahan dan mengamati postingan Instagram milik Joko Widodo pada masa kampanye hingga pemilihan presiden RI pada 1 Oktober 2018 hingga 17 April 2019. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara terhadap nara sumber dan juga dengan menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial Instagram dapat membangun citra positif Joko Widodo dibuktikan melalui akun instagram miliknya dengan membangun kesan di hadapan masyarakat meliputi imengunggah foto-foto keberhasilannya sebagai presiden, misalnya seperti membangun infrastruktur di berbagai tempat di Indonesia, dan mempunyai banyak like pada setiap postingannya. Selain itu tampak adanya konsistensi dalam membangun citra Jokowi selama masa kampanye. Hal tersebut juga didukung sikap Joko Widodo yang sangat terbuka dan tampil ofensif dalam memanfaatkan Instagram pribadinya untuk kampanye politik. Penggunaan Instagram oleh Joko Widodo dalam kampanye Pilpres 2019 berjalan dengan mudah dan efektif dalam mencapai tujuan kemenangan pemilihan presiden 2019.

Tentang:

Dina Fadiyah, menyelesaikan studi S2 Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Jimmy Simorangkir, merupakan mahasiswa di Jurusan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

PENDAHULUAN

Sosial media merupakan media baru yang memiliki situs yang bisa membuat akun profile sebagai representasi diri kita dan berinteraksi dengan orang lain dan sekaligus media sosial memungkinkan kita berinteraksi dengan banyak orang yang berbeda letak geografisnya namun seperti berada dalam satu lokasi (Dewi & Janitra, 2018). Kemampuan media sosial yang dilirik semua kalangan ini, kemudian dihadirkan salah satu sarana dalam meraih dan menjaga ketenaran pada suatu pihak dengan aktif berperan dalam media sosial tujuannya untuk menunjukkan citra positif dengan mudah dan cepat (Kertamukti, 2015). Media Sosial Instagram yang lebih digunakan sebagai media personal branding dan pembentukan citra positif seseorang dibandingkan untuk berinteraksi dengan orang lain menjadikannya sebagai fenomena baru dimana penggunaan jejaring sosial Instagram tidak lagi dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan berbagi karya visual, tetapi lebih mengarah kepada pemanfaatan Instagram sebagai media personal branding yang efektif (Ramadhan, 2019).

Citra diri di dalam media sosial dapat terbentuk ketika kita mengunggah sebuah foto mengenai diri kita di halaman Instagram kita. Instagram adalah bagian dari komunikasi visual yang dapat membangun citra seseorang. Citra merupakan hasil evaluasi dalam diri seseorang berdasarkan persepsi dan pemahaman terhadap gambaran yang telah diolah, diorganisasikan, dan disimpan dalam benak seseorang (Efendi, 2017). Dari penjelasan di atas mengenai citra, dapat berjalan stabil dari waktu ke waktu atau sebaliknya bisa berubah dinamis, diperkaya oleh jutaan pengalaman dan berbagai jalan pikiran asosiatif. Dalam media sosial yang digunakan oleh Joko Widodo, Instagram dengan nama akun @Jokowi yang telah terverifikasi menjadi media sosial dengan pengikut terbanyak, dimana hal tersebut sejalan dengan fakta yang menerangkan bahwa Instagram merupakan aplikasi media sosial yang paling lama diakses oleh penggunaanya dibanding dengan media sosial lainnya (Kertamukti, 2015).

Umumnya kampanye dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, stiker, dan sebagainya. Namun Jokowi memanfaatkan media sosial, sebagai ‘senjata’ yang saat itu jarang digunakan para calon politik. Sehingga tidak dapat dipungkiri salah satu kekuatan Jokowi dalam berkampanye adalah media sosial. Tak hanya selama masa pemilu, sepanjang masa kepemimpinannya sebagai Presiden RI, Jokowi membuat gebrakan baru dengan memanfaatkan media sosial Instagram sebagai wadah bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Masyarakat berusaha untuk mencari informasi tentang aktivitas kampanye Pilpres 2019 yang dilakukan oleh Jokowi sebagai calon presiden.

Strategi kampanye berbeda yang dilakukan Jokowi tidak hanya pada model face to face communication atau komunikasi tatap muka yang dilakukan, tapi juga penggunaan media kampanye yang dipilih. Media sosial mempunyai peranan untuk Jokowi berkomunikasi dengan publiknya selama masa kampanye berlangsung untuk menyampaikan pesan-pesan politis. Dari sekian media sosial yang digunakan, Instagram yang merupakan satu media yang dijalankan personal oleh Jokowi, hal ini ditunjukkan pula oleh aktivitas Instagram Jokowi yang sangat aktif pada masa kampanye dibandingkan pada masa lainnya. Dibandingkan dengan politisi lainnya di Indonesia, dalam melakukan political branding Jokowi mempunyai urgensi lebih dilihat dari dimensi waktu dimana ia membangun political branding tersebut yakni pada masa kampanye guna mendapatkan vote rakyat. Dalam (Sandra, 2013) dikatakan bahwa partai politik mengukur kesuksesan mereka bukan dalam konsep keuntungan, namun jumlah voting serta kekuasaan yang didapat. Dengan berfokus pada pesan yang disampaikan lewat Instagram akun personal Jokowi, dimana pada akun ini secara personal Jokowi bisa melakukan political branding dengan berfokus pada branding dirinya sendiri.

Penelitian tentang pencitraan seringkali banyak menganalisa pada segi dampak yang dihasilkan. Novelty penelitian ini adalah akan membahas lebih dalam tentang isi konten dari

Instagram yang dihasilkan oleh Joko Widodo selama kampanye Pilpres 2019 sebagai upaya membangun citra merek. Dimana dalam membangun citra di media sosial sangat besar peluangnya, terutama dalam masa kampanye Pilpres. Instagram sebagai media isosial yang digunakan untuk berkampanye menjadi rujukan resmi masyarakat dalam memantau aktivitas kampanye yang dilakukan capres dan cawapres. Serta akun Instagram Joko Widodo sudah lama dibuat dan memiliki jutaan followers. Sehingga sangat mudah untuk melakukan manajemen kesan melalui akun Instagram pribadi miliknya. Sehingga dengan mudahnya meraup puluhan ribu likes, hal ini akan mendorong pembentukan citra diri yang positif menjelang pilpres 2019 (Ma'aruf, & Putra 2019). Selain hal yang peneliti paparkan tadi, alasan lain adalah berkaitan dengan kampanye politik yang diantaranya membahas tentang penyampaian pesan atau ide seseorang kepada orang lain, membahas kontak sosial yang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi, dan membahas tentang teknologi media serta peneliti mampu melihat bagaimana respon masyarakat tentang eksistensi penggunaan media sosial instagram dalam membangun citra positif presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjabarkan mengenai Eksistensi Penggunaan Media Sosial Instagram Dalam Membangun Citra Positif Presiden Joko Widodo Pada Pilpres 2019. Hal tersebut sebagai usaha untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Penggunaan Media Sosial Instagram Dalam Membangun Citra Positif Presiden Joko Widodo Pada Pilpres 2019, dan Bagaimana proses interaksi komunikasi yang terjadi pada media sosial instagram dalam memenangkan Pilpres 2019.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa metode analisis wacana. Metode analisis wacana adalah metode analisis yang melihat aspek kebahasaan sebagai faktor penting untuk melihat apa yang sedang terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Analisis wacana dalam penelitian ini dengan cara menginterpretasi atau menafsirkan teks-teks yang ada, dimana analisis yang terbentuk nantinya kita dipengaruhi dari berbagai faktor, dapat dikatakan bahwa di balik wacana itu terdapat makna dan citra yang diinginkan serta kepentingan yang sedang diperjuangkan (Uchjana, 2003; Satori & Komariah, 2009)

Data yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data primer, peneliti menggunakan teknik wawancara (in depth interview) dengan key informan dan beberapa informan. Dan data sekunder berupa data dari dokumen atau literature-literatur yang mendukung data primer dikumpulkan dari buku-buku, yang sesuai dengan penelitian, artikel, kamus, internet dan lain sebagainya, yang membahas tentang penggunaan media sosial instagram dalam membangun citra positif presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Data yang diperoleh melalui wawancara selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dideskriptifkan secara menyeluruh. Kemudian untuk analisis wacana, yang mana dalam wawancara berupa teks berita akan dibahas satu persatu. Berdasarkan metode analisis wacana (Fairclough, 2012) analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini mencakup analisis teks, analisis praktik wacana, dan analisis praktik sosial budaya. Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang didapatkan dalam penelitian ini, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti, yaitu perpanjangan masa pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan melakukan triangulasi data (Bungin, 2009)

LANDASAN TEORITIK**Kampanye Politik**

Kampanye Politik adalah serentak mengadakan gerakan bisik gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin kampanye. Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat ([Saputro & Haryadi 2018](#)). Pengertian kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

Kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu ([Ardha, 2014](#); [Firmazah, 2007](#)). Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi. Jadi pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan. Bahkan dalam beberapa waktu sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasi yang telah disepakati bersama ([Lees-Marshment, 2001](#)).

Media Sosial

Perkembangan dunia teknologi yang semakin pesat membuat banyak berbagai macam media komunikasi yang membantu mempercepat proses komunikasi dan penyampaian informasi. Dengan menggunakan jaringan internet untuk mengakses kesalah satu situs website, maka setiap orang dapat mengakses informasi dan berita kapanpun dan dimanapun. Internet tidak hanya menyediakan data teks dan gambar, tetapi juga menyediakan data audio dan visual. Kata media di sosial media datang dari medium, atau wadah dimana orang dapat saling berhubungan dan menjalin interaksi sosial. Jadi, sosial media bukan mainstream media layaknya koran, majalah atau televisi.

Sebenarnya sejak zaman dahulu, bahkan era sebelum masehi media sosial sudah ada. Hanya saja, kala itu media sosial mengambil bentuk yang lebih sederhana ([Aditya 2013](#)). Pada komputer dan internet, di dalamnya terdapat portal, website (site web), radio online, facebook, twitter, youtube dan masih banyak lagi. Kini, media sosial telah menjadi sangat digital dan mampu mengubah biaya komunikasi yang mahal menjadi terjangkau. Sosial media telah memungkinkan satu manusia berhubungan dengan manusia lain, tanpa batasan ruang dan waktu. Di era digital, sebuah hubungan sosial dapat terjalin dengan sedemikian mudahnya seperti orang pendiam mendadak bisa memiliki hubungan pertemanan dengan orang lain yang jumlahnya banyak.

Seperti yang dikatakan oleh Marshall Mc Luhan bahwa, media adalah perluasan dari eksistensi manusia karena disebut sebagai the extension of man, maka dengan sendirinya media dapat dipandang sebagai perluasan dari kepentingan dan kebutuhan manusia. Dalam lingkup itu manusia mengembangkan diri melalui berbagai cara untuk menentukan tingkat peradaban. Semua fase peradaban memberikan ciri terhadap teknologi yang dihasilkan dan digunakan, dan pada akhirnya media merupakan sistem tentang *know-how* yang mengarahkan pengetahuan dan mengenalkan seperangkat aturan dan kesempatan baru ([Aditya 2013](#)).

Instagram

Instagram adalah aplikasi yang dapat di gunakan dalam iOS, Android dan Windows

memudahkan pengguna untuk mengambil foto atau video, mengedit dan mengunggah ke halaman utama Instagram maupun jejaring sosial lainnya (Ramadhan, 2019). Kemudahan dan kecepatannya dalam berbagi foto maupun video menjadi hal yang disukai pengguna, ditambah dengan beberapa filter bergaya retro memberikan cara baru untuk melakukan interaksi melalui foto dan video (Ma'ruf & Putra 2019).

Pengguna Instagram tidak hanya dapat menerima konten yang disajikan tetapi juga dapat menyukai konten tersebut jika sesuai dengan kemauannya dan memberikan komentar serta mengkritisi konten yang didapatkan. Salah satu keunggulan Instagram adalah hasil foto dan video dapat di share ke media sosial lain diantaranya Facebook dan Twitter sehingga konten penyebarannya sangat luas tidak hanya antar pengguna Instagram saja. Instagram sangat cocok untuk kegiatan promosi, personal branding, dan pencitraan karena konten yang dihasilkan dapat berupa visual maupun audio visual sehingga dapat dipahami secara jelas dan gamblang agar pengikutnya menjadi lebih ingin tahu informasi lebih lanjut (Fauzia & Ihsan 2019).

Menurut riset Nielsen Januari 2019 April 2019 menunjukkan tingkat pertumbuhan pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu 1,5 jam sehari untuk berinternet. Menurut hasil riset Cuponation jumlah pengguna Instagram di Indonesia mencapai 56 juta penduduk atau 20,97% dari total populasi di Tanah Air (Cindy & Sari 2019). Dalam kehidupan sehari-hari, pengungkapan diri atau citra diri seseorang yang berlangsung tidak hanya dalam komunikasi dan interaksi antar manusia, tetapi dapat juga terjadi melalui media perantara, yaitu melalui media sosial. Citra diri seseorang dapat melalui media sosial ini sering terjadi dalam bentuk status, foto/video, komentar dan lain-lainnya terkait dengan kejadian yang sedang dialami maupun perasaan yang dimiliki yang dapat dibagikan oleh para pengguna media sosial lainnya. Media sosial juga banyak digunakan untuk mengekspresikan perasaan seseorang yang sedang dialami, hal ini merupakan salah satu bentuk citra diri seseorang. Seperti salah satunya Instagram milik Presiden Jokowi yang mendapatkan Jumlah Followers 36 M per-tanggal 9 Oktober 2020.

Political Branding

Sejak munculnya konsensus diantara partai politik, diferensiasi selama masa kampanye sekarang berdasarkan citra dan personalitas pemimpin. Citra dan personalitas pemimpin dapat dibantu dibentuk oleh proses *branding*, selain itu branding bahkan bisa membantu kandidat untuk mengubah dan memelihara reputasi serta dukungan (Lees-Marshment, 2009). Branding adalah satu bentuk baru dalam marketing politik dalam representasi psikologikal sebuah produk/organisasi yang lebih mengarah pada simbol dibandingkan kegunaan nilai tangible (Scammell, 2007). Ide dari branding sendiri lebih dari sebuah teori yang bisa diaplikasikan ke kota, negara bahkan politisi dengan memberikan mereka identitas publik.

Political branding adalah cara strategis dari consumer branding untuk membangun cita politik. Menurut Scammell berpendapat bahwa brand yang baik untuk nama perusahaan, kandidat atau produk adalah sama sangat pentingnya karena permintaan konsumen menjadi meningkat dan bisa dengan mudah menjalin relasi dengan taktik moderen untuk memperlakukan kandidat politik sama seperti produk. Dalam tahap dasar, branding politisi dibentuk dari pengertian masyarakat secara subjektif terhadap politisi (Scammell, 2007). Tidak hanya elemen personal kandidat, tapi juga elemen kandidat berupa penampilan seperti gaya rambut, pakaian memberi dampak jelas untuk citra kandidat. Pentingnya branding politik sering disimpulkan dengan argumen-argumen sebagai berikut: branding memasukan sisi emosional, memberikan tanda yang membuat pemilih bisa memilih kandidat dengan lebih mudah. Dengan komunikasi yang lebih interaktif dan membangun, branding bisa mempunyai potensi untuk membangun hubungan dengan masyarakat yang sebelumnya sudah tidak tertarik politik.

Kategori political branding menurut (Sandra, 2013) terdiri dari personalitas yang meliputi hubungan, orisinalitas, tanggap teknologi, dan nilai personal, kemudian penampilan yang meliputi pakaian, gaya rambut dan gestur tangan, serta pesan Kunci Politik yang terdiri dari harapan, dukungan publik, laporan aktivitas, dan nilai/ideologi politik.

Pencitraan

Kotler mengemukakan teorinya yang menjelaskan bahwa citra perusahaan adalah respon konsumen pada keseluruhan penawaran yang diberikan perusahaan dan didefinisikan sebagai sejumlah kepercayaan, ide-ide, dan kesan masyarakat pada suatu organisasi (Armstrong, et.al 2014). Citra merupakan kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan atau organisasi, kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu obyek, orang, atau organisasi (Simangunsong, 2004).

Strategi menjadi sangat penting bagi partai politik untuk memenangkan persaingan politik. Schroder menyebut strategi pencitraan sebagai target image (citra yang diinginkan). Setiap organisasi, setiap partai dan setiap kandidat memiliki citra tersendiri di lingkungan dimana ia bergerak. Citra tersebut merupakan gambaran yang ada dalam bayangan masyarakat atau para pemilih tentang organisasi, partai atau kandidat pada periode waktu tertentu. Terkadang gambaran ini masih kosong. Itu artinya, bahwa masyarakat atau pemilih belum mengenal organisasi atau kandidat tersebut sehingga mereka tidak bisa membuat gambaran tentang organisasi atau kandidat yang bersangkutan. Tetapi, di lain pihak, tentu saja, persepsi publik terhadap orang yang terkenal bisa saja tidak menguntungkan. Salah atau benar, elemen-elemen tertentu yang tidak menguntungkan kandidat bisa menjadi bagian yang merugikan aktivitas di masa depan (Schroder 2011).

HASIL PENELITIAN

Penggunaan Media Sosial Instagram dalam Membangun Citra Positif Presiden Joko Widodo Pada Pilpres 2019

Citra (image) merupakan bagian terpenting dalam memenangkan sebuah kompetisi, salah satunya dalam pemilihan presiden 2019. Penggunaan media social Instagram dapat membangun citra positif presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019. Media sosial merupakan ruang yang bebas bagi para kandidat untuk melakukan kampanye membangun sebuah citranya. Kondisi tersebut mengartikan bahwa lingkup media sosial adalah front stage atau panggung depan. Tiap elit politik yang memiliki media sosial dapat secara bebas mengunggah teks, foto, maupun video yang dianggap dapat meningkatkan dan atau mempertahankan citra mereka.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, mengenai citra (image) yang membekas dalam memori para informan dan kemampuan informan untuk mengidentifikasi atau mengenal suatu image, dengan kata lain bagaimana penggunaan media social instagram dalam membangun citra positif Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019 di mata masyarakat luas. Instagram sebagai sarana untuk manajemen citra diri mereka. Joko Widodo membangun kesan melalui akun instagram pribadinya @jokowi dengan baju putih yang dilipat pada tangannya menjadi sebuah identitas tersendiri. Hal tersebut dibuat untuk menekankan pada karya-karya atau kebiasaan beliau berbaur dengan masyarakat supaya sama-sama merakyat. Informasi yang membantu Joko Widodo untuk mengembangkan citra (image) yaitu berdasarkan interaksi dengan pengikut instagramnya. Citra tersebut dapat diketahui melalui wawancara terhadap *key informan* yang menjadi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.

“Saya bekerja sebagai anggota dewan Pengarah tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, dalam menjaring citra positif Joko Widodo melakukan kegiatan strategi

digital yaitu kampanye yang membangun citra positif Joko Widodo melalui Instagram berupa photo dan audio visual. Terlihat jelas di Instagram banyak orang berkata bahwa Jokowi adalah pemimpin yang baik, jujur dan sederhana”. (Wawancara tanggal 11 Desember 2020 Pukul 16.30 WIB di kediaman Bapak Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. Jl. H. Ambas No.18. Jakarta Selatan).

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. tersebut diketahui bahwa citra Joko Widodo semaksimal mungkin diupayakan memberi kesan terbaik guna meningkatkan citranya. Hal ini didukung dengan postingan dari Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M di akun Instagram pribadinya seperti terlihat pada:



Gambar 1 Sikap dan Tindakan Joko Widodo Saat Ijin Untuk Berpidato Kepada KH. Maruf Amin

Pernyataan Bapak Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M mengenai citra Joko Widodo dibenarkan juga oleh informan lainnya. “Melakukan posting di feed Instagram terkait dengan kampanye Joko Widodo dan mengikuti kampanye Konser Putih Bersatu sebagai bagian dari dukungan terhadap paslon untuk pilpres 2019. Membuktikan bahwa Joko Widodo adalah calon presiden yang mau berbaur dengan semua, merakyat dan untuk rakyat”. (Wawancara Addie Muljadi Sumaatmadja tanggal 13 Desember 2020 Pukul 13 Desember 2020 di Pondok Labu, Jakarta Selatan).



Gambar 2 Joko Widodo Bersalaman dengan Warganya

Terkait pembangunan citra diri capres di media social, Joko Widodo sangat memanfaatkan media sosial untuk membangun citranya. Seolah-olah Joko Widodo sosok capres yang dekat dengan masyarakat, salah satunya dengan mengunggah foto ketika beliau bersalaman dengan masyarakat secara langsung. Efeknya, masyarakat yang melihat

postingan tersebut memberikan persepsi positif terhadap personal branding Joko Widodo. Salah satu contoh potret Joko Widodo yang menggambarkan bahwa dirinya dekat dengan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 3.

Berdasarkan pengamatan dari gambar diatas akun Instagram @jokowi memiliki followers yang cukup banyak. Ketika mengunggah foto atau video, Joko Widodo mendapatkan ratusan ribu likes. Berdasarkan hal tersebut tentunya Joko Widodo lebih mudah dalam membangun citra dirinya melalui Instagram pribadinya. Joko Widodo sudah memiliki jutaan followers dan Instagram miliknya sudah lama dibuat. Informan lain mengatakan bahwa “selain mengikuti kampanye akbar bersama dengan semua pendukung, saya melakukan update di story Instagram saya tentang dukungan saya terhadap beliau, supaya semua orang semakin tergerak dengan paslon ini”. (Wawancara Chacha Frederica tanggal 20 Desember 2020 Pukul 13.00 WIB di Distric 8 SCBD, Jakarta Selatan). Sehingga akun instagram pribadi Joko Widodo dapat membangun citra positif. Upaya tersebut dilakukan agar membentuk citra yang diinginkan dan dapat bersaing dengan calon lainnya.

Media social instagram yang digunakan untuk membangun citra positif, maka Joko Widodo bersama dengan Tim Kampanye nya melakukan kampanye politik dengan tujuan menarik masyarakat untuk mendukungnya dan memilih Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019. Kampanye publik bahkan dianjurkan dilakukan setiap hari (daily campaign). Kampanye yang dilakukan sebagai cerminan dari kultur masyarakat Indonesia yang bersifat paguyuban, suka bergaul, mengobrol, dan satu sama lain. Political branding sebagai cara untuk membangun citra dimata masyarakat. Tidak hanya personal dari kandidat, tapi juga elemen kandidat berupa penampilan dan sikap yang memberikan dampak jelas untuk citra kandidat. Pentingnya kampanye politik memberikan tanda yang membuat pemilih bisa memilih kandidat dengan lebih mudah dan sesuai dengan pilihannya. Dengan komunikasi yang lebih interaktif dan membangun, citra positif mempunyai potensi untuk membangun hubungan dengan masyarakat yang semula tidak tertarik politik menjadi tertarik. Berikut beberapa pendapat mengenai kampanye yang dilakukan Joko Widodo menurut informan dan sumber instagram sebagai pendukung:

“Program yang saya ketahui beliau adalah orang yang merakyat, pastinya programnya juga berbaur dengan rakyat. Pasti banyak yang mendukung beliau”. (Wawancara Della pada tanggal 15 Desember 2020 Pukul 18.00 WIB di BSD City Cluster, Tangerang Selatan). Selanjutnya sependapat dengan informan lain. “Programnya masih sama seperti tahun sebelumnya beliau melakukan hal-hal sederhana dan turun ke jalan bersama rakyat”. (Wawancara Uswatun pada tanggal 20 Desember 2020 Pukul 16.00 WIB di Jakarta Selatan). Berdasarkan hasil wawancara dari informan, terlihat jelas bahwa persepsi positif Joko Widodo ada, dan tampak pada Gambar 4.



Gambar 3 Kampanye Joko Widodo Mengajak Semua Kalangan Untuk Hidup Lebih Baik

Di Indonesia, penggunaan media social untuk melakukan kampanye politik dapat dengan mudah dilakukan. Media sosial instagram sering digunakan untuk berkampanye sehingga secara tidak langsung dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memantau aktivitas capres dan cawapres. Dari beberapa gambar diatas menunjukkan bahwa peran aktif dari capres dan para pendukungnya memberikan pengaruh yang signifikan. Sebelumnya kampanye tersebut dilakukan melalui akun instagram pribadi Joko Widodo dalam bentuk post photo dan video, yang kemudian melakukan kampanye ke berbagai daerah dan ditutup dengan kampanye akbar dengan slogan Putihkan GBK. Dari setiap kampanye Joko Widodo selalu memposting aktivitasnya. Hal ini dilakukan agar semua orang dapat melihat kampanye, selain itu masyarakat yang tidak terjangkau dapat melihat euphoria dan pesan-pesan yang disampaikan dimanapun berada.

Kampanye yang dilakukan Joko Widodo dan timnya menuai banyak pujian, dimana untuk pertama kalinya kampanye terbesar yang pernah ada. Ini menjadi salah satu khas tersendiri yang berbeda dengan pasangan capres lain-nya. Sesuai dengan pendapat Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin. “Program yang diusung jokowi dalam kampanye sangatlah berbeda dengan paslon lainnya, dimana jokowi dengan mengusung blusukan bersama rakyat kalangan bawah baik petani, ojek online dan kalangan lainnya”. (Wawancara tanggal 11 Desember 2020 Pukul 16.30 WIB di kediaman Bapak Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. Jl. H. Ambas No.18. Jakarta Selatan).

Kedua pendapat tersebut baik dari informan dan key informan mengatakan bahwa kampanye politik menggunakan media sosial instagram sangat penting. Perkembangan teknologi media social dapat mengubah para capres untuk melakukan “pencitraan” pada diri mereka, Joko Widodo paling banyak memposting tentang peresmian dan perkembangan infrastruktur di negara Indonesia salah satunya saat kampanye di Kota Solo. Selain itu, Joko Widodo juga sering meng-upload video maupun gambar tentang kegiatan blusukan kampanye dan mengajak para petani, nelayan, guru, dan semua kalangan untuk tetap menjalani hidup yang lebih baik. Media sosial instagram sebagai sarana penyaluran komunikasi atau pesan dari Joko Widodo kepada masyarakat atau pendukungnya yang mudah diakses.

Hal di atas sesuai dengan pendapat wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa “Media social merupakan media komunikasi yang dengan mudah dapat mengakses semua lapisan, dimana Indonesia terdiri dari sabang sampai merauke yang semuanya tidak dapat dijangkau dengan mudah untuk melakukan kampanye, dengan adanya Instagram dapat menjadi alternative. Tentu saya akan merekomendasikan termasuk kepada followers saya di Instagram”. (Wawancara Chacha Frederica tanggal 20 Desember 2020 Pukul 13.00 WIB di Distric 8 SCBD, Jakarta Selatan). Adanya media social instagram dapat membantu

pencapaian yang mendukung upaya membangun citra positif Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Interaksi Komunikasi yang Terjadi pada Media Sosial *Instagram* dalam Memenangkan Pilpres 2019

Interaksi komunikasi pada pemilihan presiden 2019 yaitu menggunakan media social. Jenis media social yang digunakan adalah social networking, jenis ini merupakan yang paling populer di Indonesia seperti instagram. Media sosial sebagai media online, dimana para penggunanya dapat saling terhubung, berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten dari media yang digunakan secara bersama-sama, penggunaan media sosial dalam kampanye politik harus direncanakan sesuai dengan program-program yang telah disusun oleh tokoh politik maupun timnya untuk meningkatkan kredibilitas partai atau kredibilitas dari tokoh politik yang bersangkutan. Peluang ini mendorong hampir seluruh tokoh politik untuk membangun citra dirinya di media sosial, apalagi menjelang pemilihan presiden 2019.

Joko Widodo bukan hanya mengunggah foto dan video tentang pembangunan infrastruktur yang berhasil diresmikan dan dinikmati masyarakat, tetapi juga mengunggah foto ketika melakukan interaksi dengan para pengguna media sosial. Di Instagram milik Joko Widodo, ia tidak pernah membalas komentar, baik itu komentar positif maupun negatif. Hal ini menunjukkan bahwa Joko Widodo menciptakan jarak antara warganet dengan dirinya yang berperan sebagai presiden RI dan calon presiden. Seperti pendapat key informan yang mengatakan bahwa “media social merupakan media yang sangat mudah diakses pada zaman sekarang ini, apalagi dengan modal kuota saja kita dapat mengakses informasi terutama kampanye pilpres 2019, tanpa perlu ikut andil dalam orasi dilapangan”. (Wawancara tanggal 11 Desember 2020 Pukul 16.30 WIB di kediaman Bapak Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. Jl. H. Ambas No.18. Jakarta Selatan).



Gambar 4 Joko Widodo Berinteraksi dengan Driver Gojek

Dari beragam post tersebut, tak jarang Joko Widodo mengunggah potretnya yang sedang berinteraksi dengan masyarakat, dan menjabat tangan untuk bersalaman serta mendengarkan apa yang mereka katakan (Gambar 5). Di Instagram miliknya, Joko Widodo tidak hanya memainkan peran sebagai pemimpin sebuah negara dan calon presiden namun memberikan arahan yang sesuai untuk peduli terhadap lingkungan.

Penggunaan media social dalam membangun citra positif Joko Widodo, dimana langkah utama adalah membangun citra seperti yang telah dijelaskan sebelumnya diatas, kemudian melakukan kampanye politik untuk mendukung citra dan membuat kesan yang baik di mata masyarakat luas. Terakhir adalah kesesuaian, suatu citra dapat dikatakan sesuai ketika terbentuknya image yang dapat bertahan lama, terutama bertahan sampai masa pemilihan presiden 2019 berlangsung.

PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi mengubah para calon presiden untuk melakukan pencitraan pada diri mereka. Pada pemilihan presiden tahun 2019 media social digunakan oleh tokoh politik dalam membangun citranya. Pada tahun 2019, Joko Widodo melihat peluang untuk memanfaatkan media sosial yang digemari oleh anak-anak muda, salah satunya Instagram. Dilihat dari jumlah postingan pada akun instagram pribadi Joko Widodo selama kampanye terdapat 502 postingan yang menggambarkan beberapa keberhasilan Joko Widodo saat menjadi Presiden RI, melakukan kampanye ke berbagai daerah, bertemu dengan rakyat kecil langsung dan memperlihatkan kedekatannya dengan keluarganya. Hal ini yang menjadikan media sosial khususnya instagram dapat mempengaruhi persepsi atau penilaian terhadap calon presidennya. Dengan melihat secara visual baik melalui photo dan video dapat menarik orang untuk simpati dan mendukung. Keunggulan dari Instagram adalah dapat dengan cepat memberikan informasi dan mempengaruhi viewers, dimana Instagram digandrungi oleh anak-anak muda, salah satunya keunggulan audiovisual dan jumlah karakter yang tidak terbatas dan bebas untuk memberikan like, komentar dan bahkan untuk merepost supaya orang lain dapat membaca atau mengetahui informasi (news breaking).

Dengan menggunakan analisis wacana didalam penelitian ini, dapat menafsirkan teks-teks yang ada. Dimana analisis yang terbentuk nantinya dapat dikatakan bahwa di balik wacana yang dihadirkan terdapat makna dan citra yang diinginkan serta kepentingan yang sedang diperjuangkan. Analisis wacana hasil wawancara yang berupa teks berita akan dibahas dari akun resmi Instagram Joko Widodo dan dari akun instagram para pendukungnya. Dari hasil penelitian diatas bahwa 11 foto yang ditampilkan sebelumnya menunjukkan bahwa Jokowi memiliki berbagai citra yang dapat mempengaruhi masyarakat luas salah satunya yang paling ditonjolkan sesuai gambar diatas yaitu perilaku berbau Joko Widodo dengan masyarakat bawah, murid pesantren dan lain-lain yang menjadikan bahwa orang No.1 di Indonesia dapat dekat dan merakyat dengan rakyatnya. Selain itu menggunakan Instagram sebagai panggung depannya dengan membangun citra positifnya dengan menggunakan keberhasilannya selama menjabat menjadi presiden seperti membangun infrastruktur, mendengarkan aspirasi rakyatnya terutama untuk kelas bawah dan memperlihatkan hubungan harmonis bersama keluarganya. Salah satu foto yang diunggah di akun Instagramnya menggambarkan keharmonisan Joko Widodo dengan Istrinya ketika saat berkampanye. Hal ini membuat rasa simpati masyarakat beranggapan beliau dekat dengan keluarganya mencerminkan hubungan baik dengan rakyatnya. Citra baik tersebut merupakan gambaran yang ada didalam bayangan masyarakat tentang Jokowi.

Dari beberapa foto yang diposting dapat ditelaah adalah bahwa satu kesatuan yang ditonjolkan adalah kampanye politiknya yang menyeluruh disemua kalangan, termasuk kampanye akbar yang dilakukan oleh Joko Widodo. Pada kampanye ini semua kalangan berbondongbondong mendukung beliau dan memberikan apresiasi sebagai dukungan terhadap Calon Presiden yaitu Joko Widodo. Hal ini juga dibenarkan oleh key informan penelitian ini yaitu selaku anggota Tim Kemenangan Pasangan Calon Presiden Joko Widodo yang membuat postingan di akun instagram pribadi miliknya. Bahwa beliau merasa bangga menjadi bagian dari tim pendukung Joko Widodo dan mengatakan bahwa Joko Widodo sangat sopan dengan pasangan calonnya. Hal ini yang menjadi daya tarik masyarakat untuk memilih Joko Widodo. Terkadang gambaran ini memberitahukan masyarakat atau pemilih

untuk mengenal kandidat tersebut sehingga mereka bias memilih kandidat yang bersangkutan. Hal tersebut menerangkan bahwa sosial media instagram sangat efektif dalam membentuk citra positif.

Selain itu hasil penelitian diatas membahas kampanye politik yang dilakukan oleh Joko Widodo. Dalam konteks pemilihan presiden, tentunya kandidat melakukan komunikasi agar mendapat citra yang baik sebagai pemimpin. Salah satunya citra tersebut dapat diperoleh melalui kampanye politik. Lebih lanjut, manajemen citra politik merupakan kampanye politik dalam aktivitasnya untuk membentuk citra, dengan tujuan utama mempersuasi pemegang hak suara. Pada foto dan video yang diunggah di Instagram ketika kampanye, Joko Widodo memperlihatkan bahwa tidak memiliki jarak dengan rakyat, meskipun statusnya adalah orang nomor satu di Indonesia. Pernyataan tersebut didukung dari gambar diatas yang memperlihatkan Joko Widodo saat melakukan kampanye diberbagai Kota. Hal ini menunjukkan bahwa Joko Widodo memiliki sifat-sifat unggul seperti cerdas, dinamis, kuat, kreatif tetapi juga defensif di waktu yang bersamaan sehingga menciptakan dua citra sekaligus.

Hasil penelitian diatas menggambarkan bahwa media social instagram merupakan media online yang para penggunanya dapat saling berkomunikasi dan terhubung, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten dari media yang digunakan. Penggunaan media social instagram untuk membangun citra positif Joko Widodo dalam pilpres 2019 sangat berpengaruh positif. Sesuai dengan penelitian terdahulu menurut Dewi & Janitar (2018) yang mengatakan bahwa media sosial mempunyai peran yang cukup besar dalam membangun demokrasi di Indonesia, khususnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi. Penelitian lainnya (Ma'aruf, & Putra 2019) menerangkan bahwa sosial media instagram sangat efektif dalam membentuk personal branding pada saat kampanye. Menurut Cindy (2019), Joko Widodo yang terbilang cukup aktif di media sosial Instagram, meski memiliki kegiatan yang sangat padat. Jokowi juga menunjukkan citra dirinya melalui setiap postingan yang diunggah di Instagram. Maka dalam membangun citra positifnya dalam pemilihan presiden 2019 Joko Widodo menggunakan media social instagram dan terbukti efektif digunakan.

Di dalam interaksi sosial, setiap individu berupaya menunjukkan image dirinya di depan orang lain. Upaya ini menggambarkan bahwa individu secara sengaja menggunakan komunikasi untuk menciptakan kesan yang diinginkan dari orang lain terhadap dirinya. Melalui media sosial semua masyarakat dapat memberikan kontribusi yang sangat terbuka dan bebas dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Status-status yang ada pada sosial media begitu sangat bergairah dan cepat dalam menyampaikan berbagai kritik maupun aspirasi melalui akun-akun resmi yang dimiliki oleh calon presiden atau lembaga-lembaga lainnya di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori new media yang mengatakan bahwa adanya kontribusi media membuat masyarakat sekarang menjadi masyarakat yang lebih terbuka. Secara umum, dapat mendiskusikan bahwa media mainstream dan dapat melayani informasi publik dengan benar, karena media tidak mampu menyajikan informasi politik yang seimbang. Oleh karena itu setiap masyarakat perlu memilah dan memilih informasi yang dapat diterima dengan baik dan benar.

Berdasarkan hasil penelitian sejak masa kampanye hingga pemilihan presiden, interaksi yang dilakukan Joko Widodo di akun instagram miliknya sering mengunggah tentang berbaurnya beliau dengan masyarakat seperti mengunggah potretnya yang sedang berinteraksi dengan driver gojek, dan interaksi yang dilakukan pendukungnya yang menyuarakan dukungannya terhadap Joko Widodo. Berdasarkan pengamatan di Instagram milik Joko Widodo, ia memposting sekitar 50 foto tentang kedekatannya dengan masyarakat dan foto tersebut mendapatkan ratusan ribu likes. Hal ini menunjukkan interaksi social terjadi antara followers akun Joko Widodo serta pemilik akun Instagram lainnya sebagai penonton.

Pencapaian yang diinginkan yaitu untuk memenangkan pemilihan presiden 2019, agar tujuannya tercapai dengan memperoleh suara yang lebih dari 50 persen. Sehingga interaksi media social instagram sangat penting dalam membangun citra. Jumlah total postingan di Instagram Joko Widodo selama kampanye terdiri dari 502 post. Ini merupakan upaya Joko Widodo dalam membangun citra dan memberikan informasi atau kampanye secara ringan dan cepat tersampaikan terhadap masyarakat luas hanya dalam satu waktu semua dapat melihat informasinya. Informasi yang diberikan Instagram, dapat menjadi media penggerak opini karena banyak pesan yang diterima publik tentang kampanye. Pembentukan citra ini hal yang sangat penting, karena presentasi diri di hadapan pemilih potensial dapat menentukan menang atau kalah dalam proses pemilihan.

Di saat yang bersamaan, ruang untuk membentuk citra diri semakin dipermudah dengan adanya perkembangan media sosial. Politisi tidak perlu lagi mengandalkan media massa konvensional. Keberadaan media sosial menjadikan setiap individu menjadi komunikator massa yang dapat melakukan konstruksi citranya masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian diatas informan dan key informan memberikan gambaran mengenai media social, bahwa media social yang digunakan adalah instagram. Instagram sangat mudah diakses pada zaman sekarang ini, apalagi dengan modal kuota saja kita dapat mengakses informasi terutama kampanye dan berita terbaru mengenai pemilihan presiden 2019.

Joko Widodo dalam akun instagram miliknya selalu memposting berbagai kegiatannya, sehingga banyak masyarakat yang tertarik dan simpati terhadap perilakunya. Joko Widodo tidak hanya memainkan peran sebagai pemimpin sebuah negara dan calon presiden didalam Instagramnya, tetapi juga sebagai pemimpin keluarganya. Pada postingannya, Joko Widodo juga mempublikasikan tentang kemesraan dengan keluarganya yaitu dengan istrinya, Iriana Widodo yang mendampingi saat kampanye. Hal ini dibuktikan dengan jumlah like dan followers yang banyak diakun miliknya tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat dari penelitian Sandra (2013) yang mengatakan media sosial seperti Instagram dapat membentuk visualisasi seseorang dengan segala aktivitasnya. Media seperti ini dapat membentuk dan membangun pendapat umum dengan cara visualisasi yang baik dan sesuai dengan pengharapan masyarakat.

Di Instagram miliknya, seluruh potretnya memperlihatkan bahwa Joko Widodo mengenakan kemeja berwarna putih yang lengannya digulung. Warna putih telah menjadi identitas bagi Joko Widodo sejak menggulung lengannya, artinya beliau siap bekerja dengan hati yang bersih untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan slogan dari Jokowi: kerja, kerja, dan kerja. Selain itu, didukung oleh pendapat dari key informan bahwa sangat bangga dapat menjadi bagian dari tim pendukung kemenangan nasional Joko Widodo yang memberikan citra atau kesan untuk menggerakkan masyarakat lainnya. Citra yang baik sangat bisa menjadi faktor penentu kemenangan dalam pemilihan presiden. Namun, keberhasilan tergantung pada kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Sebab, media social mampu mengubah citra menjadi perolehan suara adalah individu yang memiliki keahlian untuk tampil di hadapan masyarakat. Keberadaan sosial media di Indonesia memiliki posisi yang sangat penting atau sentral. Media sosial semakin nyaman digunakan oleh manusia dalam pencarian informasi. Selain itu, bermanfaat untuk menggantikan komunikasi tatap muka. Sebab, tidak mungkin untuk seorang elit politik bertemu dengan ratusan juta penduduk Indonesia. Instagram merupakan media sosial yang memperbolehkan penggunaannya untuk bebas mengunggah foto maupun video. Pengguna dapat mengikuti dan diikuti akun lainnya. Dimana terdapat fitur pencarian, komentar, serta pemberian tanda suka (like) kepada unggahan diri sendiri maupun akun lain. Sehingga interaksi komunikasi penggunaan media social instagram dapat berjalan dengan mudah dan efektif digunakan dalam mencapai tujuan kemenangan pemilihan presiden 2019.

SIMPULAN

Penggunaan media social instagram dapat membangun citra positif Joko Widodo. Hal ini dibuktikan melalui akun instagram miliknya dengan membangun kesan di hadapan audiens meliputi mengunggah potret-potret keberhasilannya sebagai kepala negara, antara lain membangun infrastruktur di berbagai tempat di Indonesia, dan mempunyai banyak like disetiap postingannya. Selain itu tampak adanya konsistensi dalam membangun citra Jokowi selama masa kampanye, dimana Joko Widodo memiliki sifat-sifat superior seperti unggul, dominan, kuat, pengelola yang baik, cerdas, dinamis, kekinian dan sifat membumi yang melekat seperti kesederhanaan atau santai.

Joko Widodo sangat terbuka dan lebih tampil ofensif di Instagram sehingga memanfaatkan Instagram pribadinya untuk kampanye politik. Sehingga lebih instagram miliknya sangat aktif di Instagram dibandingkan dengan lawan paslon presiden lainnya. Hal itu dilakukan demi menarik perhatian masyarakat Indonesia untuk memilih Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Interaksi komunikasi yang digunakan melalui media social Instagram dipilih karena calon presiden tidak perlu takut terhadap filter wartawan dan dapat menjangkau masyarakat lebih luas, sehingga interaksi komunikasi dalam penggunaan media social instagram dapat berjalan dengan mudah dan efektif digunakan dalam mencapai tujuan kemenangan pemilihan presiden 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A., Bevly, B., Haryanto, D., Yulwardian, E., Nasution, E., Rachman, F., & Hartono, Y. (2013). *Social Media Nation: 15 Inspirasi Berjejaring Sosial: Bertumbuh Besar Bersama Komunitas Online dan Sukses Berbisnis*. Jakarta: Prasetya Mulya Publishing.
- Ardha, B. (2014). Social Media sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(1), 105-120. <http://dx.doi.org/10.22441/jvk.v13i1.383>
- Armstrong, G., Adam, S., Denize, S., & Kotler, P. (2014). *Principles Of Marketin*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, B. (2009). Analisis Penelitian Data Kualitatif. *Jakarta: Raja Grafindo*.
- Cindy C. & Sari W. P. 2019. Citra Diri Dalam Instagram Jokowi. *Jurnal Koneksi* 3(2): 44–50. <http://dx.doi.org/10.24912/kn.v3i2.6380>
- Dewi, R., & Janitra, P. A. (2018). Dramaturgi Dalam Media Sosial: Second Account Di Instagram Sebagai Alter Ego. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(3), 340-347. <https://jkms.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKMS/article/view/5671>
- Efendi, A., Astuti, P. I., & Rahayu, N. T. (2017). Analisis Pengaruh Penggunaan Media Baru Terhadap Pola Interaksi Sosial Anak di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(2), 12-24. <https://doi.org/10.23917/humaniora.v18i2.5188>
- Fairclough, N. (1992). Discourse and Text: Linguistic and Intertextual Analysis Within Discourse Analysis. *Discourse & society*, 3(2), 193-217. <https://doi.org/10.1177/0957926592003002004>
- Fauzia, A. Z., Maslihah, S., & Ihsan, H. (2019). Pengaruh Tipe Kepribadian Terhadap Self-Disclosure Pada Dewasa Awal Pengguna Media Sosial Instagram di Kota

-
- Bandung. *Journal of Psychological Science and Profession*, 3(3), 151-160. <https://doi.org/10.24198/jpsp.v3i3.23434>
- Firmanzah, M. P. (2007). *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kertamukti, R. (2015). Instagram dan Pembentukan Citra (Studi Kualitatif Komunikasi Visual dalam Pembentukan Personal Karakter Account Instagram @basukibtp). *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 8(1). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/profetik/article/view/1101>
- Lees-Marshment, J. (2001). *Political marketing and British political parties: The party's just Begun*. London: Manchester University Press.
- Ma'aruf, A. R. S., & Putra, D. K. S. (2019). Efektivitas Penggunaan Media Sosial Instagram Terhadap Personal Branding Joko Widodo Pada Pemilih Pemula Pemilu 2019. *Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna*, 15(2), 1-18. <http://dx.doi.org/10.20884/1.actadiurna.2019.15.2.2129>
- Ramadhan, M. G. J. 2019. Efektifitas Sosial Media Instagram @Jokowi Dalam Membentuk Personal Branding Pada Kampanye Pilpres 2019. Universitas Muhammadiyah Tangerang 2(1). <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/arn48>
- Sandra, L. J. (2013). Political Branding Jokowi Selama Masa Kampanye Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2012 di Media Sosial Twitter. *Jurnal E-komunikasi*: 1(2). <http://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/912>
- Saputro, G. E., & Haryadi, T. (2018). Edukasi Kampanye Anti Hoax melalui Komik Strip. *Demandia: Jurnal Desain Komunikasi Visual, Manajemen Desain, dan Periklanan*, 3(02), 238-255. <https://doi.org/10.25124/demandia.v3i02.1550>
- Satori, D. A., & Komariah, A. (2009). Metodologi penelitian kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Scammell, M. (2007). Political brands and consumer citizens: The rebranding of Tony Blair. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 611(1), 176-192. <https://www.jstor.org/stable/25097916>
- Schroder, Peter. 2011. *Strategi Politik*. Jakarta: Friedrich-Nauman-Stiftung Fur Diefreiheit.
- Simangunsong, B. (2004). *Negara, demokrasi, dan berpolitik yang profesional*. Jakarta: Kharisma Virgo Print.
- Uchjana, O. (2003). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.



Mongolia's assertive and pragmatic role in India's Connect Central Asia Policy: Current trajectory and Future Ahead

Subhash Kumar¹, Souvik Chatterjee^{1*}

¹Department of Politics and International Relations, Central University of Jharkhand, Jharkhand 835205, India

Article Info

Received: Jul 05, 2021

Revised: Jul 17, 2021

Accepted: Jul 31, 2021

Keywords:

Asia; China; India;
Mongolia;

Correspondent:

Souvik Chatterjee

Department of Politics and
International Relations, Central
University of Jharkhand.

Email:

chatterjeesouvik101@gmail.co
m

How to Cite:

Kumar, S. & Chatterjee, S.
(2021). Mongolia's assertive
and pragmatic role in India's
Connect Central Asia Policy:
Current trajectory and Future
Ahead. *Journal of Political
Issues*. 3(1); 28-35.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v3i1.61>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v3i1.61>

Licence:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRACT

Abstract: Mongolia's uniqueness and importance in contemporary world politics lie in its geographical situating, demography, and economy. Geographically landlocked and situated in the Eurasian intersection, Mongolia has the lowest population density of any sovereign country on the planet. Sandwiched among Russia and China Mongolia's harsh environment limit its economic interests. However, Mongolia's geostrategic position, unexplored energy assets, and democratic governance have expanded its importance in global politics. Because of such Mongolia holds a key position in India's Act East and Connect Central Asia Policy to counter China's expansionist policies in North-East Asia. With regards to India-Mongolia relations, the two nations share a rich historical legacy. Tibetan Buddhism the most prevailing religion in Mongolia makes social linkages, Democracy solidified further connections between India and Mongolia. Because of these old and profoundly established linkages, India-Mongolia are 'spiritual neighbors'. However, China still has an overreaching control over Mongolia's trade, commerce, and other sectors. China also dominates intra-regional trade in North-East Asia. Under India's Connect Central Asia India attempts to counter Chinese encirclement by delving into close strategic, economic, and energy relations with China's neighbors like Mongolia and CAS. However, the achievement or failure of India's Connect Asia Policy will depend upon India's political as well as its diplomatic will to transform India's interest in regional integration in reality.

About Authors:

Dr. Subhash Kumar is currently working as an assistant professor in the Department of Politics and International Relations, Central University of Jharkhand, India. He did his M.Phil. & Ph.D. from School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He has contributed numerous articles and book reviews in renowned national and International Journals. His areas of expertise are Foreign Policy of Mongolia, Central Asian Studies, India's Foreign Policy, Inner Asian Studies.

Souvik Chatterjee is currently working as a Junior Research Fellow in the Department of Politics and International Relations, Central University of Jharkhand, India. He obtained his Master Degree in Political Science from Kazi Nazrul University, India and stood first class first in 2018. His areas of interest are Foreign Policy of Mongolia, Political sociology, Comparative Politics, Inner Asian Studies.

INTRODUCTION

Mongolia's uniqueness and importance in contemporary world politics lie in its geographical situating, demography, and economy. Geographically landlocked and situated in the Eurasian intersection, Mongolia has the lowest population density of any sovereign country on the planet. Sandwiched among Russia and China Mongolia's harsh environment limit its economic interests. However, Mongolia produces the world's best cashmere, has vast energy and mineral assets (Goodson & Addleton, 2020). Mongolia's geostrategic position, unexplored energy assets, and democratic governance have expanded its importance in global politics. Because of such Mongolia holds a key position in India's Act East and Connect Central Policy to counter China's expansionist policies in North-East Asia.

Mongolia, after its democratization in the 1990s, has been resolved to transform itself as a landlocked to land-connected cosmopolitan (Bulag, 2010). Geographically, Mongolia is landlocked by Russia and China. During the rule of Chinggis Khan Mongolia expanded its reach from the eastern edge of Asia to the most distant parts of Europe. Due to this intermingling, Mongolia shares social, cultural linkages with other Central Asian States (CAS henceforth). After its autonomy in 1921 till 1991, Mongolia was a Soviet Satellite however officially it was never part of the USSR. However, since its democratic transformation in 1991, Mongolia focuses on a free-market economy and developing cordial relations with its neighbors and other major powers. Without the fundamental Soviet assistance, Mongolia looks for multilateral partnerships and alliances to sustain its domestic economy. Mongolia's Third Neighbor policy aims at balancing its relations with its two powerful neighbors, the Peoples' Republic of China and the Russian Federation while exploring financial, energy, and multilateral partnership with the USA, Japan, and Germany, India, Japan, the Republic of Korea, etc.

With regards to India-Mongolia relations, the two nations share a rich historical legacy. In spite of limited political and economic exchanges, the social and cultural aspects of their relationship are emphasized for ages. While Tibetan Buddhism the most prevailing religion in Mongolia makes social linkages, Democracy solidified further connections between the two. Indian monks visited and spread Buddhism in Mongolia in about the fifth Centuries A.D. Furthermore, there are additional linkages between India and Mongolia. Also linguistic affinity along with other affinities beginning from wrestling to clothing, there is a great degree of resemblance between the two (Nyamdavaa, 2003). Because of these old and profoundly established linkages, Prof. Oidov Nyamdeva named India-Mongolia as 'spiritual neighbors' (Nyamdavaa, 2015). The two nations are searching for deeper Strategic, Economic, and Energy cooperation which are given priority in India's Connect Asia Policy and Mongolia's Third Neighbors Policy. Mongolia since the 1990s attempts to extend its sphere of influence beyond Russia and China and accept India as an important strategic partner.

OBJECTIVES OF THE STUDY

India under its Connect Central Asia Policy is attempting to counter Chinese encirclement by delving into close strategic, economic, and energy relations with China's neighbors like Mongolia and CAS. Remembering these progressions in Indian Foreign policy this study will attempt to uncover the following objectives I. Challenges and difficulties in India's Connect Central Asia policy and II. The importance of Mongolia in India's Connect Central Asia policy and its implications in North-East Asian politics.

RESEARCH METHOD

Generally, foreign relations between nations require a systematic understanding of pertaining issues to understand the current direction and to comprehend the future potentiality of the relation. It requires a complete understanding of available sources. This study is an attempt to understand the significance of Mongolia in India's Connect Central Asia Policy using qualitative data. Existing works both primary and secondary sources along with e-resources and news coverings on this issue are consulted extensively.

RESULTS**Mongolia and The New Great Game**

Mongolia for a while was able to maintain its autonomy and established the largest empire under the dynamic and capable authority of Chinggis Khan. However, with the rising force of China's Qing dynasty, Mongolia became the part of Chinese empire from 1691 to 1911. Thereafter because of the Chinese oppressive treatment of Mongols, Mongolia looked for complete autonomy. Under the Treaty of Kyakhta in 1915 China for a short time recovered control of Mongolia yet with the help of the USSR, Mongolia removed the Chinese after the 1917 October Revolution ([Goodson & Addleton, 2020](#)).

Before the end of the cold war, Mongolia stayed as a Soviet Satellite and depended heavily on financial assistance from the USSR ([Rossabi, 2009](#)). Also, the USSR assisted Mongolia to ousted the monarchy and set up communism in the country. Mongolia's geostrategic location helped it as a buffer state with China. So Mongolia during this time was not only dependent upon the USSR for monetary assistance, Mongolia's internal and external strategies were molded by the USSR.

The democratic transformation of Mongolia began with Gorbachev's Glasnost and Perestroika that affected Mongolia significantly. The democratization in Mongolia took off with Iltod and Orchilan Baigalalt ([Krishna, 2017](#)). Mongolia, unlike its neighbors, especially in Central Asia, is more internally stable and emerged as a regional beacon for democratic development in the region ([Krishna, 2017](#)). Because of Mongolia's democracy and its mineral wealth, Mongolia is drawing the attention of major powers to invest in its neglected energy sector. Nonetheless, Mongolia's two neighbors Russia and China are still dominating Mongolia's foreign policy, especially security and energy policies. The internal reforms alongside the changed geostrategic situation make it feasible for Mongolia to pursue realist foreign policy based on post-soviet public interests ([Krishna, 2017](#)). Mongolian Foreign Policy Blue Book (2000) by the Ministry of External Relations stressed favorable internal and external conditions to maintain Mongolia's national interests, along with financial development and ensure its national security ([Policy Planning and Coordination Department 2000](#); [Krishna, 2017](#)). So diversity and geopolitics have forced Mongolia to adopt a multilateral foreign policy.

Mongolia in The New World Order: From Soviet Satellite to Democratic Transformation

Nonetheless, with the disintegration of the USSR, Mongolia experienced significant challenges. Mongolia for a while dependent upon on USSR for financial and security assistance. Almost 40% of Mongolia's GDP, energy assets, most of its heavy machinery, and consumer goods were imported from the USSR ([Goodson & Addleton, 2020](#)). With the collapse of the USSR, the Mongolian economy endured a dramatic loss. Also, the USSR for quite a while helped Mongolia to sway from Chinese animosity. Without the help of the

USSR, China again claiming Mongolia as a part of its territory and there is a growing concern that Mongolia will endure a similar destiny such as Tibet and Taiwan.

Mongolia attempted to counter this with two specific policies each having its own geostrategic and economic objectives. Under the good neighbor policy, Mongolia began balancing its relationship with its two powerful neighbors Russia and China. Furthermore, under the ambit of the third neighbors' policy, Mongolia tries to foster more political, financial, and social exchanges with nations like the United States, Japan, South Korea, India, Australia, and so on. Lately, China's assertiveness over North-East Asia, particularly Mongolia, has expanded while the West is trying to use Mongolia as an ally to counter China. Mongolia's democracy, geopolitical positioning alongside its neglected immense energy assets are bringing fundamental changes in North Asian security.

Beijing's Assertion in Mongolia and its Implications for India

In recent times China has emerged as a global hegemon which is also evident in its complete control over North-East Asia and Mongolia specifically. Under the Belt Road Initiative(BRI) China is using infrastructure as leverage to further strategic and economic interests in Asia and Africa. (Goodson & Addleton, 2020).

With the help of six transnational corridors, China plans to connect Eastern Europe via Mongolia and Russia (Goodson & Addleton, 2020). These passages will create new mineral markets for Mongolia and help Mongolia to act as a North-East Asian logistic hub. In the post-cold war period, China's authority over Mongolia increased considerably. China isn't just financing costly infrastructures in Mongolia, yet in addition, China attempts to influence Mongolia's politics as well. As of late China dominates Mongolia's economy. The majority of Mongolia's minerals like copper, coal, and gold are traded to China while Mongolia is importing energy and other essential services from China. Because of this over-reliance on China, the Mongolian economy is profoundly helpless against Chinese economic fluctuations which prompted a meltdown in Mongolia's economy. Even though India and Western forces are creating economic tie-ups with Mongolia, China has an overextending command over Mongolia. China controls and dominates Mongolia's trade, commerce, and energy sector. China also has overriding control over intra-regional trade in North-East Asia including Mongolia. The complete trade volume between China and other North Eastern Countries in 2018 crossed 758 billion US \$ that demonstrates the Chinese supremacy in the region (Xia, 2019). In North-East Asia, the two most powerful countries, China and Japan, are focusing on Mongolia's neglected energy assets.

Japan is helping Mongolia in FDI's while the People's Republic of China is presently the largest trading partner of Mongolia. Nonetheless, because of the political unrest business and exchange exercises with China are enduring impressively. To counter this, China alongside other North-East Asian nations is setting up a multilateral forum to explore new possibilities in energy, business, and infrastructural improvement in the region. China is providing financial and strategic help to all its North East Asian neighbors as part of China's debt diplomacy. On opposite India and Western forces have limited interaction with Mongolia in the strategic, trade, and energy sector. As far Indo-Mongolian Bilateral Trade is concerned, trade potential was estimated at 8.45 billion U.S dollars but in reality, Indo-Mongolian bilateral trade was just 12.03 million US dollars in 2015 (De & Pan, 2017). Mongolia's rich natural resources and minerals requires technical expertise and logistic support, here India can play a catalytic role. Under India's Act East Policy and Connect Central Asia Policy Mongolia occupy a key role to further India's interest in the Eastern part of Asia. Under the Central Asia policy, India intends to counter Chinese assertion in South Asia by strengthening its relations with Mongolia and extending its influence in Northeast Asia.

To influence Mongolia's Internal policies, China is utilizing Debt Diplomacy as a potent tool of Chinese foreign policy (Goodson & Addleton, 2020). As Mongolia is

dependent on China in trade and energy, China is utilizing this to influence Mongolia's decision-making process. For instance, at the onset of the Dalai Lama's visit in 2016 Chinese increased trade tariffs on Mongolian products as punishment. In this aspect, the role of Russia is very critical. Alongside China, Russia is another important player in the region and both Mongolia and Russia enjoys cordial relation. Both China and Russia's geostrategic interests are dependent upon Mongolia because of its role as a buffer state. Similarly, to counter the US both Russia and China are looking for a military alliance with the help of Mongolia. Just like China, Russia attempts to rebuild its economy and strategy with Mongolia. Russia dominates Mongolia primarily in energy as it supplies around 80% of Mongolia's oil market, and bilateral trade has increased almost 40% since 2017 ([Goodson & Addleton, 2020](#)). Also, Russia is investing in a 1.5 billion \$ infrastructural project, along with the up-gradation of the trans-Mongolian railway, and use Mongolia as a route for the Russia-China gas line project.

DISCUSSION

The Role of Mongolia in India's Connect Central Asia Policy

Geologically, Central Asia conjuncts Islam, Buddhism, Christianity, and Hinduism the four dominant religious faith of the globe. Albeit Modern Central Asia comprises Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan, Mongolia is part of this because of overlapping of cultures and similar lifestyles. Also, these states were reliant upon the USSR and part of COMECON. India and Central Asia also share rich historical exchanges. The Ancient silk route and Indus valley civilization fostered cultural and social exchanges between the Indian subcontinent and Central Asia. Because of this India always considers Central Asia as a part of India's "extended neighborhood". However, with the decline of the USSR, China's supremacy in Central Asia increased significantly.

Additionally, due to the Afghan Civil War, India lost its direct overland access to Central Asia. Before the fall of the USSR, Soviet Union had total predominance over Central Asia. All of the Central Asian states were either part of it or acted as a satellite of the Red State like Mongolia. The Indo-Soviet Treaty of Peace in 1971, increased economic cooperation and strategic convergence between India and the Soviet Union, allowed India to augment its relations with the Central Asian States. Notwithstanding, with the fall of the USSR, Central Asia has become increasingly unstable and rigged with ethnic and separatist movements. India requires stability in Central Asia as it shares borders with Pakistan and Afghanistan.

Mongolia is significant in this aspect because it can act as a geographical pivot between Russian China while sharing a close affinity with the Central Asian region as well. India under its Connect Central Asia and Look North policy focusing on both Central Asia and Mongolia. Today India develops strategic and trade relations with Central Asia and Mongolia. Thus Connect Central Asia Policy focuses on deeper political, security, economic, and cultural interactions with CAS and lately Mongolia as well ([Ahamed, 2012](#)). Under this detailed approach, India focuses on many important areas including political cooperation, economic cooperation, strategic cooperation, regional connectivity, information technology (IT), cooperation in education, people-to-people contact, medical cooperation, and cooperation in regional groupings. With four key areas, Commerce, Connectivity, Consular, and Community, India is attempting to limit China's domination in the region and to ensure regional stability ([Drishtiias.com, 2019](#)).

Changing geopolitical equations are part of Connect Central Asia policy as this region is strategically positioned as an access point between Europe and Asia. Moreover, both Central Asia and Mongolia are richly endowed with natural gas, cotton, gold, copper,

Subhash Kumar & Souvik Chatterjee:

Mongolia's assertive and pragmatic role in India's Connect Central Asia Policy: Current trajectory and Future Ahead

aluminum, and iron. The expanding significance of energy security of the region's oil and gas resources has compelled India to develop more ties with Mongolia and CAS. India under this approach negotiated on the TAPI pipeline along with signing a civil nuclear deal with Kazakhstan. India is also focusing on (Drishtiias.com, 2019). Both CAS and Mongolia require India's expertise in these sectors and deeper strategic cooperation will give a fresh impetus to trade relations with these countries. To convince the Central Asian States, the Indian PM visited all 5 central Asian countries and Mongolia called for greater participation in multilateral fora like the Eurasian Economic Union, Heart of Asia Conference, and Shanghai Cooperation Organisation.

Because of the landlocked positioning of Central Asian states and Mongolia, there is no direct sea route that impacts India's trade and energy interests in the region. With the Belt and Road Initiatives China is required to increase its dominance in the Central Asian republics and Mongolia in terms of investments within the region. Likewise, Russia and China's convergence in Mongolia has changed the dynamics of India's relations with Central Asia. Mongolia has ample natural assets like oil, gold, silver, iron, coal, etc. However, due to the absence of skill and troublesome environment

Mongolia's energy resources remained unexplored. In light of this Indian Government is keen on different geostrategic and mining projects in Mongolia. Alongside a joint military exercise, in 2015 India gave 1 billion dollars' line of credit to Mongolia to construct its first-ever oil refinery followed by a high-level visit by Smt. Sushma Swaraj. In recent times there have been several high-level visits such as PM Modi's historical visit to Mongolia in 2015 followed by Mongolian President Khaltmaagiin Battulga's visit to India to discuss trade and investment potentials in the Mongolian energy sector. India is likewise in talks with Mongolia to have more prominent collaboration in the hydrocarbons and steel sector. During a virtual meeting, Indian Minister Pradhan praised leadership for their speedy approvals on the pending green field Mongol Refinery Project, built under a Line of Credit from the Government of India which is expected to complete by 2022 (The Hindu Business Line, 2021).

Nonetheless, China still maintains its hegemonic position both in Mongolia and Central Asia. Chinese supreme monopoly can be observed in trade, commerce, and energy sectors. Both the Western Powers and China are exploring the energy potentials of Mongolia and that's why they are investing in the energy sector. China, to expand its control, is interested in a multilateral dialogue between Mongolia and CAS regarding energy, trade, and infrastructural development in the region. Then again, despite historical and cultural linkages with the region, India's interaction in economic and energy sectors remains minimal. Mongolia's energy strategy is to a great extent dictated by its nearby neighbors, particularly China. Under India's Act East Policy and Central Asia Policy, India attempts to increase its presence in the further Eastern region of Asia. While India is in steady danger of Chinese encirclement policy in South Asia, India was not able to expand its influence beyond its immediate neighbors. Here Mongolia is going to act as an influential player in the northeastern regional cooperation.

CONCLUSION

In India's Connect Central Asia policy Mongolia holds a focal position both from a geostrategic point of view and from economic and energy avenues in the region. Mongolia's position connecting Central Asia, North East Asia, Far East Asia is attracting India to develop more ties. (Stobdan, 2015). Mongolia's closeness with CAS and with China reinforces Mongolia's geo-strategic importance. The Indian government has focused on India's old age historical ties with Mongolia such as Buddhism and India's active role in the promotion of democracy in the region. India is expected to import rich minerals such as Uranium from

Mongolia while investing in infrastructure setup in Mongolia. India's active role in the non-aligned movement, the reputation of being the largest democracy, and the principle of non-intervention greatly attract Mongolia's foreign policymakers. Also, public inclinations developed against China in Mongolia due to its long history of suppressing and opposing residents of Inner Mongolia. Due to this India occupies a central position in Mongolian foreign policy discourse to counter China and Russia. Mongolia's transformation to democracy, its foreign, as well as domestic policy, was guided and molded by USSR but in recent times China's influence in the region is so intense and far-reaching, many people fear the loss of Mongolia's autonomy to China once again (Stobdan, 2015). India is very much aware of Mongolia and CAS's significance as a geopolitical pivot but at the same time, both Mongolia and India are partnering with each other like engaging in defense as well as strategic tie-up, policymaking to strengthen their partnership. However, the achievement or failure of India's Connect Asia Policy will depend upon India's political as well as its diplomatic will to transform India's interest in regional integration in reality.

FUNDING

This Study received no specific grant from any funding agency in the public, commercial or not for profit sectors.

CONFLICTS OF INTERESTS:

The authors have declared no competing interests exist.

REFERENCES

- Ahamed, M. S. (2012, June 12). *Keynote Address at First India-Central Asia Dialogue on India's 'Connect Central Asia' Policy at India's 'Connect Central Asia' Policy*. Ministry of Indian External Affairs Retrieved May 10, 2021 from <https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/19791/>
- Bulag, U. E. (2010). Mongolia in 2009: From Landlocked to Land- linked Cosmopolitan. *Asian Survey*, 50(1), 97-103. <https://doi.org/10.1525/as.2010.50.1.9>
- Drishtiias.com. (2019). *Connect Central Asia Policy*. Drishti IAS. <https://www.drishtiias.com/to-the-points/Paper2/connect-central-asia-policy>
- De, P., & Pan, S. (2017, October). India-Mongolia Economic Relations: Current Status and Future Prospect. *The Northeast Asian Economic Review*, 5(2), 31-47. <https://ideas.repec.org/a/eri/review/5231-47.html>
- Goodson, J., & Addleton, J. (2020, January 29). *How Great Power Competition Is Changing the Geopolitics of Mongolia*. Retrieved from RealClear Defense: https://www.realcleardefense.com/articles/2020/01/29/how_great_power_competition_is_changing_the_geopolitics_of_mongolia_115003.html
- Krishna, V. (2017). Mongolia's Foreign Policy: Profiling Fundamental Aspects. *International Journal of Applied Social Science*, 4(9-10), 402-414.

<http://scientificresearchjournal.com/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=2569>

Policy Planning and Coordination Department (2000). Mongolian Foreign Policy Blue Book., Ministry of External Relations.
<http://www.qingis.com/photos/foreign%20blue%20book%20eng.pdf>

Nyamdavaa, O. (2003). *Mongolia-India relations*. New Delhi: Bhavana Books & Prints.

Nyamdavaa, O. (2015). Ancient Cultural, Ethnic and Religious Ties Between Mongolia and India. *World Affairs: The Journal of International Issues*, 19(4), 150-159.
<https://www.jstor.org/stable/48505253>

Rossabi, M. (2009). *Modern Mongolia from Khans to Commissars to Capitalists*. Berkeley, CA: Univ. of California Press.

Stobdan, P. (2015, May 13). *India and Mongolia: Modi on Ashoka's Path*. Retrieved December 2019, 20 from Institute for Defence Studies and Analyses:
https://idsa.in/idsacomments/IndiaandMongolia_pstobdan_130515

The Hindu BusinessLine. (2021, January 08). *India, Mongolia review bilateral cooperation in hydrocarbons and steel sectors*. Retrieved 15 February, 2021 from The Hindu BusinessLine: <https://www.thehindubusinessline.com/economy/policy/india-mongolia-review-bilateral-cooperation-in-hydrocarbons-and-steel-sectors/article33530455.ece>

Xia, L. (2019). *China Focus: Northeast Asian countries eye closer ties to boost global economy*. Retrieved December 2019, 19 from Xinhuanet:
http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/27/c_138342481.htm



US – Iran Proxy War in Middle East Under Trump Administration

Hino Samuel Jose^{1*}, Laode Muhamad Fathun¹

¹Department of International Relations, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12450, Indonesia

Article Info

Received: May 01, 2021

Revised: Jul 14, 2021

Published: Jul 31, 2021

Keywords:

Conflict; Iran; Proxy War; Regional Security

Correspondent:

Hino Samuel Jose

Department of International Relations,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Email:

abrahamhinosamuelse@upnvj.ac.id

How to Cite:

Jose, H. S. & Fathun, L. M. (2021). US – Iran Proxy War in Middle East Under Trump Administration. *Journal of Political Issues*. 3(1); 36-48. <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i1.45>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v3i1.45>

Licence:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRACT

Abstract The heated bilateral relation between Iran and the United States has brought the middle east into another level of problem. The divided geopolitical and regional interest of both countries has led to several and many multidimensional issues, ranging from political, security, and even to economic ones. This article discussed the Iran – US tension on their proxy conflict in the Middle East. This article employs the Regional Security Complex Theory to construct the events related to both states' proxy conflicts. The polarized region for sure has drawn another line that seems to be more complexed for both countries to achieve mutual understanding and continued peacebuilding. The US withdrawal from JCPOA, killing of Soleimani, and Saudi Arabia – Iran Yemen proxy war exacerbated the status quo. This article perceived that the intertwined issues show how the traditional thought of security should be redefined as both countries try to gain bargaining power. Especially with Iran that was hindered very much by sanctions and embargo placed by the US. This article discusses many important issues on Iran, US, and Saudi Arabia involvement and their correlated dynamics within the UN. This article analyzed Trump's leadership style in the Middle East and its implication from the proxy war to the Middle East security architecture.

About Authors:

Hino Samuel Jose, is a penultimate year undergraduate of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. He is minoring in International Security and Global Development studies.

Laode Muhamad Fathun, is currently a lecturer at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. He earned his master's degree in International Relations from Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

INTRODUCTION

The heightened tension between Iran and United States has been started since both countries severed their diplomatic relations back in 1979, and the bilateral affairs of both countries are being conducted unofficially between protectorates. Back in 2013, during Iranian President Rouhani's visit to the US, he had a 15-minutes call with President Obama during the momentum of UN General Assembly 2013 (Roberts & Borger, 2013). This short bilateral call may seem to be a simple diplomatic courtesy, but meant a lot between US-Iran tension where the two countries were seeing positive prospects in Iran's nuclear agenda. Both countries, in general, have always been the center of attention in the Middle East regional security discourses owing to their self-interest and power balancing contestations (Dunn, 2007). In a more neoliberalist view, both countries are also the center of attention when it comes to multilateral dialogue in non-proliferation agenda, where US diplomatic representatives repeatedly blame Iran. The UN-led sanctions, plutonium scrutiny, and Iran's deviation from the agreed security norms are also the main institutional agenda that is utilized by the US to counter Iran (Brzezinski, 2016).

The US presence in Iran and the Middle East architecture as a whole seems to be struggling on their quest to balance power and counterweigh Iran, considering the rising conservatism after the secular Shah Pahlevi was thrown out of power (Nakhavali, 2013). The Khomeini dynasty claimed power against the western powers to reverse its implications within the Iranian society. The United States indeed partaking in the power competition and geopolitical contest against Iran and its allies, while also at the same time being participated by many US' allies. The US indeed has been receiving great threats from Iran nuclear's ambition and its revolutionary leadership which labeled the US as the "great satan" (Yeganeh, 2011).

Following the movements made by Khomeini, the US followed suit with a series of sanctions and embargo, and a new "dual containment policy" (Mirhosseini, 2014). The containment policy was targeted to trigger internal resistance movement to trigger the Iranians in toppling their leader, then a rapprochement with the western power will follow suit. The US is quite optimistic with this approach as their winning on the Gulf War as the Gulf Cooperation Council (GCC) is willing to cooperate with the US, while also participating in negotiating securitization policies with the US (El-Katiri, 2014).

This article discussed the under-discussed issues of US-Iran relations, particularly the issue of proxy wars between both states that were understudied (Rauta, 2018). Proxy warfare is the feasible way of confronting their opponents while also hiding from the risk of violating international law exacerbating a direct conflict that may lead to another World War 3. According to Mumford (2013), proxy warfare is also useful to cause enough geopolitical shift and exploiting conflicts to favor one or more actor(s). and in that sense, it's the goal of the US and Iran is racing to one another for total regional security control and advancing their geostrategy over their economic/ political interests towards the regimes in the Middle East and the Gulf.

According to Basundoro (2020) proxy war in the Middle East is about bandwagoning of allies and balancing efforts in a very systemic rivalry to maximalize the achievement of regional dominant power amid the limited capacity to be a global hegemon. Countries like Yemen, Iraq, and Syria are often depicted as the key areas of Middle East proxy war to actualize each states' influence and extensive external balancing (Ekşi, 2017). The author suggests that it is amazing to see how Iran's domestic ambition can be manifested into their regional foreign policy in such an enormous manifestation. The contemporary proxy war between the major power and emerging power in the Middle East and the Gulf can be seen as a strong signal that uncertainty and civil wars becoming intertwined with external intervention, and countries becoming their proxies alongside armed non-state factions (Basundoro, 2020).

This paper wishes to focus on their proxy war in the Middle East and the Gulf regional security architecture, about the increased tension ever since President Trump acquired the US Presidency in 2016. Coercive politics exercised by the US and its allies towards Iran does convey a logical causality with the increasing proxy war in the Middle East involving the Sunni versus Shia factions, or US-controlled versus Iran-led proxies. The stringent actions covering social, political, economic, and military dimensions are the key repressive measure to press Iran's nuclear ambition (Sauer, 2007). The bilateral conflict between both countries is also escalating after the US urged the International Atomic Energy Agency (IAEA) to investigate the outstanding nuclear issues, followed by the adoption of UN Security Council resolution 1803 that sanctioned Iran. With no-veto thrown, it is safe to say that the US managed to lobby Russia and its allies in the Security Council and compromised on some political deals. However, this deal has also somehow contributed to the proliferation of bilateral escalation between Washington and Tehran, where Iranian foreign policy against the US is drawn as the efforts in between nuclear agreements and its related proponents and critics regarding their nuclear proliferation and regional politics.

RESEARCH METHOD

This research employs the qualitative analysis of the literature and supporting data gathered through internet-based research. This article discussed the events related to the arguments and explaining them based on the assumption of regional security complex theory. The questions to be discussed in this article are as follows: (1) What are the events and political situation derived from the status quo that led the US and Iran to start their proxy war; and (2) How the US – Iran proxy war impacts the regional security architecture. This article explains the significance of contemporary events from nuclear proliferation, sanctions, and embargo impacts the dynamic in achieving hegemony within the middle east.

THEORETICAL FRAMEWORK

Regional Security Complex Theory (RSCT)

According to Barry Buzan, the development of the regional security status quo enables countries within a region to analyze clusters of states' behavioral patterns within and from a regional perspective (Buzan & Waever, 2003). The complexity of a region's security is what drives the state actor doing their securitization, which means that security interactions are being done because of their immediate neighborhood. This is supported by Walt (1987) that the adjacent threat(s) tend to come because of the intensified securitization from the nearby states. The studies of the RSCT itself gave a new paradigm in the post-cold-war era where the rethinking of traditional securitization context is happening. Copenhagen school is one of the schools of thought that stands out in providing the conceptualization of the security analysis especially in explaining the regional security dynamics (Dadandish & Kouzehgar, 2010). In regards to this research, Buzan and Waever posit that the global major powers' interests in the Middle East, are regionally-driven and regionally-made (Buzan & Waever, 2003). RSCT explains the control variable of the actors' aggressive posture in international politics in a more neorealist view (Marsheimer, 2001).

To view it further, the anarchic international system has made state actors consider their geopolitical and geostrategy interests, which then yields some sort of "regional-based clusters". In which those clusters explain that the security interdependence done between those actors are more intense and complex hence, spilling outside the context even to the global level (Acharya, 2007). Or in other words, creating another proximity of securitization in the larger web by constructing their identities and ideas in the landscape that can impact the outsiders of a particular region (Buzan & Waever, 2003). In this research, is the Sunni and Shia identity that is the main driver of Iran – Saudi proxy war that drives the US – Iran bilateral proxy wars that are also impacting the international security architecture were

factions, sponsors, and interests subjects in one Ferris wheel. Commonalities of these identities also at the same time trigger and catalyze regional cooperation in securing their interests against threats.

RESULT AND DISCUSSION

The Middle East is a region with complex security architecture compared to other regions around the world. The tensions between the western world and the Persian Gulf countries tend to be intense for the last few decades either by multilateral, regional, or bilateral means. The proxy war in the middle east has escalated the tension between each of the conflicting parties and tremendously changed the security architecture along with geopolitical situations which not only are impactful to the region but also towards many political deadlocks within the United Nations as both major powers, namely Russia and the United States keep competing over influence by sustaining the advancement of their proxies within the region ranging from the Israel-Palestine conflict, Yemen Civil War, Iran's nuclear proliferation, and the Situation in Iraq.

The tension within the region has undoubtedly increased the concerns of the international community thus the political competition between Saudi Arabia and Iran has caused tremendous effects which resulted in the current status quo with few failed states within the Middle East geopolitics. The problem in the region started since the Fall of Shah which led to the competition between Saudi Arabia and Iran that has been proliferating the armed proxy war on many fronts namely Syria, Iraq, and Yemen. Since the beginning of the year 2020, a global crisis has encountered the Persian Gulf. Tensions between the United States of America and the Islamic Republic of Iran have escalated, placing the world near the brink of war. With the killing of an American contractor and the killing of a high-ranking Iranian general, both nations are near war, with alliances and coalitions being operated.

It can't be denied that this multidimensional conflict between the US and Iran is also a direct result of the diplomatic failure of JCPOA from laying grounds/ stipulations that don't consider the unprecedented impact of the changing leadership in the US itself. The populist notion coming from Trump that JCPOA is a "decaying and rotten deal" indeed not only impacting their bilateral status quo with Iran but also concerning their western allies like NATO and EU (BBC News, 2018). The increased US support to the Saudis in Yemen, strengthened bilateral brotherhood with Israel, and the 'hot peace relation with Russia became intertwined and subjects to the manifestation of the proxy lense to attain their foreign policy objective. The proxies that are allied with Iran are indeed being used by Iran to resist the overwhelming sanctions and other pressures by the US and its western allies.

In May 2019, four commercial ships from Aramco (an American - Saudi Arabian energy company) sustained damage, the US blamed this on Iran, as part of an alleged proxy-sabotage plan (Trevithick, 2019). Another attack worsened the conditions as Houthi (rebels supported by Iran) drones attacked Saudi Arabian oil pipelines, leading to the US directly blaming for the Iranian sponsorship before, during, and after the attack (Yee, 2019). The series of attacks launched by Iran against many oil ships in the gulf sea was done to secure their prone sea from US assertion over the oil supply in the Gulf (Katzman, Mcinnis, & Thomas, 2020). These numerous events will just show how each actor will try to grab their headstart against each other, and the US as the major power will not stop proliferating their sanctions and trust deficit to Iran.

Politically, Iran is perceived as a fanatic and extreme religious country with little-to-no democracy and human rights governance dictated by religious "moralism" against a traditional state actor behavioral preferences (Scott, 2000). The US-Iran hostage crisis back then has been absorbed by the international community as the common perception of Iran,

while Tehran is establishing anti-thesis behavior against the so-called “US” oppression” (Seymour, 2013).

From the middle east perspective, the division of the Sunni-majority and Shia-majority states became an important factor that splits the proxies and security dynamics within the regional architecture. However, the interesting point is that most of the factions who are fought by the US are Sunni (ISIS, Al-Qaeda, etc), which means that the US is doing Iran’s work in eliminating their Sunni enemies within the region as Iran backs Shia factions (Hussain, 2015). This division also goes hand in hand with the historical and recent political and security competition done by Saudi Arabia versus Iran in Yemen and several other issues. With Iran backed by Russia, the contender of the US enemy, and Saudi Arabia backed by the US – plus the same stance of Israel with Saudi against Iran made the sectarian conflicts transitioned to the nuclear and security conflict (Nuruzzaman, 2012).

The major recent update sparked another focal notion that seems to be more relevant to this discourse. President Trump authorized a drone strike in Baghdad International Airport which killed Iran's second in command General Qassem Soleimani, the general of Iran’s elite Quds force. The US justified the killing by arguing that Soleimani and the Revolutionary Guard presented a terrorist threat to US diplomatic personnel in the region. Iran vowed for a “hard revenge” following the attack that killed Soleimani. Following the killing, the United States embassy in Iraq was under siege after thousands of protestors chanting “Death to America” as they protested the US for killing Soleimani. This has escalated the status quo and even many of the states were thinking that the US and Iran might go into an “all-out” war following the offensive unilateral statement made by Khomeini and Trump.

United States, Saudi Arabia, and Israel Versus Iran

The contradicting political rhetoric between Saudi Arabia and Iran remains high as the subsequent events preceding the temporary 2017 diplomatic crisis of Qatar versus the rest of the Sunni-majority middle eastern countries (Wintour, 2017). The GCC was divided not merely because of the alleged sponsorship from Qatar towards the violent Islamist groups that were pro to Iran, but also because Riyadh wants to preserve their cohesive supports to the Jaysh al-Islam faction in Damascus (Wahyuni & Baharuddin, 2017). Saudi Arabia

US seized the opportunity where they use Saudi Arabia as their third party in opposing Iran, particularly in Yemen where the US is supplying tremendous weapons for Saudi’s fighter jets. The proxy war in Yemen became prominent to be discussed at the multilateral level when the Saudi-led coalition starting the strikes against Houthis with the Operation “Decisive Storm” to restore the Hadi’s government into power while also pressing back the threats from Iran-backed ANSAs, Saudi Arabia kept striking Houthis in which they had the role to determine the proceedings of the conflict since all of the warring factions were controlled by either country in the domain of proxy war in the Yemen Civil War crisis (Baron & Al-Hamdani, 2019).

Yemen’s case was condemned by Amnesty International as the humanitarian crisis within the country flourish, especially with the public community knowing the US will not stop their support to Saudi Arabia until Iran is running out of fuel in backing the Houthis. Foreign countries backing the Houthis rebel has committed several war crimes and breaches of the international law by continuing to bombard and shelled civilian settlements and injuring people by launching multiple missiles, mortars, and destroying public facilities thus damaging vital objects such as schools, hospitals, and multiple infrastructures as discovered by the Amnesty International since the beginning of the conflict in 2015 (Amnesty International, 2019). Lee (2020) argued that the proxy war in Yemen has caused more than 400 killed a month either by the exchange of fire or by unexploded shells.

Saudi Arabia is perceived to be the major power in the conflict, with Al-Hadi relying on it. Restrictions over the essential needs of the population are widely disrupted by the

Saudi-led coalition and the Houthis authorities thus causing further suffering of the people in the crisis. International vessels traveling to the ports have to wait for authorization for a long time thus causing fuel, food, and medical shortages and obstructing clean water and sanitation which is crucial amid the Covid-19 pandemic.

Saudi Arabia and Iran's competition for regional influence has been rough and rocky on its quest. Both countries are now bringing instability to the Middle East regional security with their increased proxy war and contradicting strategies that are scaling up over time (Smith, 2016). A previous study argued that the region is being fought by both powers, where Iran is standing with their technocratic government in bringing total Islam rule against the Sunni regional powers led by Saudi Arabia, and directly contesting in Yemen (Moin, 1999). The issue also persists while both countries are also contesting in distributing their political influence over the regional soft power theater to create a "purist" version of Shia (Dai, 2018). This is also being influenced by the direct US-Iran standoff in Syria under Al-Assad to counter US military advancement through the work of ISIS, where Iran plays a significant role in funding the faction and shaping war tactics (Steenkamp, 2017).

In the post-Iraq 2003 war, the regional shift between Iran and Saudi intensified, with the Iranian struggle to outnumber Saudi's military power backed by the US, we can see that Iran remains far outclassed and have yet to reach quantitative advantage (Grare, 2007). With Saudi and Iran contesting in a sectarian spectrum, their political balance will remain as a zero-sum game (Wehrey, 2011). Both Riyadh and Tehran are concerning their approach to solidify relations with their actual and potential proxies that are equipable with their sectarian division (Naghizadeh, 2019). To relate this with the US – Iran context, Trump was supporting Saudi Arabia with arms and intelligence to Saudi Arabia in countering Iran's direct intervention in Yemen, as Saudi wishes to secure their border before spilling counterproductive effects to the country. Saudi perceived that Al-Hadi's regime security is far more important rather than the people's protection (Ahmed, 2019). This was also the case of the US where the complex Saudi-led coalition is also aligned with other proxies that are striving for a political balance under the Hadi's government, as it is also the recognized ruler of Yemen by the UN. The US backs up Saudi through their position at the UN Security Council to create a favorable climate, while the US is counterbalancing Iran's factions by US offensives in the Middle East to degrade every Tehran-aligned proxies.

Moving on, ISIS is a non-state enemy of the US, Israel, and Saudi Arabia and many already put their suspicion towards ISIS that has been driven by Assad that is a strong ally of Iran. The regeneration of these new fighters is perpetrating Saudi's homeland security and their political intervention, and the US is also taking a hardline stance against it by their operation in Syria, although Trump's decision to withdraw US troops gradually from Syria must've been concerned by Riyadh. The emergence of ISIS draws 2 parallel lines, either Saudi should unite the Gulf countries against ISIS to prevent Iran's momentum to gain regional power, or should they focus on circumventing both issues with the current grey attention of the Gulf leaders (Berti & Guzansky, 2014). Habitat Al-Nusra and ISIS are both Saudi's attention in advancing GCC's and Saudi's comparative advantage against Iran amidst their geopolitical inferiority (Berti & Guzansky, 2014; Kamrullah, 2017; Qurtuby & Aldamer, 2020). This is a key narrative because the Gulf countries are Saudi's only front yard against Tehran, and the Gulf is the key connectivity between Saudi and the rest of the Asia-Pacific on their oil trade.

Under the Trump administration, US-Saudi relation has been enforced by the US' unilateral ambition to counter all Iranian foreign policy pillars which are anti-western, anti-zionist, Pan-Islamist, anti-Sunni, and Pro-resistance movement through a hardline populist stance of a conservatism leader (Beck, 2019). With the rough geopolitical road to be driven on, the Trump administration is still confident that getting out of the so-called "flawed deal of the century" can support US efforts in circumventing Iran's firm stance in inserting external

aspects as part of re-negotiation substance ([Rahman, 2020](#)). The author suggests that as long as Israel is still being taken care of by the US, Iran will never regress from its ambition, and would wish for a larger influence against the US major bulwark in the region, Saudi Arabia and Israel.

JCPOA and Proxy War in the Region

After the US was leaving the JCPOA, the relation between Iran and the US is worsened, even today. The United States withdrew from the JCPOA in May 2018 after Donald Trump signed a Presidential Memorandum and imposed heavier sanctions on Iran. Many of the UN member states within the UN Security Council criticized the withdrawal of the US from the JCPOA as the deal itself was assessed by the IAEA to be effective and was conducted by the Iranian government with full compliance. Trump argued that the deal did nothing to limit Iran's ballistic missile program or its regional aggressions. Following the withdrawal, the Iranian currency value dropped significantly which led to strong anti-US sentiment in the government of Iran. The deal was still preserved with the European Union covering the spots left behind by the US, the rest of the P5+1 states managed to ease some diplomatic uncertainty of the JCPOA. However, the reality can't be avoided because the US does hold an important position that determines the fate of Iran's economic fallout caused by the sanctions. Ever since the US left JCPOA, the deal is nothing but leaving tremendous uncertainty on the Iran nuclear proliferation as multilateral forums tend to be hopeless for any inclusive political dialogue ([Bayoumy & Love, 2018](#)).

The moment the US left JCPOA under Trump's order, Iran realized the glimpse of what's worse to come, starting from the assassination of Soleimani, several heavy sanctions which crippled Iran's response to Covid-19, and weakened trade and development with the other countries. Historically and politically speaking, the increased trust deficit and lack of collaboration between the US and Iran hampered the progress of peacebuilding and stability in the Persian Gulf. The establishment of JCPOA as a tangible confidence-building measure to support peacebuilding somehow became stagnant as the commitment and lack of compliance from Iran were perceived by the United States as a threat and indicator that Iran would not compromise. In regards to nuclear development, Israel also repeatedly rejects to bound themselves to the JCPOA and even Netanyahu is still promoting anti-Iran nuclear agenda during his speech at the plenary session of the UN General Assembly. Israel may not be playing explicitly alongside other Arab countries against Iran due to Palestine, but covertly speaking they are cooperating ever since the 2019 Warsaw Conference ([Totten, 2016](#)).

To briefly digress from the US-Israel partnership, this is one of the big reasons so many hardliners in Iran oppose a nuclear agreement. Many Iranian hardliners, with skepticism of Western power and, in some cases, a disdain for Israel, have worked to derail the agreement, either implicitly or covertly, implying that the two countries will not be able to restore relations ([Morgan, 2015](#)). To understand, states' interaction in achieving a solid bargaining stance can be reached if the economic, political, and power modality is presented during the process ([Nye, 2010](#)). Another thing, a survey showed that the Saudis are perceiving Iran as larger threats compared to Israel, plus their agenda and affiliated proxies in the middle east either in Syria, Yemen, Iraq, and Lebanon are still aligned in one interest – which is to defeat Iran ([Totten, 2016](#)). However, still in the public sphere, Saudi is still reluctant to go official with their regional security cooperation with Israel although its neighbors already established 4 peace deals under the Abrahamic accord that signaled a good hope for Middle East peacemaking ([Bassist, 2021](#)).

JCPOA is indeed problematic, because when the US withdraws from the treaty – their representative stated that JCPOA is non-binding, while the Iranian delegation stated otherwise. The unclear legal claim and prejudices exercised by both countries through their unilateral stance have caused the dispute settlement mechanism in JCPOA flawed and useless

to prevent the stagnancy after the US left the treaty (Ramsey, 2016). Under the Trump administration, the US always rejected the IAEA verification that concludes with “Iran complying all standards, and the nuclear is developed for peaceful purposes”.

The whole discourse regarding JCPOA may not understand the whole unilateral reason of US withdrawal and “slander” against IAEA. The author suggests that the US withdrawal is also the key trigger of Iran’s usage of proxies in the Middle East because they are pretty much struggling in fulfilling their economic development goals. The conflictual nature of this JCPOA discourse made the US becoming more skeptical whether Iran is implying compliance or deceiving IAEA and the international community. These constructed ideas are perceived by the US to be answered with sanctions and embargoes that can break the last-standing Iranian axis and forcing them to play by the book (el Khalfi, 2020). Iran as a rational actor securitize their focal advantages to nag out US’ security in the region through its proxies, whilst thwarting the threats by US’ allies like Israel and Saudi on many fronts and dimensions – all to secure their nuclear ambition and to counterweigh Israel as the major nuclear power within the region.

US – Iran on the United Nations

Historically, Iran is also being pressed by the UN with the UN through the Security Council resolution 1929 in 2010 that called for the establishment of a UN panel of experts to assist Iran’s UN sanction committee in handling the monitoring, assessment, and reaffirmed the previous UN resolutions (namely resolution 1887 and 1540) regarding disarmament and non-proliferation. The resolution was 14 pages long and stipulated all working mechanisms, sanctions provisions, and also reaffirming that Iran should comply with its nuclear program limitation as recommended by the IAEA.

United Nations Security Council, is also being used by the actors like the US to flare up their war with Iran. The US has imposed numerous economic and political sanctions to press the regime as the United States demands Iran to stop their alleged nuclear program (in concern with the generation of nuclear weapons). The rejection of the United States towards Iran’s nuclear program also caused the involved parties in the Security Council to adjust their positions and relations regarding the region. The unavoidable clash has drawn the line where the United States agenda and Iran’s ambition against it have done a tremendous impact in hampering the multilateral solutions adopted all over time.

The worsening of relations between the US and Iran came into the spotlight in 2015 when the US alongside the Security Council and Iran implemented the Joint Comprehensive Plan of Action as a measure to dismantle Iran’s nuclear project in exchange for the lifting of sanctions. US Secretary of State Mike Pompeo stated in the UNSC Virtual Meeting on July 1st, 2020 that “...the United States realized the flawed nuclear deal and we justify our withdrawal from the nuclear deal as it was negotiated poorly by the previous administration”. Relations tend to improve when the two countries have overlapping goals, such as repelling Sunni militants during the Iraq War and the intervention against ISIS although the two sides manage to clash against each other for instance in Iraq, Syria, and the Question of Palestine-Israel Conflict agendas.

The UN Security Council resolution 2231 was a key hope in stabilizing the long-held rivalry, however, the Trump administration also carried out multiple sanctions that have been questioned by many member states in the UN. A previous legal study made it clear that the US should be consistent with its commitment to JCPOA and their withdrawal is illegal at some particular aspects of international law (Valerio Jovan, 2021). Politically, these contrary movements made by the US under the Trump administration will shed some counterproductive implications to US policies in the middle east seen by the international community, especially the US has been boasting about Iran as a global terrorist. Trump’s foreign policy is assertive, and many statements have been thrown frontally on many

occasions within the UNGA plenary, UN Security Council open debate, and press meetings.

The UN however doesn't have any adequate mechanism that can enforce international regime to de-escalate tensions caused by the state actors. The proxy wars and skirmishes among factions has been escalating US' intervention to do more bombings and other unilateral armed intervention that has been causing casualties. Numerous UN Security Council resolution adopted on the question of Iran also caused Tehran to be reluctant and keep increasing their megaphone diplomacy against the western powers. A previous study concluded that the UN Security Council sanctions on Iran aren't modest in nature and the red lines drawn from the sanction couldn't force Tehran to comply but to resist (Asadi, 2015). The sanctions also caused Iran to cope by reducing vulnerability on prone sectors while emphasizing a resistive economic style to counterweigh political pressure using illegal means. On the context of proxy war, until now there is no discussion regarding the proliferation of non-state actors nor any unilateral statement regarding it. Hence, this discourse in unilateral level is still vague as the author suggest this in a more strategic overview rather than single identification of proxies and their linkage.

CONCLUSION

The increased tension of the US and Iran will keep being proliferated until the balance of power is reached. However, the setbacks that overweigh the advantages of diplomacy seem to give the perception that this regional conflict will ends. The United States made Saudi Arabia their proxy in Yemen, we can see that Saudi Arabia and Iran play a specific role in the Gulf security architecture. This notion is linked to the Yemen Civil War. Saudi Arabia as one of the countries with tremendous different political and religious stances with Saudi Arabia did involve and had the role to determine the proceedings of the conflict since all of the warring factions were controlled by either of both countries in the domain of proxy war in the Yemen Civil War crisis.

Iran will remain as the US main enemy in the middle east, prospect of changes can be expected if Washington under the Biden administration can entertain a more sophisticated and structured alliance-building. Indeed a collaborative steps may be taken to secure the US's interest in Iran and the Gulf as a whole, however it shouldn't give Iran too much leniency to prevent Tehran from acquiring a larger headstart against US politics. Tehran should also entertain a more descriptive deal that can allow the nuclear disarmament to happen under strictest confidence. The US under Trump administration has always been very isolationist, hence the induction of political arrangements should've been carefully crafted in ensuring that Iran will comply to IAEA monitoring and satisfy the mutual interest of P5+1 states. However, with the current state of global politics, US may not put Iran as their center of foreign policy gravity due to the rising contestation with China. The Russian-Iranian bilateral relation would be scrutinized pertaining to the increasing Washington's interest in moving up again with NATO as an old ally after Trump isolates US from global security cooperation.

Outside of Yemen, the US uses Israel as their proxy, where Israel is also involved in informal cooperation with other Middle East countries. We can see that Iran is somewhat the catalyst of the Abrahamic accords. Because without Iran, those 4 Arab States will be attracted to establish their diplomatic relation with Israel that was mediated by Trump. Several implications should be considered. First, Iran and the US should reflect on Israel, Qatar, and other countries that are still putting their sponsorship towards the ongoing conflict in the middle east such as Yemen and Syria. These countries became the major driver of Iran and the US's main political agenda. Second, Israel will become a major player if they managed to succeed in the diplomatic relation establishment with the rest of Arab countries as it will trigger division within the GCC – that might weaken Iran's position and leverage within the GCC. Lastly, the Trump administration's support to key players like Saudi and Israel is based on identities and political economy cooperation over the middle east. Therefore, with the new

Biden administration, it should be concerned regarding what's next for the middle east after Trump's assertive foreign policy in defending their allies against Iran through bilateral manner.

REFERENCES

- Acharya, A. (2007). The Emerging Regional Architecture of World Politics. *World Politics*, 59(4), 629–652. <https://doi.org/10.1353/wp.2008.0000>
- Ahmed, N. (2019). Yemeni Civil War: Causes, Consequences And Prospects. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 2(2), 82–91. <https://doi.org/10.36341/jdp.v2i2.943>
- Amnesty International. (2019). *Review of human rights in the Middle East and North Africa*. Retrieved July 8, 2021, from <https://www.amnesty.org/en/latest/research/2019/02/human-rights-in-the-middle-east-and-north-africa-2018/>
- Asadi, T. (2015). On the Effectiveness of UN Security Council Sanctions: HSE Approach to the Case of Iran. *Actual Problems of Economics: Scientific Economic Journal*, 11(173), 21–31. https://www.researchgate.net/publication/291699416_On_the_effectiveness_of_UN_security_council_sanctions_HSE_approach_to_the_case_of_Iran
- Baron, A., & Al-Hamdani, R. (2019, December 10). *The “Proxy War” Prism on Yemen*. New America. <https://www.newamerica.org/international-security/reports/the-proxy-war-prism-on-yemen/>
- Bassist, R. (2021, March 29). *Chances for Israeli alliance with Saudis against Iran fading*. Al-Monitor: The Pulse of the Middle East. <https://www.al-monitor.com/originals/2021/03/chances-israeli-alliance-saudis-against-iran-fading>
- Basundoro, A. F. (2020). Perang Proksi Kontemporer Arab Saudi-Iran Sebagai Bentuk Turbulensi Timur Tengah: Sebuah Analisis Geopolitik. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(1), 1–16. <https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.847>
- Bayoumy, Y. B. L., & Love, B. (2018, May 10). *Europeans work to save Iran deal, and business, after Trump pulls out*. U.S. <https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear/europeans-work-to-save-iran-deal-and-business-after-trump-pulls-out-idUSKBN1I90D6>
- BBC News. (2018, May 9). *Iran nuclear deal: Trump pulls US out in break with Europe allies*. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44045957>
- Beck, M. (2019). US Middle East Policy Shift: Trump's Administration Divergency. *RUDN Journal of Public Administration*, 6(4), 296–311. <https://doi.org/10.22363/2312-8313-2019-6-4-296-311>
- Berti, B., & Guzansky, Y. (2014). Saudi Arabia's Foreign Policy on Iran and the Proxy War in Syria: Toward a New Chapter? *Israel Journal of Foreign Affairs*, 8(3), 25–34. <https://doi.org/10.1080/23739770.2014.11446600>

- Brzezinski, Z. (2016, February 10). *From Hope to Audacity Appraising Obama's Foreign Policy*. Foreign Affairs. <https://www.foreignaffairs.com/articles/2009-12-11/hope-audacity>
- Buzan, B., & Waever, O. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Society*. Cambridge: The Press Syndicate of the University of Cambridge.
- Dadandish, P., & Kouzehgar, K. J. (2010). A Critical Study of Regional Security Complex Theory by Using the Security Environment of South Caucasus. *Rahbord*, 19(56), 73-107. <https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=188895>
- Dai, H. (2018, August 31). *Middle Eastern Interventions in Africa: Tehran's Extensive Soft Power*. Middle East Forum. <https://www.meforum.org/7254/middle-eastern-interventions-in-africa-tehran>
- Dunn, D. H. (2007). 'Real men want to go to Tehran': Bush, pre-emption and the Iranian nuclear challenge. *International Affairs*, 83(1), 19–38. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2007.00601.x>
- Ekşi, M. (2017). Regional Hegemony Quests in the Middle East from the Balance of Power System to the Balance of Proxy Wars: Turkey as Balancing Power for the Iran - Saudi Rivalry. *Gazi Akademik Bakış*, 11(21), 133–156. <https://doi.org/10.19060/gav.379597>
- El-Katiri, M. (2014). *United States-Gulf Cooperation Council Security Cooperation in A Multipolar World*. Carlisle: US Army War College Press. <http://www.jstor.org/stable/resrep11893>
- el Khalfi, M. A. (2020). AGREEMENT ON THE JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) BETWEEN IRAN AND THE UNITED STATES. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 7(2), 183. <https://doi.org/10.26532/jph.v7i2.11296>
- Grare, F. (2007). The Evolution of Sectarian Conflicts in Pakistan and the Ever-Changing Face of Islamic Violence. *South Asia: Journal of South Asian Studies*, 30(1), 127–143. <https://doi.org/10.1080/00856400701264068>
- Hussain, N. (2015). US-Iran Relations: Issues, Challenges and Prospects. *Policy Perspectives*, 12(2), 29–47. <https://doi.org/10.13169/polipers.12.2.0029>
- Kamrullah, M. R. N. (2017). Peran Jabhat Al-Nusra dalam Memberikan Tantangan terhadap Kebijakan Amerika Serikat Mendukung Kelompok Oposisi pada Konflik Bersenjata di Suriah. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 19(2), 77. <https://doi.org/10.7454/global.v19i2.287>
- Katzman, K., Mcinnis, K., & Thomas, C. (2020, May 8). *U.S.-Iran Conflict and Implications for U.S. Policy*. CRS Reports. <https://www.everycrsreport.com/reports/R45795.html>
- Lee, L. (2020). *The Yemen crisis and civil society: surviving the despite odds*. *Humanitarian Exchange*, <https://odihpn.org/magazine/yemen-crisis-civil-society/>
- Marsheimer, J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W. W. Norton.

- Mirhosseini, S. M. (2014). Evolution of Dual Containment Policy (the Policy of Clinton's Administration - Clinton's Doctrine) in the Persian Gulf. *Sociology and Anthropology*, 2(3), 106–112. <https://doi.org/10.13189/sa.2014.020305>
- Moin, B. (1999). *Life of the Ayatollah*. New York: Thomas Dunne Books.
- Morgan, C. (2015). US - Iran Relations: A History of Covert Action and a Promising Future. *The Cohen Journal*, 2(1). Diambil kembali from <https://digitalcommons.library.umaine.edu/tcj/vol2/iss1/1>
- Mumford, A. (2013). *Proxy Warfare: War and Conflict in the Modern World*. Cambridge: Polity Press.
- Naghizadeh, M. (2019). Rivalry Through Proxies: How Iran and Saudi Arabia Compete For Regional Influence. *St Antony's International Review*, 137-153. https://www.researchgate.net/publication/335977824_Rivalry_through_proxies_How_Iran_and_Saudi_Arabia_compete_for_regional_influence_-_St_Antony's_International_Review
- Nakhavali, M. (2013). Diplomatic, Consular and Political Relations Between Iran and United States. *European Scientific Journal*, 9(14), 49-63. <https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/1069/1103>
- Nuruzzaman, M. (2012). Conflicts between Iran and the Gulf Arab States: An Economic Evaluation. *Strategic Analysis*, 36(4), 542–553. <https://doi.org/10.1080/09700161.2012.689512>
- Nye, J. (2010, June 14). *East Asian Security: The Case for Deep Engagement*. Foreign Affairs. <https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/1995-07-01/east-asian-security-case-deep-engagement>
- Qurtuby, S. A., & Aldamer, S. (2020). Terrorism and Counterterrorism in Saudi Arabia. *Contemporary Review of the Middle East*, 8(1), 56–76. <https://doi.org/10.1177/2347798920976286>
- Rahman, M. (2020). CURRENT PHENOMENON TENSION OF THE UNITED STATES AND IRAN IN THE MIDDLE EAST. *Journal of Islamic World and Politics*, 4(1), 31–47. <https://doi.org/10.18196/jiwp.4143>
- Ramsey, M. D. (2016). Evading the Treaty Power?: The Constitutionality of Nonbinding Agreements. *FIU Law Review*, 11(2). <https://doi.org/10.25148/lawrev.11.2.9>
- Rauta, V. (2018). A structural-relational analysis of party dynamics in proxy wars. *International Relations*, 32(4), 449–467. <https://doi.org/10.1177/0047117818802436>
- Roberts, D., & Borger, J. (2017, December 1). *Obama holds historic phone call with Rouhani and hints at end to sanctions*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2013/sep/27/obama-phone-call-iranian-president-rouhani>
- Sauer, T. (2007). *Coercive Diplomacy by the EU: The Case of Iran*. The Hague: Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'.

- Scott, C. V. (2000). Bound for Glory: The Hostage Crisis as Captivity Narrative in Iran. *International Studies Quarterly*, 44(1), 177–188. <https://doi.org/10.1111/0020-8833.00153>
- Seymour, L. J. M. (2013). Let's Bullshit! Arguing, Bargaining and Dissembling Over Darfur. *SSRN Electronic Journal*, 20(3). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2386522>
- Smith, J. B. (2016, January 5). *Former U.S. Ambassador: What the Saudi Arabia-Iran Conflict Means for Stability*. Time. <https://time.com/4167026/saudi-arabia-iran-conflict-and-stability/>
- Steenkamp, C. (2017). The Crime-Conflict Nexus and the Civil War in Syria. *Stability: International Journal of Security and Development*, 6(1). <https://doi.org/10.5334/sta.522>
- Totten, M. J. (2016). The New Arab–Israeli Alliance. *World Affairs*, 179(2), 28–36. <https://doi.org/10.1177/0043820016673779>
- Trevithick, J. (2019, May 14). *U.S. Government Claims Iran Is Behind Attacks On Oil Tankers, But Has Yet To Show Evidence*. The Drive. <https://www.thedrive.com/the-war-zone/27992/u-s-government-claims-iran-is-behind-attacks-on-oil-tankers-but-has-yet-to-show-evidence>
- Valerio Jovan, C. (2021). THE UNITED STATES UNILATERAL WITHDRAWAL FROM THE RESTRICTIONS OF IRAN'S NUCLEAR PROGRAM IN JCPOA 2015 UNDER INTERNATIONAL LAW. *Padjadjaran Journal of International Law*, 4(2), 247–264. <https://doi.org/10.23920/pjil.v4i2.414>
- Wahyuni, S., & Baharuddin, S. S. (2017). The Impact of GCC Boycott on Qatar Foreign Policy. *Jurnal Transformasi Global*, 4(2), 80–89. <https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/71>
- Walt, S. M. (1987). *Origins of Alliance*. Ithaca: Cornell University Press.
- Wehrey, F. (2011). Uprisings Jolt the Saudi-Iranian Rivalry. *Current History*, 110(740), 352–357. <https://doi.org/10.1525/curh.2011.110.740.352>
- Wintour, P. (2017, November 28). *Qatar diplomatic crisis – what you need to know*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2017/jun/05/qatar-diplomatic-crisis-what-you-need-to-know>
- Yee, V. (2019, May 15). *Yemen's Houthi Rebels Attack Saudi Oil Facilities, Escalating Tensions in Gulf*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2019/05/14/world/middleeast/saudi-oil-attack.html>
- Yeganeh, H. (2011). The “Great Satan” talks with the “Evil.” *International Journal of Conflict Management*, 22(3), 219–238. <https://doi.org/10.1108/10444061111152946>



Strategi Advokasi Masyarakat Sipil dalam Mendesak Pembatalan Revisi Regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi

M. Ezha Fachriza Roshady^{1*}, Sri Budi Eko Wardhani¹

¹Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 10430, Jakarta-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Mei 31, 2021

Diterima: Juli 29, 2021

Dipublikasi: Jul 31, 2021

Kata Kunci:

Advokasi; KPK; Koalisi Masyarakat Sipil;

Koresponden:

M. Ezha Fachriza Roshady

Departemen Ilmu Politik,
Universitas Indonesia

Email:

ezhafr@gmail.com

Sitasi Cantuman:

Roshady, M. E. F. & Wardhani, S. B. E. (2021). Strategi Advokasi Masyarakat Sipil dalam Mendesak Pembatalan Revisi Regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi. *Journal of Political Issues*. 3(1); 49-61. <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i1.54>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v3i1.54>

Lisensi:



Attribution-
NonCommercial-ShareAlike
4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This study aims to describe the strategy of civil society movements that are members of the anti-corruption civil society coalition. This study uses the advocacy theory of Sheldon Gen and Amy Conley Wright. The research method used is qualitative with primary data sources from interviews, and secondary data processing from various literatures relevant to this research. The anti-corruption civil society coalition controls state power by demanding that the government and the DPR be accountable to the law and the public by supporting the Corruption Eradication Commission (KPK) by not weakening the KPK institutions, and increasing public awareness of important public issues through advocacy, in this case the discourse on the Law. KPK which was revised by the DPR. In 2019 the momentum for the revision of the KPK Law was successfully carried out by the DPR together with the Government so that the advocacy carried out by the coalition failed. The anti-corruption civil society coalition adopts an advocacy strategy by strengthening a large coalition, lobbying policy makers, conducting academic studies, and labeling, media reporting, and involving and mobilizing the public in carrying out movements. Of the five advocacy strategies, in the end, it has strengths and weaknesses to carry out a social movement in influencing the policy on the revision of the KPK Law, but in the end the advocacy strategy carried out by the anti-corruption civil society coalition failed to influence policy makers and in 2019, the Law The KPK was revised on 17 September 2019.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil antikorupsi. Penelitian ini menggunakan teori advokasi dari Sheldon Gen dan Amy Conley Wright. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara, dan pengolahan data sekunder dari berbagai berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mengontrol kekuasaan negara dengan menuntut pemerintah dan DPR bertanggung jawab kepada hukum dan publik dengan mendukung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan tidak melemahkan kelembagaan KPK, dan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu penting publik melalui advokasi, dalam hal ini wacana UU KPK yang direvisi oleh DPR. Pada tahun 2019 momentum revisi UU KPK berhasil dilakukan DPR bersama Pemerintah sehingga advokasi yang dilakukan oleh koalisi gagal. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mengadopsi strategi advokasi dengan memperkuat sebuah koalisi besar, melobi pengambil kebijakan, melakukan kajian akademik, dan pelabelan, pemberitaan media, dan melibatkan serta memobilisasi publik dalam melakukan gerakan. Dari kelima strategi advokasi tersebut, pada akhirnya memiliki sisi kekuatan dan kelemahan untuk melakukan sebuah gerakan sosial dalam mempengaruhi kebijakan revisi UU KPK yang namun pada akhirnya strategi advokasi yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi tidak berhasil mempengaruhi para pemangku kebijakan dan pada tahun 2019, UU mengenai KPK telah direvisi pada 17 September 2019.

Tentang:

M. Ezha Fachriza Roshady, merupakan mahasiswa S-2 di Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2021.

Sri Budi Eko Wardhani telah menyelesaikan studi S-3 di Pasca Sarjana Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis saat ini bekerja sebagai Sekretaris Prodi Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.

PENDAHULUAN

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hal yang sejalan dengan *setting* demokrasi sebagaimana dicita-citakan agenda Reformasi sejak 1998, ketika Indonesia menghadapi krisis finansial yang berakhir pada krisis multidimensial menjadi faktor utama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Di satu sisi, ada usaha untuk mendorong terjadinya perubahan karakter kekuasaan dari otoriter menuju demokrasi. Di sisi lainnya, ada upaya untuk membangun rezim hukum antikorupsi dari berbagai aspeknya. Salah satu isu utama yang menjadi agenda gerakan reformasi dan sekaligus menjadi perhatian publik adalah pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN penuntasan berbagai kasus korupsi yang menjadi bagian dari rezim otoritarian Orde baru, pembangunan sistem, dan upaya untuk meminimalisir berbagai potensi korupsi pada pemerintahan yang akan datang (Widjajanto dan Hadjar, 2020), oleh karena itu KPK merupakan amanat dari reformasi yang perlu didukung oleh semua pihak, khususnya kelompok masyarakat sipil yang telah berhasil mendorong terbentuknya UU KPK.

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri pada tahun 2003 hingga 2018, KPK telah memproses sejumlah 119 kepala daerah tersangka kasus korupsi; 247 anggota lembaga legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 4 orang ketua umum partai politik (parpol); 238 pihak swasta dan 5 kasus yang melibatkan korporasi (Nailufar, 2019). Citra Indonesia di mata dunia pun tidak menunjukkan perbaikan signifikan mengenai pemberantasan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dipublikasikan Transparency International tahun 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat 85 dari total 180 negara, naik sedikit dari tahun 2018 yang berada di peringkat 89. Bahkan di tahun 2020 IPK Indonesia mengalami penurunan angka dengan nilai 37, dan menduduki posisi 102 dari 180 negara yang disurvei oleh Transparency International. Padahal semangat cita-cita Reformasi pada 1998 bertujuan untuk mewujudkan negara yang terbebas dari berbagai praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai fokus agenda utama.

Usulan untuk merevisi UU KPK pada 2019 bukan merupakan fenomena yang baru pertama kali terjadi, akan tetapi telah ada sejak periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat di tahun 2010. Menurut studi Permata (2017), sejak usulan revisi UU KPK pada tahun 2010 hingga tahun 2016 digulirkan oleh DPR maupun Pemerintah, salah satu kelompok masyarakat sipil (*Civil Society*) yang gencar menolak revisi UU KPK salah satunya ialah ICW (Indonesia Corruption Watch). ICW pada tahun 2010 melakukan berbagai upaya dalam hal mengadvokasi penolakan terhadap wacana revisi UU KPK bersama dengan berbagai kelompok masyarakat yang melakukan gerakan kolektif dengan nama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Permata, 2017). Strategi advokasi dengan membangun koalisi agar dapat saling berkoordinasi, serta bertukar pikiran dengan individu atau organisasi yang memiliki kesamaan tujuan dikemukakan oleh Gen dan Wright (2013), Koalisi dibentuk juga untuk membangun legitimasi publik terhadap isu yang diadvokasikan. Koalisi tersebut telah terbentuk sejak fenomena kasus KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau yang dikenal dengan fenomena "*Cicak Versus Buaya*". Kehadiran Koalisi masyarakat sipil antikorupsi bertujuan untuk menolak revisi UU KPK karena dianggap salah satu bentuk pelembaan terhadap KPK secara kelembagaan (Permata, 2017).

Wacana pertama sejak 2010 memiliki dinamika cukup panjang, misalnya pada 16 Desember 2011 DPR menyepakati 644 RUU termasuk RUU KPK yang menjadi pembahasan dalam agenda program prioritas legislasi nasional (prolegnas) tahun 2012. Pada 4 Oktober 2012 Komisi III DPR sepakat melanjutkan revisi UU KPK. Kemudian pada 16 Oktober 2012 kesepakatan itu berakhir dengan putusan Panitia Kerja (Panja) revisi UU KPK akibat desakan oleh kelompok masyarakat sipil, sehingga beberapa Fraksi DPR yang sebelumnya mendukung revisi, setelah terjadinya gerakan dari kelompok masyarakat sipil berubah

menjadi menolak. Sidang paripurna berlangsung dengan putusan yaitu revisi UU KPK dibatalkan (Rastika, 2019).

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, tepatnya 23 Juni 2015, diadakan rapat paripurna DPR untuk memasukkan kembali revisi UU KPK ke prolegnas. Namun pada 7 Oktober 2015 terdapat penolakan oleh KPK terkait wacana DPR yang akan memasukkan kembali agenda revisi UU KPK ke prolegnas, bahkan Ketua KPK Agus Rahardjo mengancam akan mengundurkan diri jika wacana tersebut tetap dilanjutkan DPR maupun Pemerintah. Sehingga pada 11 Februari 2016 ada pembatalan agenda rapat di DPR untuk membahas revisi UU KPK dikarenakan Fraksi Gerindra dan Demokrat menolak wacana tersebut. Ketika muncul wacana revisi, koalisi melakukan berbagai upaya dalam memobilisasi publik menjadi sebuah gerakan. Misalnya pada wacana revisi UU KPK tahun 2015, Koalisi Masyarakat Sipil melakukan beberapa aksi mobilisasi publik, di antaranya aksi membangun 'Museum KPK' (8 Oktober 2015); Aksi Kentongan (16 Februari 2016); memberikan replika korek kuping raksasa kepada anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat (17 Februari 2016); aksi damai menolak rencana revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (22 Februari 2016); dan mengumpulkan tanda tangan Guru Besar pada 21 Februari 2016 (Permata, 2017).

Pada 10 Januari 2017, DPR menetapkan prolegnas yang terdiri atas 50 RUU. Namun, revisi UU KPK tidak termasuk di dalamnya karena Pemerintah menyatakan akan menarik diri dari pembahasan jika revisi bertujuan untuk memperlemah KPK. Komitmen tersebut muncul pada 15 Februari 2018 melalui Bambang Soesatyo selaku Ketua DPR yang memastikan bahwa DPR tidak akan mendorong rekomendasi revisi UU KPK. Akan tetapi setahun setelahnya komitmen tersebut dilanggar. Pada 2019, wacana revisi UU KPK secara tiba-tiba, tanpa sepengetahuan koalisi masyarakat sipil antikorupsi, dilakukan proses pembahasan secara cepat dalam kurun waktu 14 hari sejak wacana mengemuka hingga disahkan melalui Rapat Paripurna DPR RI pada 17 September 2019. Revisi atas UU Nomor 30 Tahun 2002 telah disepakati DPR bersama Pemerintah. Revisi tersebut terjadi di tengah protes keras dari berbagai kelompok masyarakat, salah satunya ialah koalisi masyarakat sipil antikorupsi yang terdiri dari berbagai elemen, di antaranya Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK), Kelompok Mahasiswa dan Pelajar hingga berbagai akademisi dan lembaga dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia (Fahmilda & Prastiyono, 2019).

Perdebatan pada tahun 2019 bagi koalisi, pelemahan terhadap KPK terdapat di dalam point draft usulan perubahan UU KPK yang diusulkan oleh DPR, yaitu melalui berbagai pasal yang dianggap bukan untuk memperkuat KPK, akan tetapi kebalikannya. Hal tersebut tercantum pada draft rancangan revisi UU KPK yang menjelaskan bahwa KPK masuk ke dalam struktur kekuasaan eksekutif, hal tersebut justru akan memperlemah independensi KPK yang seharusnya menjadi lembaga yang independen terlepas dari struktur kekuasaan negara. Hadirnya kelembagaan baru seperti Dewas KPK yang memiliki kewenangan berlebih, kewenangan KPK untuk menerbitkan SP3, Alih Status Pegawai KPK menjadi ASN hingga menutup kemungkinan KPK membentuk lembaga perwakilan di daerah, padahal kasus korupsi besar banyak ditemukan hingga ke berbagai daerah di seluruh Indonesia (Ramadhana & Oktaryal, 2020). Atas dasar permasalahan tersebut, kelompok masyarakat sipil membentuk aksi kolektif dalam mendesak DPR dan Pemerintah untuk membatalkan niat untuk merevisi UU KPK dengan melakukan gerakan sosial.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat tema tersebut untuk dilakukan telaah lebih dalam, menggali informasi mendalam dan menganalisa sejauh mana Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi berusaha bergerak dalam mengadvokasi desakan untuk membatalkan revisi UU KPK pada tahun 2019. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui strategi advokasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam sebuah kekuatan gerakan kolektif yaitu koalisi antikorupsi, selain itu

penelitian ini mengidentifikasi kelompok masyarakat sipil sebagai kelompok penekan yang berada di luar pemerintahan dalam mempengaruhi segala bentuk proses legislasi yang dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam hal ini legislasi mengenai pemberantasan korupsi yang hari ini masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Atas dasar permasalahan tersebut, peneliti mencoba merumuskan pertanyaan yaitu: Bagaimana strategi advokasi yang dilakukan koalisi masyarakat sipil antikorupsi pada tahun 2019 dalam mendesak pembatalan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, dengan menggunakan metode kualitatif tujuan dan kebutuhan penelitian ini dapat terpenuhi. Creswell memaparkan bahwa untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana” kecocokan untuk dapat memaknai penyebab sebuah kondisi atau peristiwa politik yang terjadi (Creswell, 2010). Peneliti mengumpulkan berbagai data antara lain data primer dan data sekunder, data primer didapatkan melalui proses wawancara yang peneliti lakukan dengan para narasumber yang berkaitan dengan topik permasalahan penelitian, kemudian direkam dan dicatat oleh peneliti (Sarwono, 2006). Teknik analisis yang digunakan menjelaskan data yang diperoleh dari hasil wawancara sebagai data primer, yang selanjutnya direduksi dan dimasukkan ke dalam pola, kategori, fokus, atau tema tertentu yang sesuai (Faisal, 2010).

Setelah memperoleh data mengenai permasalahan dan strategi advokasi yang dilakukan oleh koalisi dalam melakukan penolakan terhadap revisi UU KPK, maka dianalisis menggunakan teori mengenai advokasi gerakan. Metode penentuan responden dalam wawancara yang digunakan ialah teknik kesesuaian, yaitu teknik pemilihan informan yang dianggap sesuai oleh peneliti (Sarwono, 2006). Informan dalam hal ini tentunya pihak dari koalisi masyarakat sipil antikorupsi seperti Kurnia Ramadhana sebagai Divisi Hukum ICW, Asfinawati Direktur YLBHI, Bivitri Susanti dari PSHK, Wawan Suyatmiko dari Transparency International Indonesia (TII). Selanjutnya merupakan data sekunder dengan melalui studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu, dan berbagai bahan penelitian lain (Sarwono, 2006). Berbagai dokumen tersebut dapat berupa koran cetak maupun elektronik, laporan kantor, makalah; ataupun dokumen privat seperti buku harian, *diary*, surat, email (Creswell, 2010). Contoh dokumen-dokumen yang digunakan diantaranya berupa pasal-pasal yang terkandung di dalam UU. Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK serta perubahan keduanya UU. Nomor 19 tahun 2019, dan juga bentuk dokumen lainnya yang berguna untuk menambah dan memperkuat data-data yang tidak diperoleh dari observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koalisi masyarakat sipil antikorupsi memperjuangkan tuntutan dalam upaya mendesak revisi UU KPK tidak dilakukan dengan melakukan beberapa strategi advokasi. Adapun urutan strategi advokasi yang dilakukan koalisi terhadap revisi UU KPK sejalan dengan pendekatan teori advokasi masyarakat sipil yang dikemukakan oleh Gen & Wright (2013) yaitu dengan melakukan penelitian atau kajian akademik; melakukan lobi dan membangun hubungan dengan pembuat kebijakan; membangun *framing*; melakukan liputan media; serta kelompok masyarakat sipil yang tergabung ke dalam koalisi mencoba untuk memperluas jejaring dalam melakukan gerakan sosial sebagai salah satu strategi advokasi dalam menolak usulan revisi UU KPK pada tahun 2019.

Melakukan Kajian atau Analisis Kebijakan

Strategi advokasi yang dilakukan koalisi terhadap revisi UU KPK yang pertama ialah melakukan penelitian atau analisis kebijakan. Selain melobi pemerintah, koalisi juga melakukan penelitian atau analisis kebijakan. Hal ini sejalan penelitian Ridwan (2012), dimana tipe LSM advokasi yang kesibukan utamanya adalah membuat pengumpulan data dan riset terhadap isu korupsi dan dilanjutkan dengan melobi pemerintah dan media.

Dalam hal ini Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi membuat kajian revisi UU KPK, yang didalamnya menemukan poin-poin yang lebih mendorong upaya pelemahan KPK daripada memperkuat KPK. Kajian yang dilakukan oleh koalisi tentu mengundang para ahli (*expert*) untuk dihadirkan dalam mengkritisi revisi UU KPK. Isi dari kajian tersebut ialah analisis hukum terkait kebijakan dalam hal ini revisi UU KPK serta implikasinya jika revisi undang-undang KPK disahkan, dan pernyataan sikap koalisi masyarakat sipil mengenai revisi UU KPK. Kajian berbentuk *policy paper* dan *policy brief*. Sebagaimana yang dilakukan oleh TII yang masuk ke dalam NGO yang tergabung ke dalam koalisi bahwa TII bekerja di dalam koalisi dan mendukung dari sisi kajian :

“Ketika revisi UU KPK bergulir, kita melakukan berbagai kajian, riset dan sebagainya. Kemudian kajian riset itu digunakan dasar oleh kawan-kawan yang lain untuk mengorganisir kelompok-kelompok yang lain untuk terlibat lebih inklusif, atau dengan ICW misalnya yang advokasi di bagian media gitu ya, atau mungkin teman-teman jaringan player yang ikut melakukan pembelaan, bagi beberapa staf personel dan sebagainya saat dilakukan kriminalisasi. Jadi TI lebih kearah membuat kajian atau riset terkait bagaimana revisi UU KPK, dan tentunya karena kami fokusnya di riset, kami juga banyak bekerja sama dengan pusat kajian, Pusat kajian antikorupsi (Pukat UGM), pusat kajian konstitusi (Pusako Andalas) dan sebagainya terkait hal ini.” (Wawancara Wawan Suyatmiko 18 Maret 2021).

Ketika ingin melakukan kajian terhadap permasalahan revisi UU KPK, koalisi masyarakat sipil antikorupsi sempat mengalami kendala untuk mendapatkan draft rancangan revisi. Kemudian meminta pada KPK yang juga tidak mendapatkan secara resmi draft dari DPR, dan Kemenkumham untuk mencari draft tersebut, sebagaimana dikatakan Direktur Transparency International Indonesia :

“Koalisi masyarakat sipil sendiri dalam melakukan kajian draft yang beredar, karena sejujurnya bahkan KPK sendiri saja tidak mendapatkan draft resmi dari DPR dan Kemenkumham, sehingga kami koalisi dan juga dengan KPK, karena KPK waktu itu masuk dalam kualifikasi, bahkan walaupun dia lembaga negara masuk dalam koalisi, sehingga kami mendesak, mendorong KPK untuk mencari draftnya, karena bagaimanapun juga draft ini yang penting. Kemudian kami melakukan kajian begitu ya, kajian-kajian dan kemudian dari kajian-kajian ditemukan sejumlah pasal yang melemahkan. Kalau menurut kajian baik itu dari berbagai sumber termasuk dalam TI, Pukat dan KPK sendiri tuh menemukan ada 26 pasal yang melemahkan KPK atau yang mengubah KPK menjadi tidak powerfull lagi, sehingga dari situ kita melakukan kajian yang lebih detail dan mengadvokasikan bahwa itulah yang membuat KPK hari ini menjadi tidak se-power yang sebelum direvisi” (Wawancara Wawan Suyatmiko 18 Maret 2021).

Melakukan Lobi dengan Pemerintah dan DPR

Strategi advokasi selanjutnya yang dilakukan koalisi masyarakat sipil antikorupsi yaitu melakukan lobi kepada Anggota DPR Periode 2014 – 2019 khususnya di Komisi III, seperti Trimedya Pandjaitan (Fraksi PDI-Perjuangan). Selain itu koalisi juga melakukan audiensi serta membangun hubungan komunikasi dengan pemerintah melalui Kementerian Hukum

dan HAM mengenai penolakan terhadap revisi UU KPK yang diinisiasikan oleh DPR RI pada tahun 2019.

“Iya, kita menggunakan itu (berkomunikasi ke Pemerintah), kita bertemu dengan beberapa orang membahas capim, soal revisi, tapi ngga berbuah apa-apa. Jadi mereka juga tidak bisa bergerak banyak dan jaringannya NGO itu kan bukan key person dalam partai politik, karena itu ketua umum. Jadi mungkin keinginan kita sama ya, tapi tidak punya kekuatan untuk melawan itu.” (Wawancara dengan Kurnia Ramadhana (ICW) pada 3 Maret 2021).

Hal senada juga diungkapkan Perwakilan TII yang juga terlibat di dalam koalisi, bahwa pertama koalisi telah melakukan berbagai upaya berkomunikasi dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar pemerintahan, namun pola komunikasi hanya sebatas di lingkup kecil jejaring anggota DPR yang dimiliki oleh koalisi saja dan umumnya para anggota DPR tersebut ialah mantan aktivis dari kelompok masyarakat sipil, bukan kepada pimpinan partai politik. Selain itu koalisi masyarakat sipil antikorupsi sangat menyayangkan orientasi yang dimiliki oleh para mantan aktivis yang kini menduduki posisi di eksekutif maupun legislatif telah minim idealisme untuk turut melakukan penolakan terhadap revisi UU KPK.

“Hari ini ketika KPK dilemahkan mereka cukup diam saja, enggak banyak bergerak, dengan alasan kami kalah, jadi benar mereka sudah tunduk pada oligarki. Akhirnya mentoknya mereka akan bilang ada oligarki yang baik, ada oligarki yang jelek. Bilang saja orientasinya sudah ke kekuasaan, selesai. Jadi, sudah tidak usah lagi membawa nama-nama mantan aktivis gitu loh” (Wawancara dengan Wawan Suyatmiko pada 18 Maret 2021).

Pasca disahkannya revisi UU No. 30 Tahun 2002 yang bertepatan pada 17 September 2019 terdapat aksi dari kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) yang reaktif untuk mendaftarkan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait direvisinya UU KPK. Namun, menurut salah satu mahasiswa FH UI memberikan keterangan pada penulis bahwa ia sempat disarankan oleh seorang pegiat antikorupsi dari ICW untuk menunda proses *judicial review* ke MK dikarenakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi ingin mencoba melakukan lobi politik kepada Presiden untuk mengeluarkan Perppu terkait pengesahan revisi UU KPK yang terjadi 17 September 2019.

“Jadi saat itu kita menyuarakan Perppu ke Presiden, karena itu sudah disahkan dan tinggal diundangkan tanggal 17 Oktober. Presiden mengundang berbagai tokoh hukum, itu ada puluhan orang ada beberapa mantan pimpinan KPK juga dan sempat mengutarakan, ingin mengeluarkan Perppu. Maka dari itu strategi kami kemarin tidak langsung mengajukan JR, agar Presiden tidak punya legitimasi untuk menolak Perppu tersebut. Ternyata ada teman-teman mengajukan JR ke MK, iya kita ya ngga sepakat dengan strategi mereka. Jadi dugaan kita benar, ketika mereka daftarkan JR itu, itu langsung direspon oleh pemerintah tidak perlu lagi Perppu karena sudah ada yang JR, kita kembalikan ke persidangan di MK.” (Wawancara dengan Kurnia Ramadhana).

Dalam melakukan strategi advokasi, koalisi masyarakat sipil antikorupsi sulit membendung pola gerakan yang juga dilakukan oleh masyarakat secara luas. Contohnya dari kalangan Mahasiswa FH UI yang telah reaktif mendaftarkan *judicial review* revisi UU KPK ke MK, padahal secara teknis belum ada penomoran terhadap revisi UU KPK, sehingga

membuat kurang terkoordinasinya antara gerakan koalisi dengan gerakan masyarakat di luar koalisi.

“Iya, berarti kita tidak bisa kontrol, karena menjadi isu nasional. Salah satu kelemahan koalisi, karena susah kan ya kalau kita kontrol. Kalau dikontrol anak-anak UI atau masyarakat biasa misalnya, atau pemerintah menyiapkan pemohon-pemohon tertentu agar bisa menjadi legitimasi mereka. Kita sudah mengingatkan persuasi, tapi ternyata mereka tetap bersikeras.” (Wawancara dengan Kurnia Ramadhana).

Pada usulan revisi UU KPK tahun 2019 ruang gerak koalisi untuk membangun komunikasi dengan legislatif dan eksekutif sangat dibatasi, tidak adanya undangan rapat dengar pendapat dan proses kilat yang dilakukan oleh DPR RI membuat koalisi tidak mudah untuk mendesak dan melobi pihak DPR yang sengaja tidak melibatkan peran serta koalisi masyarakat sipil agar upaya untuk menggoalkan revisi UU KPK berjalan dengan mulus tanpa ada hambatan, hal ini menjadi pembeda dari strategi advokasi yang dilakukan oleh koalisi pada usulan revisi UU KPK tahun-tahun sebelumnya.

Melakukan Framing

Selain melobi pemerintah dan DPR, koalisi masyarakat sipil antikorupsi yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang bergerak sebagai LSM advokasi juga melakukan lobi atau membangun hubungan dengan media. Mengacu kepada McAdam dan Snow (1997) fungsi dari *frame* untuk dapat memahami suatu peristiwa atau keadaan, yaitu mengorganisasi pengalaman dan memandu tindakan, baik individu atau kolektif. Sebagai pemahaman, *frame* merupakan tindakan kolektif yang memusatkan perhatian pada situasi tertentu yang dianggap bermasalah, membuat atribusi mengenai siapa atau apa yang harus disalahkan, dan dengan kata lain, fungsi utama *frame* dalam tindakan kolektif merupakan bagian dari usaha pengikut gerakan untuk menegosiasikan pemahaman tentang beberapa kondisi atau situasi bermasalah yang mereka definisikan sebagai kebutuhan akan perubahan, keterkaitan mengenai siapa atau apa yang harus disalahkan, ungkapkan beberapa pengaturan alternatif, dan dorong orang lain untuk bertindak secara bersamaan untuk mempengaruhi perubahan (Benford dan Snow, 2000).

Terkait revisi UU KPK tahun 2019, pesan yang di-*framing* oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi adalah telah terjadinya upaya untuk melemahkan lembaga pemberantasan korupsi melalui revisi undang-undang yang akan disahkan DPR bersama Pemerintah. Bagi koalisi terdapat 6 permasalahan yang telah penulis jelaskan sebagai pengantar dalam bab ini. Kemudian pada saat revisi UU KPK tahun 2019, koalisi turut membentuk *hashtag* dukungan seperti #SaveKPK dan #reformasidikorupsi untuk dapat dipublikasikan ke masyarakat luas. Tujuan *framing* dengan menggunakan *hashtag*, agar dapat diterima publik secara mudah. Mengapa menggunakan redaksi #reformasidikorupsi, karena pada era Reformasi ini agenda pemberantasan korupsi telah mengalami kemunduran, melemahkan KPK adalah tindakan yang tidak sejalan dengan semangat cita-cita reformasi yang digaungkan oleh para aktivis tahun 1998.

Dalam melakukan *framing* gerakan, koalisi tidak ingin membesar-besarkan nama forum koalisi masyarakat sipil antikorupsi yang menjadi wadah mereka dalam melakukan langkah advokasi, hal tersebut bertujuan dapat mudah digunakan oleh publik agar mau turut serta terlibat terhadap isu ini dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara kelompok masyarakat yang juga ingin turut serta mendesak revisi UU KPK untuk dibatalkan.

“Kalau saya sih justru melihat sebenarnya dahulu kenapa sebagai koalisi tidak terlalu dibesar-besarkan, karena ingin isu ini jadi milik semua orang, makanya yang dibesar-besarkan adalah tagar #reformasidikorupsi. Jadi kami justru merasa, kalau nama

koalisi yang dibesarkan, maka nanti jadinya tidak ada rasa kepemilikan. Jadi mungkin kawan-kawan yang mengorganisir Gejayan Memanggil, saya kan bukan anggota koalisi jadi kayak struktural banget gitu loh. Jadi kita justru menginginkan koalisi cair, jadi walaupun ada yang muncul, itu dibiarkan muncul sendiri-sendiri bahkan tidak hanya dari LBH, ICW bahkan Irma dari Efek Rumah Kaca jalan sendiri juga, mereka bikin juga ya banyak tuh sebenarnya mereka. Terus kan wartawan jalan sendiri juga, tapi yang jelas waktu itu memang kami sengaja tidak mau memonopoli. Bahwa kami loh koalisi yang ngerjain ini, itu karena kalau dimonopoli nanti malah isunya nggak bisa, nggak bisa diambil sama semua orang jadi inklusif gitu. Akhirnya masing-masing bebas aja walaupun kami tetap rapat tetap berkabar di *WhatsApp group*.” (Wawancara dengan Bivitri Susanti (PSHK), 5 Maret 2021).

Pada wacana revisi UU KPK tahun 2019 sempat timbul *framing* bahwa KPK telah disusupi kelompok Taliban dan beberapa *hashtag* yang digunakan seolah-olah KPK telah melakukan tindakan yang kurang profesional atau sewenang-wenang. Hal tersebut dilakukan di jagad sosial media maupun tokoh-tokoh pendukung pemerintah dan melalui pemberitaan tersebut sempat membuat gaduh publik. Ketika ditanyakan efektif atau tidaknya *framing* yang dilakukan oleh koalisi, Direktur Yayasan LBH Indonesia Asfinawati mengatakan:

“Kalau melihat publik yang bergerak itu kan efektif sekali meskipun pertarungannya menurut saya bukan pada rilis resmi itu, pada akhirnya. Tapi di media sosial ya karena sebetulnya publik itu terutama yang kelas menengah ke atas itu di perkotaan yang selama ini bulat membela KPK itu kan terbelah gara-gara isu tadi, taliban dan lain-lain. Jadi sebetulnya di medsos itu yang masih perlu.”

Framing di sosial media masih sangat diperlukan dan strategi untuk menghadapi berbagai isu tersebut membuat konsentrasi koalisi terganggu dikarenakan melalui penggiringan opini tersebut dapat membuat langkah DPR maupun Pemerintah mempermudah mendapat perhatian dari publik untuk mempercepat revisi UU KPK. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi tidak terlalu cepat merespon isu penggiringan opini yang dituduhkan kepada KPK pada saat itu, dan sulit melawan berbagai *buzzer* yang bergerak secara sporadis melalui media sosial.

Melakukan Liputan Media

Liputan media mengenai mengenai isu-isu kebijakan menurut Linsky (1998), dapat mengangkat isu ke tingkat pembuat kebijakan yang lebih tinggi dan memicu kemauan politik mereka untuk bertindak dalam isu-isu ini (Gen & Wright, 2013). Dalam hal ini, liputan media dapat meningkatkan kemauan politik para pembuat kebijakan untuk menanggapi atau bertindak terhadap isu-isu tersebut. Koalisi secara intens melakukan advokasi terhadap revisi UU KPK melalui media, yaitu melakukan *press conference* serta menaikkan isu penolakan revisi UU KPK di berbagai akun media sosial masing-masing simpul organisasi yang ada di dalam koalisi.

TII bersama ICW melakukan pemberitaan media terkait pelemahan revisi UU KPK hingga pemberitaan tersebut sampai kepada masyarakat global dan direspons oleh 25 NGO pegiat anti korupsi dari berbagai negara yang tergabung ke dalam UNCAC Coalition (UN Convention Against Corruption) dengan menandatangani pernyataan sikap yang berjudul “*UNCAC Coalition Statement on threats to the independence of Indonesia’s Corruption Eradication Commission KPK*” yang dirilis pada 27 September 2019, 10 hari sejak UU KPK direvisi oleh DPR.

“Peran yang dimainkan oleh TII melakukan upaya penggalangan advokasi di lintas negara karena kita Transparansi Internasional Indonesia bagian dari Transparansi Internasional Global sehingga kita banyak jaringan global, hasil advokasi atau proses advokasi kita kabarkan ke dunia luar sehingga masyarakat di luar sana, juga tahu bahwa hari ini, misalnya terjadi upaya pelemahan KPK melalui revisi undang-undang KPK tersebut. Dua peran itu yang paling banyak dilakukan TII dalam koalisi.” (Wawancara dengan Wawan Suyatmiko pada 18 Maret 2021).

Meski strategi yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi telah berhasil mendapatkan dukungan yang positif dari berbagai media nasional maupun internasional, akan tetapi dukungan tersebut tidak membuat goyah langkah DPR untuk tetap mengesahkan revisi UU KPK dan Presiden Joko Widodo juga tidak kunjung mengeluarkan Perppu atas revisi yang telah diparipurnakan pada 17 September 2019.

Memperluas Jejaring dalam Melakukan Gerakan Sosial

Strategi advokasi yang kelima ialah memperluas jejaring dalam melakukan gerakan sosial, sebagai mana yang dijelaskan oleh Gen & Wright (2013) strategi advokasi sebagaimana puncaknya yaitu kelompok gerakan dapat mengajak atau memaksa masyarakat untuk memilih, melakukan demonstrasi, protes, dan lain-lain. Terkait revisi UU KPK pada tahun 2019, koalisi masyarakat sipil antikorupsi melakukan mobilisasi jaringan seperti YLBHI dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa yang hampir kurang lebih sepuluh kali dilakukan di Halaman Gedung KPK, selanjutnya pada 13 September 2019 misalnya terjadi aksi tabur bunga di Halaman Gedung KPK yang dilakukan oleh puluhan peserta aksi yang terdiri dari anggota koalisi masyarakat sipil antikorupsi dan berbagai aksi unjuk rasa lainnya saat mendekati paripurna dan setelahnya dengan memperluas jejaring bersama para buruh dan mahasiswa.

“Ketika kita tahu bahwa hari ini terjadi yang namanya *shrinking democracy in public space*, maka turun ke jalan, aksi massa yang kemarin dilakukan oleh koalisi secara inklusif dengan gerakan yang lain itu menjadi satu-satunya cara yang bisa kita gunakan hari ini, karena advokasi yang dilakukan ke DPR juga mentok atau advokasi yang dilakukan ke istana dalam hal ini, yang mantan-mantan aktivis, yang dulunya juga demonstran itu juga mentok juga, ternyata nggak punya visi yang sama. Apa yang bisa kita lakukan begitu, ya sudah, satu-satunya jalan hari ini yang bisa kita lakukan adalah merebut kembali ruang-ruang demokrasi dengan cara turun ke jalan, itu saja masih tidak didengarkan. Maksud saya ini juga bukan karena suara koalisi kurang kencang, bukan, tapi kepentingan penguasa, untuk agenda kepentingan penguasa untuk melemahkan KPK itu yang lebih dominan hari ini karena mereka punya kekuasaan, itulah yang lebih dominan dan kemudian itu menjadikan kenapa revisi undang-undang KPK mulus berjalan hanya dalam waktu dua pekan” (Wawancara dengan Wawan Suyatmiko pada 18 Maret 2021).

Selain melakukan berbagai aksi unjuk rasa, koalisi dalam memperluas jejaring juga melakukan penggalangan dukungan publik melalui petisi daring (*online*) yang termuat dalam situs *change.org*, bahkan petisi daring bertemakan penolakan revisi UU KPK merupakan petisi terbanyak yang ditanda tangani oleh publik sepanjang tahun 2019. Petisi-petisi terkait gerakan #ReformasiDikorupsi terangkum dalam laman *reformasidikorupsi-change.org* dan berhasil menggalang lebih dari 2,3 juta suara dari total 8 petisi.

“Tahun 2019 gerakan sosial pada platform digital *Change.org* juga diramaikan kampanye bertemakan demokrasi dan antikorupsi. Gerakan sosial terkait demokrasi

dan antikorupsi meningkat karena situasi politik di Indonesia yang juga sedang diuji. Mulai dari pergantian masa jabatan wakil rakyat hingga dinamika pemilihan presiden dan wakil presiden.” (Pernyataan Desmarita Murni yang dikutip dalam pemberitaan *Kabar24bisnis.com* pada 18 Januari 2020).

Tidak cukup dengan menggalang opini publik, koalisi masyarakat sipil antikorupsi juga memerlukan dukungan dari para akademisi, guru besar, pakar dan tokoh pegiat antikorupsi. Ketika koalisi sedang memperluas jejaring, koalisi juga dihadapkan dengan pembelahan opini di tengah-tengah masyarakat bahwa penggiringan isu terhadap KPK bertindak sewenang-wenang dan KPK telah disusupi Kelompok Taliban merupakan persoalan serius yang koalisi sendiri tidak bisa mengcounter permasalahan tersebut.

Dalam melakukan advokasi menyusun strategi gerakan, koalisi masyarakat sipil antikorupsi melakukannya dengan pola tergantung pada situasi dan kondisi saat itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Bivitri (2021) sikap kehati-hatian perlu dikedepankan karena tantangan untuk disadap dan terbaca oleh pihak-pihak yang dapat merugikan kerja-kerja koalisi perlu diantisipasi,

“Tergantung isunya, jadi kalau yang dibahas isunya sensitif banget kami tutup banget karena kami paham betul bahayanya. Jadi bahkan kalau memang sudah sesuatu yang sifatnya yang sangat teknis mau aksi segala macam itu semua harus mematikan Handphone. Karena upaya penyadapan, upaya penangkapan segala macem itu banyak ya kan termasuk saya sendiri, berapa kali dicoba dan seterusnya. Jadi kami lebih *aware*, apalagi teman-teman dari ICW sama YLBHI itu mereka yang sangat peka. Nah tapi tentu saja kalau memang rapat terbuka diskusi ya kan yang dibicarakan pada hal-hal yang sifatnya umum kaya terbuka. Tapi umumnya memang tertutup karena serius kali ini yang lagi dilawan.”

Dari uraian mengenai strategi advokasi yang dilakukan koalisi masyarakat sipil antikorupsi pada tahun 2019, umumnya strategi yang dilakukan hampir sama seperti advokasi pada usulan revisi UU KPK di tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja pada tahun 2019, gerakan koalisi menemukan berbagai peluang dan hambatan sehingga terdapat strategi yang memiliki kekuatan dan kelemahan ketika koalisi melakukan strategi gerakan. Maka pada pembahasan selanjutnya, penulis memetakan kekuatan dan kelemahan strategi advokasi koalisi masyarakat sipil antikorupsi sebelum akhirnya dapat mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan gerakan sosial yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi pada tahun 2019.

Kekuatan dan Kelemahan Strategi Advokasi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dalam Menolak Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pola advokasi yang dilakukan koalisi masyarakat sipil antikorupsi pada 2019 dengan melakukan strategi advokasi yang tidak jauh berbeda dilakukan pada wacana revisi UU KPK di beberapa tahun sebelumnya. Usulan untuk merevisi UU KPK telah diwacanakan oleh DPR sejak 2010 dan muncul kembali pada 2015, dan pada akhirnya mendapatkan momentum pada tahun 2019. Biasanya strategi advokasi yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi berhasil untuk mendesak pemangku kebijakan untuk membatalkan revisi UU KPK. Untuk itu sebelum penulis menguraikan kelebihan dan kelemahan strategi advokasi yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi, penulis mengidentifikasi terlebih dahulu berbagai strategi advokasi yang dilakukan oleh koalisi ke dalam tabel berikut.

Tabel 1 Identifikasi Strategi Advokasi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi

Bentuk Advokasi	Tujuan
Melakukan Kajian atau Analisis Kebijakan	Mengidentifikasi draft rancangan undang-undang yang dapat berdampak pada pelemahan independensi KPK
Melakukan Lobi dengan Pemerintah dan DPR	Membangun komunikasi dan dapat merubah sikap para pemangku kebijakan untuk mendukung penolakan terhadap revisi UU KPK
Membangun Framing	Menciptakan narasi kepada masyarakat luas bahwa pelemahan terhadap KPK nyata terjadi melalui revisi UU KPK dan memantik masyarakat untuk turut mendukung gerakan yang dilakukan oleh koalisi
Melakukan Liputan Media	Mempermudah penyebaran berbagai pemberitaan mengenai narasi yang dibuat oleh koalisi dan menginformasikan sikap pernyataan yang dikeluarkan oleh koalisi
Memperluas Jejaring dalam Melakukan Gerakan Sosial	Semakin kuatnya konsolidasi dengan kelompok masyarakat sipil lainnya dalam melakukan aksi unjuk rasa agar desakan penolakan revisi dapat segera didengarkan oleh pemangku kebijakan

Dari kelima strategi advokasi yang dilakukan oleh koalisi, penulis menganalisis bentuk strategi advokasi terkuat yang dilakukan oleh koalisi. *Pertama*, mendapatkan dukungan dari berbagai media. Dukungan media kepada gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi menjadikan berbagai strategi gerakan yang dilakukan oleh koalisi semakin efektif untuk menciptakan narasi kepada publik mengenai berbagai upaya pelemahan dan ancaman terhadap independensi KPK jika revisi UU KPK tetap dilakukan.

Kedua, melakukan kajian dan analisis kebijakan. Koalisi sebelum melakukan berbagai strategi advokasi lainnya tentu melakukan kajian terhadap draft rancangan revisi UU KPK secara mendalam, membahas pasal-pasal yang dapat mengancam independensi KPK dan pasal-pasal yang sekiranya menjadi sebuah kemunduran dalam memberantas korupsi di Indonesia. Tokoh-tokoh aktivis di dalam koalisi masyarakat sipil merupakan tokoh yang mempunyai di berbagai kajian isu advokasi dan antikorupsi. Selain itu dalam melakukan berbagai kajian, koalisi menggandeng berbagai guru besar hingga akademisi sehingga dukungan dunia kampus untuk melakukan penolakan terhadap revisi UU KPK semakin kuat.

Tidak hanya memiliki kekuatan yang dijadikan peluang oleh koalisi, koalisi juga mendapati beberapa hambatan dalam menjalankan strategi advokasi menolak revisi UU KPK. Hambatan tersebut diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, dalam melakukan strategi lobi kepada Pemerintah dan DPR, koalisi kurang dapat meyakinkan para pemangku kebijakan seperti Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Politik, Para Anggota DPR RI Periode 2014 -2019. Hambatan untuk meyakinkan pihak eksekutif maupun legislatif agar mereka yakin bahwa UU KPK tidak perlu revisi. Strategi lobi yang dilakukan oleh koalisi tidak maksimal sehingga pada akhirnya revisi UU KPK tetap disahkan oleh DPR (wawancara dengan Wawan Suyatmiko, April 2021).

Kedua, strategi memperluas jejaring dalam melakukan berbagai aksi unjuk rasa. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi ketika melakukan advokasi menolak revisi UU KPK, juga mendapatkan berbagai tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Peretasan telepon genggam milik anggota koalisi, akademisi, hingga berbagai tokoh yang kritis terhadap revisi UU KPK terjadi. Penyadapan alat komunikasi menjadi sebuah penghambat, dikarenakan terdapat pihak-pihak yang ingin membaca pola dan strategi gerakan yang dilakukan oleh koalisi. Selain itu terjadinya kontra dukungan di masyarakat terhadap revisi UU KPK dengan melakukan aksi unjuk rasa tandingan yang bertujuan untuk memecah konsentrasi gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi dan memecah perhatian publik terhadap perjuangan yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi. Bahkan menurut berbagai sumber pemberitaan dan investigasi yang dilakukan oleh *Kompas* dan *Tempo*, bahwa peserta unjuk rasa yang mengetahui substansi tuntutan untuk memberikan dukungan terhadap revisi UU KPK di antaranya hanya kordinator lapangannya saja (korlap) paling hanya dua atau tiga orang yang ada di atas mobil, selebihnya peserta aksi yang tidak memahami apa itu perubahan UU KPK dan sebagainya mengenai substansi yang dilakukan melalui aksi unjuk rasa.

Ketiga, strategi pembentukan *framing* yang dilakukan koalisi tidak mampu membantah isu yang dibingkai oleh kelompok pendukung revisi UU KPK. Ketika koalisi sibuk dengan membingkai narasi pelemahan KPK melalui revisi, koalisi juga dihadapkan dengan berbagai isu mengenai KPK yang sudah *over power* dan disusupi oleh kelompok Taliban. Hal tersebut menjadi sebuah kelemahan strategi advokasi yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil karena tidak mampu meng-*counter* berbagai isu yang beredar di berbagai media sosial yang sejatinya kontra terhadap gerakan yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi pada tahun 2019.

SIMPULAN

Aksi kolektif agar gerakan koalisi mencapai tujuan yang dicita-citakan, koalisi masyarakat sipil antikorupsi melakukan beberapa strategi advokasi gerakan yang biasa koalisi lakukan pada setiap desakan menolak revisi UU KPK sejalan dengan konsep metode proses advokasi yaitu melakukan lobi dengan Pemerintah dan DPR, melakukan kajian atau analisis kebijakan, melakukan framing, melakukan liputan media serta memperluas jejaring dalam melakukan gerakan. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi dalam melakukan strategi advokasi menolak revisi UU KPK tahun 2019 memiliki kekuatan yang dapat dijadikan peluang kesempatan gerakan koalisi yaitu dukungan dari berbagai media hingga berbagai kajian yang dilakukan didukung oleh para guru besar dan professor sehingga koalisi mendapat dukungan dari dunia kampus. Tidak hanya memiliki kekuatan yang dijadikan peluang, koalisi juga mendapati beberapa hambatan dalam melakukan gerakan mendesak revisi UU KPK untuk dibatalkan. Hambatan tersebut yaitu koalisi kurang meyakinkan para *stakeholders*, koalisi mendapat perlawanan melalui berbagai cara represif, dibenturkannya gerakan kelompok masyarakat sipil untuk mendukung revisi UU KPK, strategi *framing* yang dilakukan oleh koalisi tidak mampu membantah isu yang menyerang KPK dan para pegawainya yang dilakukan oleh para pendukung revisi UU KPK melalui sosial media.

DAFTAR PUSTAKA

- Benford, R. D. & Snow, D. A.. (2000). *Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assesment. Annual Review of Sociology*, Vol. 26, 611-639. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.611>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*. London: Sage Publication.
- Faisal, S. (2010). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gen, S., & Wright, A. C. (2013). *Policy Advocacy Organizations: A Framework Linking Theory and Practice*. (Journal of Policy Practice, Vol. 12 No.3., h. 18-26. <http://dx.doi.org/10.1080/15588742.2013.795477>
- McAdam, D. & Snow. (1997). *Social Movements: Readings on Their Emergence, Mobilization, and Dynamics*. Roxbury Pub.
- Nailufar, N. N. (2019). "KPK Fana, Korupsi Abadi (3): Apakah Kita sedang Berjalan Mundur?" <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/17/160000165/kpk-fana-korupsi-abadi-3-apakah-kita-sedang-berjalan-mundur?page=all>
- Permata, A. G. (2017). *Peran Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Melakukan Advokasi Untuk Mencegah Revisi Undang- Undang No. 30 Tahun 2002*. FISIP Universitas Indonesia.
- Fahmilda, Y., & Prastiyono, Y. A. (2019). Representasi, Parodisasi, Dan Kontekstualisasi Tujuh Puluhan Karya Yanusa Nugroho: Pendekatan Posmodernisme Linda Hutcheon. *Seminar Internasional Riksa Bahasa*. <http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1112>
- Ramadhana, K. & Oktaryal, A. (2020) *Laporan Tim Advokasi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi*.
- Rastika, I. (2019, September 17). *Jalan Panjang Revisi UU KPK, Ditolak Berkali-kali hingga Disahkan Halaman all - Kompas.com*. KOMPAS.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/16171491/jalan-panjang-revisi-uu-kpk-ditolak-berkali-kali-hingga-disahkan?page=all>
- Ridwan, R. (2012). Peran Lembaga Pendidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 547–556. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.126>
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widjajanto, B. & Hadjar, A. F. (2020) *Reformasi di Korupsi KPK dihabisi, Sebuah Catatan Kritis*". Intrans, Malang.



JPI: JOURNAL OF POLITICAL ISSUES

Universitas Bangka Belitung
Jurusan Ilmu Politik

Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang,
Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka
Belitung, 33172
editor@jpi.ubb.ac.id